

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**EFEKTIVITAS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DALAM
PEMBANGUNAN SEKTOR KETAHANAN PANGAN DI
KABUPATEN YALIMO**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

SYARIFUDDIN HAFID

NIM. 530003625

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2020

ABSTRAK

**EFEKTIVITAS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
DALAM PEMBANGUNAN SEKTOR KETAHANAN PANGAN
DI KABUPATEN YALIMO**

Syarifuddin Hafid
shpapua@gmail.com

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Dinas Pertanian dan Pangan dalam pembangunan sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo dan apa saja penghambat efektivitasnya. Desain penelitian menggunakan metode kualitatif dengan sumber informasi berasal dari informan internal dan eksternal Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo menggunakan *teknik purposive sampling*. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Pendekatan teori yang digunakan dalam pengukuran efektivitas organisasi adalah model tujuan rasional oleh Azhar Kasim (Liestyodono, 2014), dimana dimensi rasional yang digunakan adalah perumusan tujuan, penjabaran kegiatan dan evaluasi.

Hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Pertanian dan Pangan belum efektif dalam pelaksanaan pembangunan sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo. Perumusan tujuan pembangunan sektor ketahanan pangan yang dilaksanakan belum efektif, karena belum memberikan dampak secara langsung terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat di Kabupaten Yalimo. Penjabaran berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan tidak tepat sasaran karena produksi dan produktivitasnya dari beberapa komoditi penunjang sektor ketahanan pangan masih rendah. Dinas Pertanian dan Pangan dalam pengembangan komoditi tanaman pangan hanya melihat target *output* serta penyusunan berbagai program dan kegiatan belum berdasarkan pada ketersediaan data-data ril sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, luasnya bidang tugas dan kewenangan yang diimbang sesuai struktur organisasi, kemampuan dan motivasi pegawai yang masih rendah, serta belum terlibatnya berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan ketahanan pangan merupakan penghambat efektivitas Dinas Pertanian dan Pangan dalam pembangunan sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dalam melaksanakan pembangunan sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo melalui identifikasi tujuan yang didasarkan pada data-data dasar ketahanan pangan, pemisahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan bidang urusan yang disertai dengan penempatan pegawai yang memiliki kompetensi, serta untuk mengoptimalkan kebijakan dan manajemen sektor ketahanan pangan diperlukan pembentukan Dewan Ketahanan Pangan di Kabupaten Yalimo.

Kata Kunci : Efektivitas Organisasi, Tanaman Pangan, Ketahanan Pangan.

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF THE DEPARTEMENT OF AGRICULTURE AND FOOD IN THE DEVELOPMENT OF THE FOOD SECURITY SECTOR IN YALIMO REGENCY

Hafid Syarifuddin
shpapua@gmail.com

Graduate Studies Program
 Open University

The research aims to determine the effectiveness of the Departement of Agriculture and food in the development the food security sector in Yalimo Regency and what are the obstacles to its effectiveness. The research design usses a qualitative methodology with sources of information coming from internal and external informants of information coming from internal and external of the Departement of Agriculture and food in Yalimo Regency by using purposive sampling techniques. Data collection techniques trough in deep interview, observation and documentation. The theoretical approach used in measuring organization effectiveness is the rational goal model by Kasim Azhar (Liestyodono, 2014), where the rational dimension used is the formulation of objectives, elaboration of activities and evaluation.

The results of the study note that the Departement of Argriculture and Food have been not effective in implementing the development of food security sector in the Yalimo Regency. The formulation of the development goals of the food security sector that has been implemented has been not effective because it has not get had a direct impact on the food needs of the humans in Yalimo Regency. The translation of various activities that have been carried out is not on target because of the produktion and productivity of several commodities supporting the food security sector is still low. The Departement of Agriculture and Food in the development of food crops commodities only sees output targets and the preparation of various programs and activities not based on the availability of real data according to needs. Meanwhile, the breadth of tasks and authorities in accordance with the organizational structure, the ability and motivation of employee is still low, and the involvement of various parties in formulating food security policies is an obstacle to the effectiveness of the Departement of Agriculture and Food in the development of the food security sector in Yalimo Regency. As for the efforts that can be made by Departement of Agriculture and Food in carrying out the development of the security sector in Yalimo Regency throught the identification of objectives based on basic data on food security. The separation of regional organizations based on the field of affairs accompanied by the placement of employment with competence and to optimizing the policies and management of the food security council in the Yalimo Regency.

Key words : Organization Effectiveness, Crops, Food Security.

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Efektivitas Dinas Pertanian dan Pangan dalam pembangunan sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jayapura, Oktober 2019.

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and blue 6000 Rupiah stamp. The stamp includes the text 'METERAI TEMPEL', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'. The signature is written in a cursive style.

SYARIFUDDIN HAFID
NIM. 530003625

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya Pondok Cabe, Ciputat 15418
Telp. 021-7415050, Faks. 021-7415588

**SURAT PERNYATAAN PERBAIKAN
DAN PENYERAHAN NASKAH TAPM**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYARIFUDDIN HAFID
NIM : 530003625
Program Studi : Administrasi Publik
Judul TAPM : EFEKTIVITAS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
DALAM PEMBANGUNAN SEKTOR KETAHANAN
PANGAN DI KABUPATEN YALIMO

dengan ini menyatakan telah memperbaiki naskah TAPM menurut format PPs-UT dan bersama ini saya menyerahkan hasil perbaikan kepada direktur PPs-UT selaku panitia ujian sidang.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, saya mengucapkan terima kasih.

Jayapura, 6 Desember 2019.

Mengetahui
Kepala UPBJJ-UT Jayapura,

Drs. Mujadi, M.Pd
NIP. 19590217 199010 1 001

Mahasiswa,

Syarifuddin Hafid
NIM. 530003625

Ketua Pascasarjana
Hukum, Sosial, dan Politik,



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : EFEKTIVITAS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
DALAM PEMBANGUNAN SEKTOR KETAHANAN
PANGAN DI KABUPATEN YALIMO

Penyusun TAPM : SYARIFUDDIN HAFID
NIM : 530003625
Program Studi : Administrasi Publik
Hari/Tanggal : Jumat, 1 November 2019

Menyetujui :

Pembimbing II,

Pembimbing I,

Dr. Harry Nanobais, M.Si.

Dr. Muhammad Sawir, M.Si.

Penguji Ahli,

M. Qodrat Nugraha, Ph.D.

Mengetahui,

Ketua Pascasarjana
Hukum, Sosial, dan Politik,

Dr. Darmanto, M.Ed.
NIP. 19591027 198603 1 003

Dekan FHSIP,



Dr. Sofjan Aripin, M.Si.
NIP. 19660619 199203 1 002

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : SYARIFUDDIN HAFID
 NIM : 530003625
 Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
 Judul TAPM : EFEKTIVITAS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
 DALAM PEMBANGUNAN SEKTOR KETAHANAN
 PANGAN DI KABUPATEN YALIMO

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
 (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 1 November 2019


W a k t u : 14.30 – 16.00 WIT

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Tandatangan

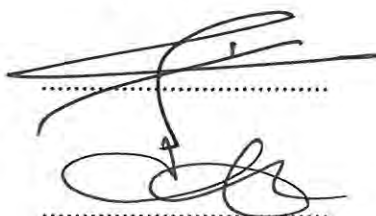
Ketua Komisi Penguji
 Nama : Drs. Mujadi, M.Pd.



Penguji Ahli
 Nama : M. Qodrat Nugraha, Ph.D.



Pembimbing I
 Nama : Dr. Muhammad Sawir, M.Si.



Pembimbing II
 Nama : Dr. Harry Nenobais, M.Si.



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-nya saya dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Negara Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari proses perkuliahan hingga pada penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Bupati Kabupaten Yalimo yang telah memberikan ijin belajar kepada penulis untuk melanjutkan studi di Universitas Terbuka.
2. Bapak Jonathan A. Mangalik, S.Pt. selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
3. Rektor dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
4. Bapak Dr. Sofjan Aripin, M.Si., selaku Dekan FHSIP Universitas Terbuka dan Bapak Dr. Darmanto, M.Ed., selaku Ketua Program Pascasarjana Hukum, Sosial dan Politik Universitas Terbuka.
5. Kepala UPBJJ-UT Jayapura Bapak Drs. Mujadi, M.Pd. dan Pengelola Pascasarjana UPBJJ-UT Jayapura Ibu Milcha Handayani Tamubua, SE, MM., selaku penyelenggara program pascasarjana.
6. Bapak Dr. Muhammad Sawir, M.Si., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Harry Nenobais, M.Si., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan

waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini.

7. Keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan dan doa kepada saya dalam menyelesaikan perkuliahan di Universitas Terbuka.
8. Sahabat yang secara tidak langsung telah membantu saya dalam menyelesaikan studi dan para informan penelitian yang telah membantu dalam penyelesaian TAPM ini; dan
9. Rekan-rekan seangkatan pada Program Magister Administrasi Publik Pokjar Wamena yang selalu menyemangati, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan TAPM ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini bermanfaat.



Penulis,

SYARIFUDDIN HAFID
NIM. 530003625


RIWAYAT HIDUP

Nama : SYARIFUDDIN HAFID
 NIM : 530003625
 Program Studi : Administrasi Publik
 Tempat / Tanggal Lahir : Wamena, 24 Desember 1975

Riwayat Pendidikan : - Lulus SD di Wamena pada tahun 1986.
 - Lulus SMP di Wamena pada tahun 1989.
 - Lulus SMA di Wamena pada tahun 1992.
 - Lulus SARJANA di Universitas Cenderawasih pada tahun 1997.

Riwayat Pekerjaan : - Tahun 2003 s/d 2010 sebagai Dosen Tetap pada STIA Amal Ilmiah Yapis Wamena.
 - Tahun 2010 s/d 2013 sebagai staf pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Yalimo.
 - Tahun 2014 s/d 2016 sebagai Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Yalimo.
 - Tahun 2017 s/d sekarang sebagai Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo.

Jayapura, Oktober 2019


 SYARIFUDDIN HAFID
 NIM. 530003625

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Abstrak	ii
Lembar Pernyataan	iii
Lembar Perbaikan	iv
Lembar Persetujuan	v
Lembar Pengesahan	vi
Kata Pengantar	vii
Riwayat Hidup	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah Penelitian	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	17
1. Konsep Organisasi	17
2. Konsep Efektivitas Organisasi	19
3. Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Organisasi	35
4. Konsep Pembangunan	39
5. Konsep Ketahanan Pangan	43
B. Penelitian Terdahulu	45
C. Kerangka Berpikir	50
D. Operasionalisasi Konsep	52
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	55
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan	56
C. Instrumen Penelitian	57
D. Prosedur Pengumpulan Data	58
E. Metode Analisis Data	59
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian	64
1. Gambaran Umum Kabupaten Yalimo	64
2. Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo	65
a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	65
b. Susunan Organisasi	66

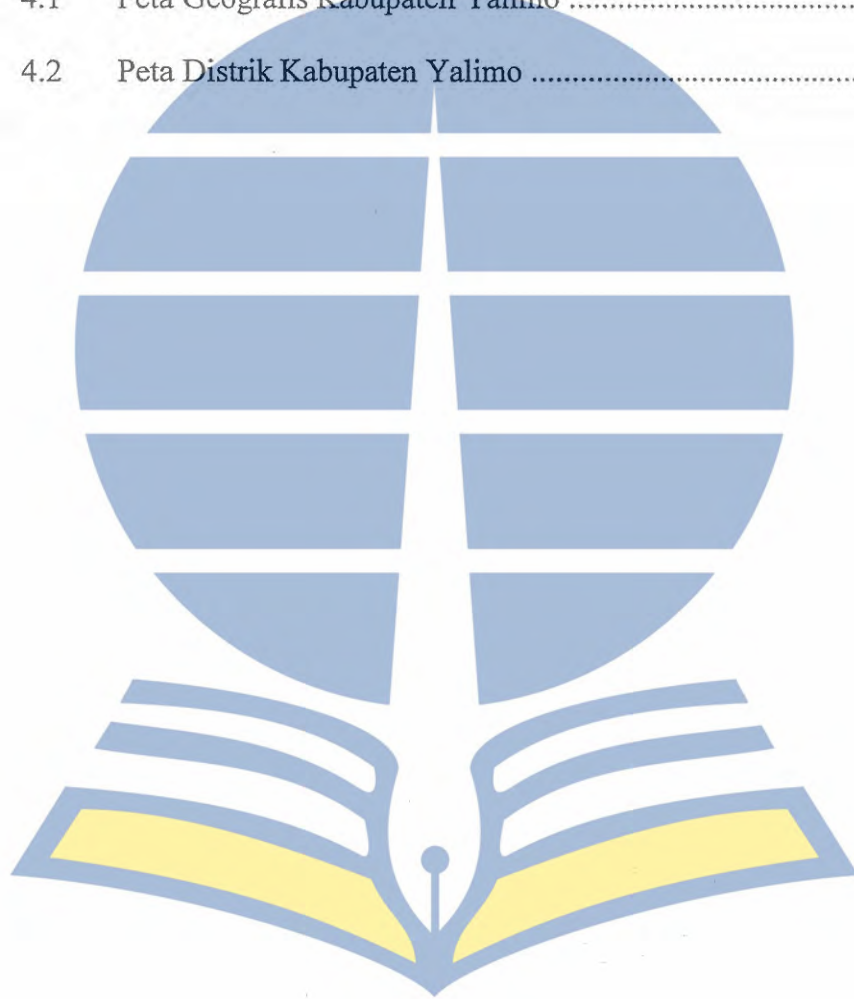
c. Kepegawaian	81
B. Hasil	83
1. Efektivitas Dinas Pertanian dan Pangan Dalam Pembangunan Sektor Ketahanan Pangan di Kabupaten Yalimo	83
a. Perumusan Tujuan	83
b. Penjabaran Kegiatan	88
c. Evaluasi	92
2. Penghambat Efektivitas Dinas Pertanian dan Pangan Dalam Pembangunan Sektor Ketahanan Pangan di Kabupaten Yalimo	96
C. Pembahasan	99
1. Efektivitas Dinas Pertanian dan Pangan Dalam Pembangunan Sektor Ketahanan Pangan di Kabupaten Yalimo	99
a. Perumusan Tujuan	100
b. Penjabaran Kegiatan	106
c. Evaluasi	112
2. Penghambat Efektivitas Dinas Pertanian dan Pangan Dalam Pembangunan Sektor Ketahanan Pangan di Kabupaten Yalimo	115
a. Ciri Organisasi	115
b. Ciri Pekerja	117
c. Kebijakan dan Praktik Manajemen	120
 BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	122
B. Saran	124
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo Tahun 2017-2021.....	7
1.2	Jumlah Kegiatan dan Alokasi Anggaran Per Bidang Tahun Anggaran 2017-2018	8
1.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2012-2016	10
1.4	Kegiatan Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2016-2018	11
1.5	Produksi dan Produktivitas Beberapa Komoditas Tanaman Pangan Tahun 2016-2017	12
2.1	Ringkasan Perbandingan Penelitian Sebelumnya	49
4.1	Tingkat Pendidikan Pegawai Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo	82
4.2	Jenjang Pangkat/Golongan Pegawai Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo	82
5.1	Peningkatan Produktivitas Beberapa Komoditi Tanaman Pangan di Kabupaten Yalimo	103
5.2	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Yang Dilaksanakan Dalam Mendukung Pembangunan Sektor Ketahanan Pangan di Kabupaten Yalimo	109

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
2.1	Skema Kerangka Berpikir	51
4.1	Peta Geografis Kabupaten Yalimo	64
4.2	Peta Distrik Kabupaten Yalimo	65



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Transkrip Wawancara	130
Lampiran 2. Surat Permohonan Ijin Penelitian	148
Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	149
Lampiran 4. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo	150
Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara	151



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan secara nasional seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik secara materiil maupun spiritual dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah telah berupaya melalui berbagai regulasi yang ditetapkan dalam mewujudkan hal tersebut. Pelaksanaan regulasi tersebut bertujuan untuk menjaga proses pembangunan nasional tetap berlangsung serta untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan yang aman, tertib dan dinamis. Mewujudkan pembangunan nasional secara utuh, bersatu dan berkedaulatan rakyat tidak saja menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, dimana tujuan dari eksistensi Pemerintah Daerah adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat (Prasojo, et.al. 2016).

Asas desentralisasi yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Hal ini diwujudkan dengan pemberian kewenangan dalam bentuk otonomi kepada daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini secara jelas telah mengatur pemberian kewenangan berupa otonomi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan desentralisasi

dalam wujud otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Kewenangan yang diberikan berupa otonomi yang luas mencakup keleluasan suatu daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan kecuali kewenangan-kewenangan lainnya seperti kewenangan di bidang pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Di samping itu, otonomi yang diberikan mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian hingga evaluasi (Widodo, 2009). Pemberian kewenangan kepada daerah telah memberikan dampak secara langsung terhadap semakin berkurangnya kewenangan Pemerintah Pusat dalam mengatur pemerintahan di daerah serta bertambahnya tanggung jawab daerah dalam mengatur dan melaksanakan pemerintahan. Bertambahnya kewenangan ini membawa konsekuensi terhadap penambahan tugas kepada daerah. Untuk melaksanakan semua tugas pemerintahan di daerah tersebut, maka pemerintah daerah dituntut untuk memaksimalkan peran dan fungsi lembaga-lembaga di daerah dalam menunjang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu langkah yang diambil pemerintah daerah dalam memaksimalkan peran dan fungsi lembaga-lembaga di daerah adalah melaksanakan pengaturan perangkat daerah atau restrukturisasi perangkat daerah berdasarkan asas otonomi daerah (Prasojo, et.al. 2016).

Proses restrukturisasi perangkat daerah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintahan di daerah. Restrukturisasi terhadap organisasi perangkat di daerah yang dilakukan

bertujuan agar organisasi perangkat daerah yang dibentuk dapat mencapai tujuan sesuai yang diharapkan. Ngusmanto (2017:72), menyatakan bahwa :

“Beberapa argumentasi mengapa reformasi terhadap struktur organisasi perlu mendapat prioritas antara lain : kemampuan birokrasi dalam menyelenggarakan pembangunan masih kurang memadai, netralitas birokrasi belum terbangun, unsur-unsur luar organisasi (non birokratik) sangat berpengaruh terhadap birokrasi, birokrasi sangat lamban dan ada kecenderungan makin bertambah birokratik, belum diterapkannya prinsip *ramping* dalam struktur, dan dan tumbuhnya struktur organisasi baru dengan tugas dan fungsi yang *overlapping* dengan organisasi yang sudah ada.”

Lebih lanjut Ngusmanto (2017), juga mengungkapkan bahwa tujuan restrukturisasi organisasi pemerintahan sebagai organisasi birokrasi adalah untuk menghasilkan birokrasi yang profesional dengan karakteristi antara lain : berintegritas tinggi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur sipil negara.

Tak dapat dipungkiri bahwa para pegawai yang merupakan aparatur sipil negara yang berada pada suatu birokrasi pemerintahan dinilai tidak efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pandangan negatif terhadap aparatur tersebut ditunjukkan dengan penilaian dari publik, dimana para birokrat dalam pelaksanaan tugas, fungsi maupun kewenangannya seringkali melakukan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang melenceng dari yang seharusnya. Birokrasi sering dipandang sebagai sesuatu yang menjengkelkan karena adanya praktek-praktek yang tidak seharusnya tersebut. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam sambutan dalam Rakor Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang

dilaksanakan di Sumatera Barat (<http://www.beritasatu.com/nasional/485766-ini-enam-penyakit-birokrasi-di-indonesia.html>), menyatakan bahwa :

“Ada enam penyakit birokrasi yang harus segera diobati di setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Penyakit pertama, masih banyaknya pemerintah daerah yang memiliki persentase belanja operasional untuk kebutuhan internal pemerintah yang lebih besar dari belanja publik. Penyakit kedua, tingkat korupsi yang cukup tinggi. Ketiga, inefektivitas dan inefisiensi dalam pengelolaan pembangunan. Penyakit keempat, kualitas ASN masih belum optimal dalam mendukung kinerja pemerintah. Penyakit kelima, organisasi pemerintah yang cenderung besar, baik di pusat maupun di daerah, yang cenderung memanfaatkan kemungkinan untuk memperbesar struktur tanpa melihat kebutuhan nyata, ketersediaan sumber daya yang dimiliki, kondisi terkini yang dihadapi, dan cakupan wilayah pelayanan. Penyakit keenam, kualitas pelayanan publik yang masih belum memenuhi harapan publik. Selain itu, dalam sambutannya juga disebutkan bahwa penyakit birokrasi adalah perilaku ASN yang belum profesional. Padahal, SDM ASN merupakan unsur yang terpenting dalam birokrasi. Bukan hanya dalam pengertian fisik pegawai, tetapi menyangkut seluruh aspek yang melekat pada pegawai yang bersangkutan, mulai dari perilaku, kompetensi, pengetahuan, kreativitas atau *soft skill* dan lainnya”.

Berbagai penyakit birokrasi seperti yang dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa kinerja birokrasi pemerintahan yang ada saat ini belum menunjukkan kinerja yang maksimal. Berbagai kebijakan melalui penataan birokrasi yang telah dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan kinerja birokrasi. Birokrasi bukan lagi sebagai orang yang dilayani namun lebih pada pemberian pelayanan yang maksimal kepada publik. Penataan terhadap birokrasi bertujuan untuk merubah sikap dan perilaku dari birokrasi itu sendiri agar dapat melayani masyarakat dengan baik. Selain birokrasi itu sendiri, penataan ulang organisasi menjadi penting dilakukan agar dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan.

Efektivitas dari suatu organisasi dalam mendesain organisasi dan birokrasinya sangatlah ditentukan oleh kemampuan untuk mempertemukan kepentingan individu dan kepentingan organisasi serta strategi organisasi. Efektivitas itu sendiri tidak lain adalah kemampuan dalam mencapai tujuan maupun sasaran secara efisien dengan dukungan sumber daya yang tersedia. Efektivitas organisasi birokrasi ditunjukkan oleh keberhasilan birokrasi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, sehingga tujuan maupun sasaran organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal menggunakan sumber daya yang tersedia. Organisasi yang di desain dengan memperhatikan kemampuan sumber daya yang ada akan lebih efektif dalam mencapai tujuan dibandingkan dengan organisasi yang di desain tanpa memperhatikan sumber daya yang tersedia. Selain itu sumber daya manusia yang bertugas sebagai birokrat dalam organisasi haruslah berupaya merubah perannya yang semula sebagai pelaksanaan menjadi motivator, dinamisator dan fasilitator pembangunan.

Pelaksanaan redesain struktur organisasi perangkat daerah yang mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Yalimo bertujuan agar organisasi lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan perannya sesuai dengan tugas pokok serta fungsi yang menjadi kewenangannya. Penataan terhadap organisasi perangkat daerah maupun penempatan birokrasinya merupakan bagian yang saling berkaitan dalam upaya mewujudkan organisasi yang lebih baik. Menurut Robbins (2011) dalam Budihardjo (2011:14) yang menyatakan bahwa :

“Organisasi merupakan kumpulan entitas sosial yang dengan sadar terkoordinasi dalam suatu batasan-batasan yang jelas serta secara bersama-sama dalam batas waktu tertentu dan terus menerus berupaya mencapai suatu sasaran. Semua organisasi memiliki visi, misi, maupun sasaran yang ingin dicapai dimana sasaran tersebut lazim disebut sebagai keefektifan organisasi (*organizational effectiveness*). Organisasi merupakan suatu instrumen dalam pencapaian sasaran, dimana organisasi tersebut tidak selalu mudah menentukan dan merumuskan sasaran tersebut secara terukur (operasional). Berbagai fakta menunjukkan banyak organisasi yang dibentuk memiliki sasaran ganda (*multiple goals*), dimana antara sasaran satu dan lainnya dapat saling bertentangan.”

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo yang merupakan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Yalimo Provinsi Papua. Organisasi Perangkat Daerah ini mengalami perubahan nomenklatur dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan menjadi Dinas Pertanian dan Pangan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Yalimo Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Yalimo, Peraturan Bupati Yalimo Nomor 16 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Peraturan Bupati Yalimo Nomor 19 tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo. Perubahan nomenklatur ini, mengakibatkan struktur organisasi pun mengalami perubahan yang semula 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) sekretariat menjadi 4 (empat) bidang dan 1 (satu) sekretariat. Selain itu pula, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, menangani 2 (dua) urusan yakni urusan pilihan pertanian

dan urusan wajib yang berkaitan dengan pengembangan pangan di Kabupaten Yalimo.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangannya tersebut, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dengan melaksanakan berbagai program maupun kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dan sasaran sesuai Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo tahun 2017-2021 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Yalimo tahun 2016-2021, seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
 Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo
 Tahun 2017-2021**

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Terwujudnya birokrasi yang profesional dan tata kelola pemerintahan yang baik.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Meningkatnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah.
2.	Terciptanya pengelolaan dan pemanfaatan SDA pertanian dan perkebunan secara merata berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman pangan unggulan. Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi produk perkebunan unggulan. Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi produk peternakan. Meningkatnya pengelolaan SDA secara merata untuk mendukung perekonomian masyarakat. Optimalisasi sistem penanganan hasil pertanian dan perkebunan, penyediaan bibit serta pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dan hama tanaman pertanian.

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo, Tahun 2019.

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa arah kebijakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo periode tahun 2017-2021 lebih dititikberatkan pada pengembangan potensi dan pengelolaan produk baik tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan, dimana hal ini merupakan urusan pilihan bidang pertanian. Adapun isu-isu strategis yang digunakan dalam penyusunan tujuan dan sasaran di atas meliputi : belum terciptanya swasembada pangan, belum berkembangnya upaya keanekaragaman pangan, tingginya frekuensi konservasi lahan pertanian menjadi non pertanian, belum berkembangnya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam bidang pertanian, skala usaha pertanian masyarakat masih subsistem, kurang memadainya sarana dan prasarana produksi pertanian, ketersediaan tenaga penyuluh pertanian yang belum memadai, rendahnya tingkat ketahanan pangan yang teridentifikasi dengan masih adanya kerentangan dan kerawangan pangan, belum berkembangnya upaya keanekaragaman atau diversifikasi pangan lokal, dan penggunaan teknologi pangan yang belum memadai.

Adapun gambaran jumlah kegiatan yang dilaksanakan dan alokasi anggaran masing-masing bidang setelah dilakukannya restrukturisasi organisasi menjadi Dinas Pertanian dan Pangan seperti tabel berikut.

Tabel 1.2
**Jumlah Kegiatan dan Alokasi Anggaran Per Bidang
 Tahun Anggaran 2017 – 2018**

No.	Bidang	Tahun 2017		Tahun 2018	
		Jumlah Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Jumlah Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)
1.	Pertanian	30	10.688.790.000	39	10.721.114.600
2.	Perkebunan	5	1.368.790.000	7	2.406.420.000
3.	Peternakan	13	3.482.770.000	8	3.475.250.000
4.	Pangan	3	1.249.000.000	7	2.157.200.000

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo, Tahun 2019.

Berdasarkan Tabel 1.2, menunjukkan bahwa jumlah kegiatan dan alokasi anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo hingga akhir tahun 2018, lebih banyak pada pengembangan sektor pertanian, sementara untuk bidang pangan yang menangani secara langsung ketahanan pangan masih mendapat alokasi anggaran yang lebih kecil dibandingkan bidang-bidang lainnya.

Data di atas, menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan dalam perencanaan dan penganggaran untuk sektor ketahanan pangan. Ketahanan pangan dipahami sebagai alur mekanisme ekonomi, yang dimulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Pemahaman akan ketahanan pangan hanya sebatas pada hal-hal yang tampak dan dapat diukur yakni produktivitas dari beberapa komoditi tanaman pangan yang dikembangkan di Kabupaten Yalimo. Menurut Sunarminto (2015), yang berpendapat bahwa ketahanan pangan haruslah dipahami sebagai suatu sistem yang menyangkut ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi pangan yang direfleksikan dalam pasokan pangan, akses masyarakat terhadap pangan, serta pemanfaatan atas produk pangan. Ketersediaan pangan dinyatakan dengan segala usaha untuk produksi pangan, distribusi diimplementasikan dengan terciptanya sistem aliran pemasaran, dan konsumsi ditempuh dengan kebijakan-kebijakan tentang kaidah yang menyangkut nilai gizi dan keamanan pangan.

Pembangunan khususnya sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo pada kenyataannya telah dilaksanakan sebelum perubahan nomenklatur menjadi Dinas Pertanian dan Pangan. Kondisi ini ditunjukkan

oleh kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang ketahanan pangan, namun dilaksanakan oleh bidang pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas tanaman pangan. Adapun sarana dan prasarana penunjang ketahanan pangan yang tersedia seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Penunjang Ketahanan Pangan
Tahun Anggaran 2012 – 2016

No.	Uraian	Tahun	Jumlah
1.	Pembangunan BPPK di Welarek	2012	1 Unit
2.	Pembangunan Gudang Penampungan Hasil Pertanian	2012	3 Unit
3.	Pembangunan Jaringan Irigasi	2013	5 Unit
4.	Pengadaan RMU dan Pedal Thresher	2013	5 Unit
5.	Pembangunan Gudang Pangan dan Lantai Jemur	2013	1 Unit
6.	Pembangunan BPPK di 3 Distrik	2013	3 Unit
7.	Pengadaan RMU dan Pedal Thresher	2014	2 Unit
8.	Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur	2014	4 Unit
9.	Pembangunan BPPK di Benawa	2014	1 Unit
10.	Pembangunan Gudang Cadangan Pangan	2015	1 Unit
11.	Pembangunan Sarana Penunjang BPPK	2015	5 Unit
12.	Pembangunan Lumbung Pangan	2016	9 Unit
13.	Pembangunan Jaringan Irigasi	2016	8 Unit
14.	Pembangunan BPPK di Poik	2016	1 Unit

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo, Tahun 2019.

Berdasarkan Tabel 1.3, menunjukkan bahwa sarana dan prasarana penunjang ketahanan pangan sudah tersedia di Kabupaten Yalimo. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan (BPPK) telah terbangun sebanyak 6 (enam) unit beserta sarana pendukungnya dalam upaya menunjang kegiatan penyuluhan pertanian. Lumbung pangan yang dilengkapi lantai jemur beserta peralatan *Rice Milling Unit* (RMU) untuk mengolah gabah menjadi beras juga telah tersedia. Sarana pengairan bagi lahan-lahan pertanian juga telah tersedia berupa jaringan irigasi air permukaan sebanyak 13 (tiga belas) unit dan tersebar pada kelompok-kelompok tani yang mengusahakan komoditi

tanaman pangan. Sementara kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan produktivitas beberapa komoditi tanaman pangan selama 3 (tiga) tahun terakhir seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 1.4
Kegiatan Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan
Tahun 2016 – 2018

No.	Uraian	Tahun	Jumlah
1.	Optimasi Lahan Padi Sawah dan Padi Ladang	2016	25 Ha
2.	Pengembangan Lahan Jagung	2016	25 Ha
3.	Pengembangan Lahan Kacang Tanah	2016	25 Ha
4.	Optimasi Lahan Ubi Jalar	2016	80 Ha
5.	Optimasi Lahan Keladi	2016	40 Ha
6.	Optimasi Lahan Ubi Kayu	2016	30 Ha
7.	Optimasi Lahan Padi Sawah dan Padi Ladang	2017	25 Ha
8.	Pengembangan Lahan Kacang Tanah	2017	30 Ha
9.	Pengembangan Lahan Jagung	2017	20 Ha
10.	Optimasi Lahan Ubi Jalar	2017	50 Ha
11.	Optimasi Lahan Keladi	2017	35 Ha
12.	Optimasi Lahan Ubi Kayu	2017	30 Ha
13.	Pengembangan Lahan Sagu	2018	10 Ha
14.	Optimasi Lahan Padi Sawah dan Padi Ladang	2018	25 Ha
15.	Optimasi Lahan Ubi Jalar	2018	80 Ha
16.	Optimasi Lahan Keladi	2018	35 Ha
17.	Optimasi Lahan Ubi Kayu	2018	30 Ha
18.	Pengembangan Lahan Kacang Tanah	2018	20 Ha
19.	Pengembangan Lahan Jagung	2018	20 Ha

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo, Tahun 2019.

Berdasarkan Tabel 1.4, menunjukkan kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan dalam menunjang ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo selama 3 (tiga) tahun terakhir lebih banyak ditujukan untuk mengoptimalkan lahan-lahan yang telah dibuka pada tahun-tahun sebelumnya agar tetap berproduksi. Pengembangan lebih diarahkan pada beberapa komoditi tertentu seperti kacang tanah dan jagung selain komoditas lainnya seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo berupaya tetap mempertahankan produksi dan produktivitas beberapa komoditi

tanaman pangan dalam upaya menjaga ketersediaan pangan khususnya ubi jalar, keladi (talas), dan ubi kayu yang merupakan makanan pokok penduduk di Kabupaten Yalimo.

Adapun data produksi dan produktivitas beberapa komoditi tanaman pangan seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 1.5
Produksi dan Produktivitas
Beberapa Komoditas Tanaman Pangan
Tahun 2016-2017

No.	Jenis Komoditi	Tahun 2016		Tahun 2017	
		Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1.	Padi	14,70	0,98	19,20	1,05
2.	Ubi Jalar	2290,0	2,13	2510,0	2,17
3.	Keladi	820,0	2,00	708,0	2,06
4.	Ubi Kayu	775,0	3,48	965,0	3,75
5.	Jagung	243,0	2,36	320,0	2,49
6.	Kacang Tanah	114	1,95	195,0	2,05

Sumber : Bappeda Kabupaten Yalimo, Tahun 2019.

Berdasarkan Tabel 1.5, terlihat bahwa produksi dan produktivitas dari beberapa komoditi tanaman pangan yang dikembangkan di Kabupaten Yalimo belum memberikan hasil yang memuaskan, dimana untuk komoditi padi sebagai penghasil beras tidak mengalami perkembangan secara signifikan. Produktivitas (ton/ha) dari tanaman pangan belum menunjukkan angka produksi yang optimal. Komoditi tanaman pangan seperti ubi jalar dan ubi kayu menunjukkan kenaikan produksi, dimana komoditi ini lebih banyak dibudidayakan karena selain sebagai makanan pokok juga dijadikan pakan ternak khususnya ternak babi oleh masyarakat di Kabupaten Yalimo.

Fenomena seperti yang telah dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam kaitannya dengan pembangunan sektor ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan

Kabupaten Yalimo. Permasalahan-permasalahan tersebut jika dilakukan identifikasi, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Dinas Pertanian dan Pangan belum memuat secara jelas arah pembangunan sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo.
2. Sektor ketahanan pangan hanya dipahami sebatas pada hal-hal yang tampak dan dapat diukur yaitu produktivitas dari tanaman pangan yang dikembangkan di Kabupaten Yalimo.
3. Terjadinya kesenjangan dalam pembagian alokasi anggaran, dimana bidang pangan yang menangani ketahanan pangan mendapat alokasi anggaran yang lebih kecil dibandingkan bidang-bidang lainnya.
4. Berbagai sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan ketahanan pangan kenyataannya telah tersedia sebelum pembentukan bidang pangan yang menangani permasalahan pangan.
5. Beberapa komoditi tanaman pangan yang merupakan makanan lokal masyarakat Kabupaten Yalimo belum menunjukkan angka produksi dan produktivitas yang memuaskan.
6. Beberapa komoditi tanaman pangan juga diperuntukkan bagi pakan ternak dimana hal ini tentunya akan menimbulkan permasalahan kaitannya dengan ketersediaan pangan lokal, jika produksi dan produktivitasnya menurun.

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam menunjang perekonomian khususnya di Kabupaten Yalimo, dimana pada akhirnya harus dilaksanakan secara keseluruhan dan berkelanjutan.

Pengembangan pertanian dalam upaya mendukung ketahanan pangan merupakan opsi yang paling tepat. Pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Yalimo di bidang pertanian menjadi modal awal untuk membangun kemandirian dalam penyediaan pangan. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo yang berfungsi sebagai fasilitator dituntut untuk dapat memberdayakan petani beserta kelembagaannya sebagai kekuatan dasar dalam meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Konsep pemberdayaan petani ini juga sejalan dengan konsep ketahanan pangan, dimana fokus ketahanan pangan adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan khususnya pada tingkat rumah tangga.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan kajian kaitannya dengan efektivitas Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo dalam melaksanakan pembangunan dengan fokus pada pembangunan khususnya sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo.

B. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan seperti yang telah diuraikan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah efektivitas Dinas Pertanian dan Pangan dalam pembangunan sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo ?
2. Apa saja penghambat efektivitas Dinas Pertanian dan Pangan dalam pembangunan sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis efektivitas Dinas Pertanian dan Pangan dalam pembangunan sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo.
2. Untuk mengidentifikasi apa saja penghambat efektivitas Dinas Pertanian dan Pangan dalam pembangunan sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan efektivitas organisasi dalam melaksanakan pembangunan.
 - b. Sebagai bahan referensi atau perbandingan bagi penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat memberikan landasan untuk penelitian serta dijadikan pedoman dalam merumuskan berbagai kebijakan kaitannya dengan efektivitas organisasi dalam melaksanakan pembangunan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai rekomendasi pemikiran bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo khususnya dan Pemerintah Kabupaten Yalimo pada umumnya dalam rangka

meningkatkan efektivitas organisasi dalam melaksanakan program pembangunan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Organisasi

Organisasi berasal dari Bahasa Yunani “*organon*”, yang berarti alat (*tool*). Menurut Kusdi (2017:4) bahwa “kata *organon* ini masuk bahasa latin, menjadi *organiztion* dan kemudian ke Bahasa Prancis (abad ke-14) menjadi *organisation*”. Pengertian organisasi ini pada awalnya tidak merujuk pada benda atau proses, melainkan pada tubuh manusia atau makhluk biologis lainnya. *Organon* terdiri atas bagian-bagian yang tersusun dan terkoordinasi hingga mampu menjalankan fungsi tertentu secara dinamis. Organisasi merupakan kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dimana terdapat batasan-batasan yang relatif dapat diidentifikasi dan bekerja atas dasar yang relatif secara terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan (Robbins, 2015).

Menurut Louis A. Allen seperti yang dikutip oleh Hasibuan (2016:24), mengemukakan bahwa :

“We can define organization as the process of identifying and the grouping the work to be performed, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives. (Kita dapat mendefinisikan organisasi sebagai proses penentuan dan pengelompokan pekerjaan yang akan dikerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan).”

E. Wight Bakke (dalam Dunsire, 1973:112) seperti yang dikutip oleh Kusdi (2017:5), secara panjang lebar mengemukakan definisi organisasi sebagai berikut :

“A continuing system of differentiated and coordinated human activities utilizing, transforming and welding together a specific set human, material, capital, ideational and natural resources into a unique problem-solving whole engaged in satisfying particular human needs in interaction with other systems of human activities and resources in its environment. (Organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiferensiasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyatupadukan seperangkat khusus manusia, material, modal, gagasan, dan sumber daya alam menjadi suatu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan tertentu manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lain dari aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungan).”

Secara sederhana Robbins (2015), mengemukakan bahwa organisasi merupakan entitas sosial yang secara sadar terkoordinasi dengan batas yang relatif dapat didefinisikan dan berfungsi secara berkesinambungan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau seperangkat tujuan bersama. Organisasi menawarkan perhatian cara-cara bagaimana suatu organisasi dirancang untuk mencapai pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi itu dibentuk dalam rangka mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan. Tujuan atau beberapa tujuan tersebut tidak dapat dicapai oleh individu-individu yang bekerja sendiri dan dapat dicapai secara efisien melalui berbagai usaha yang dilakukan secara berkelompok. Organisasi merupakan wadah yang digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama.

2. Konsep Efektivitas Organisasi

Konsep efektivitas yang dikemukakan oleh para ahli memiliki makna yang berbeda-beda ditinjau baik dari segi organisasi maupun manajemen. Efektivitas itu sendiri berasal dari kata dasar efektif yang dalam bahasa Inggris ditulis “*effective*” yang dapat diartikan berhasil atau apa yang dilakukan dilaksanakan dengan baik. Efektivitas itu sendiri merupakan unsur pokok yang menggambarkan tujuan serta sasaran yang telah ditentukan oleh suatu organisasi dapat dicapai dengan baik. Menurut Siagian (2001:24), “penekanan arti efektivitas lebih pada suatu hasil yang hendak dicapai, sedangkan efisiensi itu sendiri lebih menggambarkan pada cara yang harus ditempuh untuk mencapai hasil dengan membuat perbandingan antara input dan output”. Sementara Steers (2005:87), mengemukakan bahwa :

“Efektivitas adalah lingkup usaha dari suatu program sebagai suatu sistem menggunakan sumber daya dan sarana tertentu dalam rangka memenuhi tujuan dan sasarnya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberikan tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.”

Sedangkan Anoraga dan Widiyanti (2000:178), berpendapat bahwa “efektivitas sangatlah berhubungan dengan tercapainya tujuan yang lebih dikaitkan dengan adanya hasil kerja.”

Berdasarkan pendapat ahli diatas, dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang dapat diartikan seberapa besar target baik kuantitas maupun kualitas yang dicapai dalam waktu tertentu berdasarkan target yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengukuran efektivitas pada suatu organisasi bukanlah merupakan suatu hal sederhana, karena kajian tentang efektivitas haruslah didasarkan pada sudut pandang dan siapa yang melakukan penilaian serta bagaimana menginterpretasikannya. Seorang manajer produksi misalnya, akan mengukur efektivitas berdasarkan produktivitas dari output baik barang maupun jasa yang dihasilkan. Pada sisi lainnya, tingkat efektivitas diukur melalui perbandingan antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil secara nyata yang dapat diwujudkan. Sebaliknya, jika pekerjaan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan maka akan berdampak pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tidak tercapai, maka dapat dikatakan tidak efektif.

Menurut Indrawijaya (2002:226), yang menyatakan bahwa :

“... akhir-akhir ini berkembang suatu teori atau pandangan yang lebih komprehensif, dalam arti membahas persoalan efektivitas dari organisasi berdasarkan berbagai macam ukuran. Pandangan ini berpendapat bahwa susunan organisasi memang merupakan suatu hal yang penting, tetapi dalam susunan tersebut perlu diberikan kebebasan bertindak. Adanya kebebasan bertindak ini sangat penting untuk memungkinkan para anggota dan organisasi secara keseluruhan dapat lebih menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan. Pengertian efektivitas sedikit mengalami pergeseran, yaitu selain berkaitan dengan aspek intern organisasi, juga berhubungan dengan aspek luar organisasi yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan keadaan sekeliling. Aspek intern organisasi maupun perubahan tersebut haruslah berkaitan dengan dinamika hubungan antar personal dalam suatu sistem secara keseluruhan”.

Sementara Purwanto dan Elu (2017:7.3-7.4), menyatakan bahwa :

“Pengukuran keefektifan yang dilakukan pada suatu organisasi merupakan pengendalian organisasi. Pengukurannya bukan hanya berguna bagi penilaian atas prestasi yang diperoleh organisasi pada masa yang lalu, namun yang lebih penting adalah penggunaan hasil-hasilnya untuk memperbaharui strategi secara berkelanjutan. Pengembangannya dapat dilakukan terhadap implementasi strategi. Pengukuran keefektifan merupakan bagian integral dari siklus strategi

organisasi, yaitu merupakan bagian integral dari pengendalian strategi organisasi. Sejumlah pertanyaan biasanya diajukan sehubungan dengan pengukuran efektivitas organisasi, yakni : apakah organisasi berada pada arah yang diinginkan, apakah organisasi berkembang pada arah perubahan yang diinginkan, apa saja dan berapa besar hasil-hasil dari implementasi strategi organisasi dalam suatu jangka waktu tertentu”.

Berdasarkan pendapat ahli diatas, dapat dikatakan bahwa pengukuran efektivitas dari suatu organisasi bukan hanya dipengaruhi oleh aspek yang berasal dari intern organisasi. Pengukuran efektivitas merupakan bagian penting siklus dari pengendalian strategi suatu organisasi.

Kenyataannya sangatlah sulit melihat atau mempersamakan efektivitas dari suatu organisasi dengan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Hal ini disebabkan selain karena selalu ada penyesuaian dalam target yang akan dicapai, juga dalam proses pencapaiannya sering sekali ada tekanan dari keadaan sekeliling. Kenyataan tersebut selanjutnya menyebabkan bahwa jarang sekali target dapat tercapai secara keseluruhan (Indrawijaya, 2002). Sementara Purwanto dan Elu (2017), menyatakan bahwa pengukuran efektivitas untuk suatu organisasi berguna juga bagi manajemen atau pengelola dalam memajukan akuntabilitasnya dalam kerangka *good governance*. Semuanya pada akhirnya dapat dikaitkan dengan pengembangan kapabilitas organisasi dalam rangka memenuhi peran-peran, tugas-tugas, dan fungsi pokoknya secara unggul bagi kepentingan *stakeholders*.

Adapun pendekatan yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat efektivitas dari suatu organisasi seperti yang dikemukakan oleh Lubis dan Huseini (2009:55) yaitu :

1. Pendekatan sumber (*resources approach*), yakni dengan mengukur efektivitas dari suatu input. Pendekatan ini lebih mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi;
2. Pendekatan proses (*process approach*), dipergunakan untuk melihat sejauh mana efektivitas dari pelaksanaan program pada semua kegiatan dari proses internal atau mekanisme organisasi; dan
3. Pendekatan sasaran (*goals approach*), dimana yang menjadi pusat perhatian pada pengukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pendapat lainnya juga dikemukakan oleh Steers dalam Indrawijaya (2002: 228), dimana model untuk menilai efektivitas organisasi mencakup

3 (tiga) sudut pandang yaitu :

- i. Optimasi tujuan yang akan dicapai, yaitu bila beberapa bagian dari tujuan itu mendapat perhatian dan alokasi sumber daya dan dana yang lebih besar;
- ii. Berkaitan dengan interaksi antara organisasi dengan keadaan sekeliling; dan
- iii. Penekanan pada aspek perilaku yang lebih memusatkan perhatian pada pentingnya peranan perilaku manusia dalam proses pencapaian tujuan organisasi dan dalam efektivitas suatu organisasi.

Dari segi ilmu administrasi dan kebijakan publik, pakarnya dari Universitas Indonesia, Azhar Kasim (1989:85) seperti yang dikemukakan oleh Liestyodono (2004) bahwa "organisasi merupakan unsur utama dalam administrasi negara karena menyangkut kerjasama antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan-tujuan publik seperti pembangunan dan pelayanan masyarakat." Sejalan dengan perkembangan pemikiran dalam ilmu administrasi tersebut, maka muncul tiga pendekatan utama dalam analisis organisasi (Lubis dan Huseini, 2009), yaitu : (1) Pendekatan klasik, yang menekankan analisis kepada prosedur dan tata kerja organisasi untuk mencapai tujuan;

(2) Pendekatan neo klasik, yang menekankan analisis kepada hubungan manusia (*human relation*) dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan; (3) Pendekatan modern, yang lebih menekankan analisis komprehensif dengan memandang organisasi sebagai satu kesatuan sistem yang bersifat terbuka dan memiliki saling ketergantungan (*contingency*) antar unsur-unsur dari dalam organisasi dengan lingkungannya.

Dalam pendekatan modern tersebut, salah satu konsep inti untuk menjelaskan tujuan dari organisasi adalah efektivitas. Menurut Goodman dan Pennings (Azhar Kasim, 1989:8) seperti yang dikemukakan oleh Liestyodono (2004), bahwa konstruk efektivitas merupakan unit analisis yang sebagian besar digunakan oleh para peneliti untuk menelaah mengenai seluk beluk organisasi. Untuk mempelajari secara cermat efektivitas dari suatu organisasi baik organisasi publik ataupun swasta, maka peneliti paling tidak memiliki satu model teori organisasi tertentu sebagai acuan.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Azhar Kasim (1989:4-85) seperti yang dikemukakan oleh Liestyodono (2004), dimana beberapa model teori organisasi sebagai acuan untuk mengukur efektivitas organisasi sebagai berikut :

1. Model tujuan rasional, dimana model ini menganggap bahwa organisasi adalah suatu alat untuk mencapai tujuan secara rasional. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan aturan-aturan, prosedur, dan birokrasi dengan memperhatikan keahlian (*expertise*) setiap orang untuk menjalankan tugas masing-masing sesuai tata kerja, lingkup wewenang dan tanggung jawab baik fungsional maupun struktural. Dalam model rasional tersebut, tujuan ditentukan oleh pemilik organisasi dimana untuk sektor publik misalnya birokrasi (organisasi) pemerintahan yang menjadi pemiliknya adalah publik (masyarakat).
2. Model hubungan manusia, keberhasilan dalam mencapai tujuan tidak dilihat pada tata kerja atau birokrasi yang rasional melainkan

kepada segi-segi yang melatari hubungan manusia dalam organisasi tersebut seperti : kebutuhan, dorongan, keinginan, harapan, kepuasan, serta aneka faktor sosial psikologis yang menjadi kekuatan ataupun kendala bagi terjalannya hubungan manusia dalam mencapai tujuan organisasi. Model hubungan manusia ini melahirkan paradigma baru dalam upaya peningkatan mutu pelayanan organisasi yaitu pengembangan sumber daya manusia baik yang bersifat melekat dalam proses pengorganisasian dan manajemen sebagai fungsi pengaturan personil (*staffing*) maupun penataan dan pengembangan staf yang berbentuk pelatihan (*training*).

3. Model sistem terbuka, yang menganggap bahwa suatu organisasi baik swasta maupun publik tidak bisa bebas dari lingkungan. Suatu organisasi dikatakan efektif apabila memiliki fleksibilitas, adaptasi, dan kesiagaan yang tinggi menghadapi tekstur lingkungan yang terus menerus berubah. Perubahan pesat yang terjadi di lingkungan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi turut mengubah kebutuhan, pola dan gaya hidup, selera, harapan, dan aspirasi masyarakat (publik) yang pada gilirannya turut mempengaruhi dan mengubah tuntutan terhadap mutu pelayanan dari suatu organisasi publik. Sebagai sistem terbuka, suatu organisasi publik dengan sendirinya akan menghadapi problematika dalam hubungan struktur, penataan, dan manajemen struktur.
4. Model proses internal, dimana dalam model ini menganggap bahwa di dalam organisasi ada 2 (dua) faktor dominan yang amat menentukan pencapaian tujuan, yaitu informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, model proses internal menempatkan pengelolaan informasi, komunikasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas merupakan kegiatan sentral dalam organisasi untuk mencapai tujuannya.

Lebih lanjut Azhar Kasim (1989:46) seperti yang diungkapkan oleh Liestyodono (2004), model tujuan rasional dan model sistem terbuka yang menekankan fokus ada eksternal organisasi yang setara dengan perangkat keras organisasi yaitu sistem, strategi, dan struktur. Sedangkan model proses internal dan model hubungan manusia yang menekankan pada fokus internal organisasi setara dengan aspek-aspek perangkat lunak organisasi, seperti gaya kepemimpinan, kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia, serta nilai-nilai yang dimiliki.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa berbagai konsep efektivitas organisasi merupakan sebuah konstruk yang bersifat multidimensional, dimana pengertian efektivitas itu sendiri sangatlah tergantung pada pandangan tertentu yang dipergunakan dalam merumuskannya. Konsep efektivitas itu sendiri mengandung 3 (tiga) komponen yang saling berkaitan yakni : (1) tujuan atau sasaran, (2) sistem yang merupakan perangkat keras organisasi, dan (3) tingkah laku yang merupakan perangkat lunak organisasi.

Pembahasan mengenai efektivitas dalam penelitian ini sangatlah berhubungan dengan efektivitas dari organisasi publik, sehingga digunakan teori pendekatan pencapaian tujuan. Menurut Robbins (2015), pendekatan pencapaian tujuan mengasumsikan bahwa suatu organisasi merupakan suatu kesatuan yang dibuat dengan sengaja, rasional dan mencari tujuan. Pencapaian tujuan yang berhasil akan menjadi ukuran yang tepat tentang keefektifan. Pencapaian tujuan dapat digunakan sebagai ukuran yang sah dalam mengukur keefektifan organisasi. Adapun asumsi-asumsi lain yang juga harus sah dalam mengukur keefektifan organisasi (Robbins, 2015:59), yakni :

“Pertama, organisasi harus mempunyai tujuan-tujuan akhir. Kedua, tujuan-tujuan tersebut harus diidentifikasi dan ditetapkan dengan baik agar dapat dimengerti. Ketiga, tujuan-tujuan tersebut harus sedikit saja agar mudah dikelola. Keempat, harus ada konsensus atau kesepakatan umum mengenai tujuan-tujuan tersebut, Akhirnya, kemajuan ke arah tujuan tersebut harus dapat diukur.”

Sementara Steers (2005:208), mengemukakan bahwa :

“Penggunaan ancangan optimalisasi tujuan terhadap efektivitas organisasi memungkinkan diakuinya secara eksplisit bahwa organisasi yang berbeda mengejar tujuan yang berbeda pula. Ancangan

optimalisasi tujuan mengakui kenyataan bahwa sebagian besar organisasi tidak dapat memaksimalkan tujuan tertentu sekalipun mereka menghendakinya. Optimisasi tujuan merupakan sarana pengimbang berbagai tujuan yang bertentangan, sehingga setiap tujuan menerima cukup perhatian dan sumber-daya selaras dengan tingkat kepentingannya bagi organisasi. Efektivitas haruslah dinilai terhadap tujuan yang dapat dilaksanakan, dan bukan terhadap konsep tujuan yang maksimum.”

Pendapat di atas mengasumsikan bahwa setiap organisasi tentunya mempunyai tujuan-tujuan akhir, dimana tujuan-tujuan akhir tersebut merupakan suatu sistem yang sifatnya terbuka dimana unsur-unsurnya memiliki saling ketergantungan sehingga memungkinkan terjadinya dinamika, adaptasi, perubahan dan perkembangan dalam organisasi itu sendiri dalam mencapai tujuan bersama.

Model teori organisasi yang digunakan dalam pengukuran efektivitas organisasi dalam penelitian ini adalah model tujuan rasional yang dikemukakan oleh Azhar Kasim (1989) dalam Liestyodono (2004), dimana tujuan yang bersifat rasional lebih memberikan penekanan pada rasionalitas dalam pencapaian suatu tujuan. Adapun indikator yang digunakan untuk menganalisis efektivitas organisasi dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Perumusan Tujuan

Menurut Rollinson (2002) seperti yang dikutip oleh Purwanto dan Elu (2017:7.5), salah satu faktor penting dalam mengukur efektivitas adalah tujuan-tujuan yang menjadi landasan pembentukan organisasi. Tujuan-tujuan dapat mencakup tujuan formal dan/atau tujuan operasional, dimana fokus dari pendekatan ini adalah keluaran-keluaran organisasi. Bagi organisasi bisnis, tujuan akhir adalah laba. Sementara

bagi organisasi nirlaba, tujuan yang hendak dicapai adalah manfaat atau sejumlah manfaat sosial-kemasyarakatan.

Sementara Wibowo (2016:45-47), mengemukakan bahwa :

“Tujuan merupakan apa yang diharapkan untuk dicapai oleh suatu organisasi, fungsi, departemen dan individu dalam suatu periode tertentu. Tujuan dapat dinyatakan sebagai target, yang merupakan hasil yang diharapkan dapat dicapai secara kuantitatif dan dapat diukur. Secara logis penetapan tujuan adalah proses dari atas ke bawah yang dimulai dari strategi organisasi. Kekuatan nyata dari tujuan adalah pada keselarasannya dengan maksud tertinggi organisasi. Setiap pekerja harus memahami tujuannya, bagaimana melakukan aktivitas membantu tujuan unit kerja, dan bagaimana aktivitas unit kerja memberikan kontribusi pada sasaran strategis organisasi. Tujuan dinegosiasikan dengan pekerja, menyangkut saling memberi dan menerima, dan manajer memahami orang yang bekerja untuk mereka dan dengan mereka.”

Berkaitan dengan formulasi tujuan, Sjafrizal (2014:41), mengemukakan bahwa :

“... tujuan pada dasarnya adalah merupakan gambaran (deskripsi) tentang sasaran akhir yang ingin diwujudkan. Sasaran tersebut merupakan penjabaran yang lebih konkrit tentang tujuan yang hendak dicapai. Formulasi tujuan sangat perlu dilakukan secara hati-hati agar pencapaiannya menjadi lebih tajam sesuai dengan yang telah ditetapkan semula.”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, disimpulkan bahwa tujuan merupakan landasan dalam mengukur efektivitas, dimana berdasarkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan akan dihasilkan keluaran (*output*) yang didasarkan pada sasaran yang ingin diwujudkan.

Setelah tujuan ditetapkan, maka selanjutnya adalah tujuan tersebut dirumuskan secara rinci dan jelas batas-batasnya. Perumusan tujuan tersebut dalam prakteknya dijabarkan dalam tugas pokok. Syamsi (2000:15), mengemukakan bahwa perumusan tujuan adalah :

1. Sebagai pedoman bagi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan nantinya.
2. Sebagai sumber legitimasi dalam membenarkan segala kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Sebagai standar pelaksanaan, dimana segala kegiatan harus berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Sebagai sumber motivasi bagi karyawan/pegawai untuk bekerja lebih produktif.
5. Sebagai dasar rasional bagi kehidupan berorganisasi.

Lebih lanjut, Syamsi juga mengungkapkan bahwa kendala-kendala dalam mencapai tujuan antara lain adalah :

1. Dalam organisasi yang kurang stabil, kadang-kadang tujuan dapat berubah. Hal ini mungkin disebabkan oleh pengaruh lingkungan, biaya-biaya yang berubah, adanya penemuan baru, dan lain-lainnya.
2. Pimpinan hanya memusatkan pada satu bagian saja dari tujuan sehingga bagian lain dari tujuan tadi terabaikan.
3. Kurang adanya kerjasama yang baik, menyebabkan kegiatan kurang selaras mengarah pada tujuan bersama. Kegiatan menjadi terkotak-kotak karena bagian hanya memikirkan bagiannya semata-mata.

Sementara Rollinson (2002) dalam Purwanto dan Elu (2017:7.5-7.6), mengemukakan keuntungan dari metode pencapaian tujuan yang dilakukan melalui perumusan tujuan yang jelas, yakni : (1) Mudah dipahami; (2) Organisasi memiliki tujuan dan sudah seharusnya mengejar tujuan tersebut; (3) Digunakan oleh kebanyakan organisasi; serta (4) Cocok untuk metode evaluasi keefektifan lainnya yang diterapkan pada tingkatan yang lebih rendah dalam organisasi.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan agar tujuan dapat dicapai dengan efektif (Syamsi, 2000:15-16), sebagai berikut : (1) Individu-individu yang nantinya harus bertanggung jawab atas tercapainya tujuan hendaknya dilibatkan dalam perumusan tujuan, karena merekalah yang lebih mengetahuinya; (2) Dalam merumuskan tujuan ada pembagian

tugas: pucuk pimpinan merumuskan tujuan umum, kemudian pimpinan tingkat menengah menjabarkan dan merumuskan tujuan sesuai dengan bidang unit yang dipimpinnya, sedangkan pimpinan tingkat bawah (kalau diperlukan atau diikutsertakan) menjabarkan lebih lanjut.; (3) Tujuan bidang atau fungsional tidak boleh bertentangan dengan tujuan umum; (4) Tujuan harus serealistis mungkin, dalam arti harus disesuaikan dengan keadaan lingkungan ekstern dan kondisi intern organisasinya; (5) Tujuan harus jelas batas-batas yang hendak dicapainya; serta (6) Apabila tujuan organisasi ternyata tidak dapat dicapai sepenuhnya, maka pimpinan harus meneliti apa yang menjadi penyebab tidak tercapainya sehingga kemudian dilakukan tindakan perbaikan.

Sedangkan Manullang (2008:53), mengemukakan bahwa:

“Tujuan yang sudah ditentukan, tidak boleh hanya tujuan dalam kertas rencana saja, akan tetapi sebagaimana sudah dinyatakan ia harus sebagai pedoman atau standar bagi mereka, baik yang melaksanakan atau bertindak menurut rencana maupun oleh mereka yang mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan dari rencana yang bersangkutan.”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perumusan tujuan menjadi landasan dalam pembuatan rencana, dimana tujuan yang telah ditetapkan harus dapat direalisasikan dengan menggunakan sumber daya yang ada di dalam organisasi. Perumusan tujuan harus dinyatakan secara jelas dan harus disesuaikan dengan kesanggupan dari masing-masing bagian dan unit yang ada di dalam organisasi tersebut.

b. Penjabaran Kegiatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kegiatan adalah aktivitas, usaha, pekerjaan atau kekuatan dan ketangkasan serta kegairaan. Permendagri 18 Tahun 2017 mendefinisikan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari berbagai macam program, dimana program itu sendiri didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan (Nugroho dan Wrihatnolo, 2011:167). Sementara Sjafrizal (2014:359), mengemukakan bahwa :

“Program pembangunan pada dasarnya adalah tindakan (*intervensi*) yang dilakukan oleh Pemerintah untuk dapat melaksanakan kebijakan yang telah diambil dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan adalah rincian program pembangunan untuk masing-masing aspek pelaksanaan program tertentu pada suatu lokasi.”

Pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan merupakan penjabaran dari program atau tidak lain adalah merupakan kumpulan dari berbagai kegiatan yang perlu dilaksanakan agar program pembangunan tersebut dapat tercapai.

Sjafrizal (2014), juga mengungkapkan bahwa dalam menetapkan kegiatan yang baik dan tepat guna sehingga dapat mendorong proses pembangunan daerah. Tahap pertama perlu ditetapkan terlebih dahulu secara tegas ruang lingkup dari kegiatan tersebut, meliputi : jenis kegiatan yang akan dilakukan, jenis input yang diperlukan, tujuan yang

ingin dicapai, umur serta kelayakan kegiatan yang akan dilaksanakan. Penetapan ruang lingkup ini penting artinya dalam penyusunan indikator dan target kinerja dan pelaksanaan kegiatan tersebut nantinya dilapangan, serta pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi.

Pemikiran dasar yang diharapkan adalah setiap kegiatan yang merupakan instrumen untuk menentukan sasaran yang diproyeksikan dengan memanfaatkan sumber daya dan sumber dana tertentu. Namun, banyak baik program maupun kegiatan hanya menjadi instrumen keuangan belaka meskipun kegiatan tersebut benar-benar menjadi instrumen perencanaan (Nugroho dan Wrihatnolo, 2011). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sjafrizal (2014:360), yang mengemukakan bahwa :

“Tidak dapat disangkal bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan memerlukan biaya yang cukup besar tergantung sifat dan kegiatan tersebut. Sementara kemampuan dan kapasitas dana pemerintah daerah juga sangat terbatas jumlahnya sehingga perlu dilakukan penetapan prioritas pembangunan yang sangat tajam terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Penentuan prioritas ini sangat penting artinya untuk dapat menjamin besarnya manfaat yang diharapkan akan diperoleh dari suatu proses pembangunan.”

Sjafrizal juga mengungkapkan 4 (empat) aspek dalam penentuan prioritas kegiatan yang harus diperhatikan, yaitu : (1) Kesesuaian kegiatan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra; (2) Seberapa jauh kegiatan tersebut dapat bersinergi atau dapat mendorong kegiatan lain yang terkait; (3) Tingkat kelayakan ekonomi dan finansial kegiatan/proyek bersangkutan yang ditentukan oleh besarnya manfaat dibandingkan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut; dan (4) Apakah kegiatan tersebut sesuai dengan

kondisi sosial dan budaya setempat, terutama menyangkut hal-hal yang bersifat sangat sensitif.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa penjabaran kegiatan menjadi penting artinya dalam melaksanakan pembangunan daerah. Kegiatan yang dilaksanakan akan memberikan manfaat apabila dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan dapat mendorong kegiatan-kegiatan lainnya yang saling terkait.

3. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja atau prestasi kerja yang diperoleh oleh baik organisasi, tim dan individu. Evaluasi akan memberikan umpan balik terhadap tujuan dan sasaran. Menurut Kreitner dan Kinicki (2001:303) dalam Wibowo (2016:226-227), yang mengemukakan bahwa :

“Sasaran evaluasi dapat dilihat dari segi pendekatannya, dimana pendekatan sikap memfokuskan pada orang dan pendekatan perilaku memfokuskan pada proses, pendekatan hasil memfokuskan pada produk atau hasil usaha. Dengan kata lain, apa yang telah diselesaikan dimana manajemen berdasarkan sasaran merupakan format yang umum untuk pendekatan hasil.”

Pendapat lainnya mengenai evaluasi juga dikemukakan oleh Sjafrizal (2014), dimana secara umum evaluasi bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh rencana yang telah disusun dan diterapkan oleh pejabat berwenang dapat dilaksanakan dalam praktiknya. Bilamana ternyata pelaksanaan rencana tersebut sesuai atau lebih tinggi dari sasaran dan target yang telah ditetapkan semula, maka pelaksanaan rencana tersebut tidak sesuai atau berada di bawah sasaran dan target yang ditetapkan maka pelaksanaan rencana berjalan dengan baik. Akan

tetapi, bilamana ternyata pelaksanaan rencana tersebut tidak sesuai atau berada di bawah sasaran dan target yang telah ditetapkan maka pelaksanaan rencana tersebut dikatakan tidak berhasil. Bahkan bilamana pelaksanaannya sangat jauh dari sasaran dan target, maka rencana tersebut dapat dikatakan gagal.

Evaluasi terhadap tujuan dan sasaran seperti yang dikemukakan oleh Wibowo (2016), dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai atau tidak. Apabila tujuan tidak tercapai, dicari faktor penyebabnya. Mungkin disebabkan kesalahan dalam merumuskan tujuan organisasi sehingga tidak dapat dijangkau oleh kinerja organisasi. Sementara evaluasi terhadap sasaran dilakukan untuk mengukur seberapa jauh sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan penilaian atas hasil yang dicapai, dimana selain untuk mengetahui hasil yang telah dicapai juga mencari penyebab atau kendalanya. Evaluasi akan memberikan umpan balik bagi perumusan kembali tujuan dan sasaran organisasi di masa yang akan datang.

Jika dihubungkan dengan konsep efektivitas, Syamsi (2000:163) mengemukakan bahwa :

“... antara program yang satu mungkin sekali berbeda efektivitasnya dengan program yang lain. Hal ini antara lain tergantung kemampuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai hasil kegiatan yang dilakukan. Jika dihubungkan dengan efisiensi, maka program mencapai tujuan dapat terealisasi dengan berapa banyak pengorbanan yang diberikan.”

Evaluasi pelaksanaan rencana dan kebijakan dapat dilakukan secara parsial dilakukan dengan melihat pada keberhasilan pelaksanaan pada tingkat program dan kegiatan (proyek). Terdapat 3 (tiga) jenis evaluasi yang dapat dilakukan pada tingkat program dan kegiatan (Sjafrizal, 2014:285-289), yakni :

1. Teknis evaluasi indikator kinerja. Teknik ini menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan konsep evaluasi kinerja dengan 5 (lima) kriteria, yaitu : masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impacts*). Penilaian terhadap unsur masukan (*input*) terutama diarahkan pada tingkat penggunaan dan penyerapan dana yang telah dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan penilaian terhadap keluaran (*output*) diarahkan pada hasil langsung dari pelaksanaan program dan kegiatan baik fisik maupun non fisik. Hasil (*outcome*) ditekankan pada hasil yang dapat dinikmati oleh pengguna berdasarkan keluaran. Manfaat (*benefit*) adalah pada bentuk kegunaan dan dampak (*impacts*) adalah dalam bentuk pengaruh yang dapat dihasilkan dari adanya program dan kegiatan tersebut.
2. Analisis biaya dan manfaat. Pada dasarnya teknik ini lazim digunakan pada penilaian kelayakan proyek dengan menggunakan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis*). Adapun data dan informasi tentang biaya dan manfaat yang digunakan dalam analisis adalah data realisasi karena berbagai kegiatan telah selesai dilaksanakan. Adapun kendala dalam evaluasi ini adalah kegiatan-kegiatan yang berorientasi bagi kepentingan publik, perhitungan nilai manfaat yang diperoleh bersifat kualitatif dan abstrak karena menyangkut kepentingan sosial ekonomi masyarakat.
3. Kerangka logis. Pada kerangka logis ini evaluasi dilakukan secara lebih sederhana dengan menggunakan sebuah tabel (*matrik*). Pada matrik ini dijelaskan latar belakang pelaksanaan, tujuan, deskripsi kegiatan, sasaran dan tolak ukur keberhasilan, serta manfaat yang diharapkan. Metode ini memiliki banyak kelemahan dan kekeliruan karena sifatnya yang sangat sederhana dan lebih banyak bersifat kualitatif.

Selanjutnya 2 (dua) kategori evaluasi seperti yang dikemukakan Syamsi (2000), meliputi : kesesuaian (*appropriateness*) dan kecukupan (*adequency*). Kesesuaian ini dihubungkan dengan kebutuhan memenuhi

tujuan program dengan prioritas pilihan dan nilai-nilai yang tersedia. Kecukupan berhubungan dengan masalah melalui/oleh kegiatan yang diprogramkan. Dengan demikian, maka tolak ukur yang akan membantu dalam pengukuran dan penilaian pelaksanaan kegiatan mencapai tujuan dalam organisasi yakni : efektivitas, efisiensi, kesesuaian dan kecukupan. Sebaliknya sistem tindakan program (*program action system*), juga memusatkan perhatiannya pada hasil dan nilai-nilai yang dikehendak merupakan input dari lingkungan yang dibutuhkan oleh organisasi.

Pendapat para ahli di atas, secara jelas mengungkapkan bahwa keberhasilan pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah diprogramkan sangatlah ditentukan oleh evaluasi yang dilakukan. Evaluasi merupakan cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan mencapai tujuannya.

3. Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Organisasi

Berbagai macam pendapat yang mengemukakan faktor-faktor yang menjadi penghambat efektivitas organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya pendapat-pendapat tersebut sudah dapat dirangkum dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Steers, misalnya teori mengenai pembinaan organisasi yang menekankan adanya perubahan terencana dalam organisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi. Pendiagnosaan organisasi sebagai salah satu metode pembinaan organisasi menekankan pada hal-hal yang dianggap mempengaruhi ketidakstabilan atau ketidakberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Weisboard memberikan model untuk mendiagnosa organisasi

yang sering dikenal dengan model enam kotak Weisbord, yang terdiri dari : (1) Tujuan; (2) Struktur; (3) Sistem penghargaan; (4) Mekanisme tata kerja; (5) Tata Hubungan; dan (6) Kepemimpinan. Hal ini secara tidak langsung menyebutkan bahwa keberhasilan organisasi dipengaruhi oleh keenam unsur tersebut, sehingga dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya (Thoha, 2012). Sementara Hardjito (2010), mengemukakan bahwa keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya dipengaruhi oleh komponen-komponen organisasi yang meliputi : (1) Struktur; (2) Tujuan; (3) Manusia; (4) Hukum; (5) Prosedur pengoperasian yang berlaku (*Standard Operating Procedure*); (6) Teknologi; (7) Lingkungan; (8) Kompleksitas; (9) Spesialisasi; (10) Kewenangan; dan (11) Pembagian tugas.

Menurut Steers (2005:209-216), yang menyatakan bahwa “kerangka kerja yang dapat dipakai dalam mengidentifikasi empat variabel yang berhubungan dengan efektivitas, yakni ciri organisasi, ciri lingkungan, ciri pekerjaan, serta kebijakan dan praktek manajemen”. Adapun keempat variabel seperti yang dikemukakan Steers tersebut, dijelaskan sebagai berikut :

a. Ciri Organisasi

Struktur dan teknologi organisasi dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas, dengan berbagai cara. Mengenai struktur, ditemukan bahwa meningkatnya produktivitas dan efisiensi sering merupakan hasil dari meningkatnya spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan, dan formalisasi.

Walaupun produktivitas dan efisiensi cenderung mempunyai hubungan yang positif dengan berbagai variabel struktur ini tetapi sikap kerja (khususnya kepuasan kerja dan keikatan) cenderung mempunyai hubungan yang berbanding terbalik dengan produktivitas dan efisiensi.

Teknologi juga dapat berakibat atas tingkat efektivitas selanjutnya, walaupun mungkin tidak langsung. Bukti-bukti menunjukkan bahwa variasi teknologi berinteraksi dengan struktur dalam pengaruhnya terhadap keberhasilan organisasi. Jika hubungan struktur dan teknologi sudah harmonis, para pekerja akan sedikit saja menemui masalah dalam usaha mencapai tujuan.

b. Ciri Lingkungan

Lingkungan baik luar organisasi maupun dalam organisasi juga telah dinyatakan berpengaruh atas efektivitas. Keberhasilan hubungan antara organisasi dan lingkungan akan tergantung pada tingkat keterdugaan keadaan lingkungan, ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan, dan tingkat rasionalitas organisasi. Ketiga faktor ini mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi terhadap perubahan lingkungan. Model ini mempunyai implikasi yang jelas bagi praktek manajemen, yaitu keharusan memonitor perubahan lingkungan secara terus menerus dan menyesuaikan desain, teknologi, sasaran, dan perilaku organisasi dalam menanggapi perubahan-perubahan tersebut.

c. Ciri Pekerja

Pada kenyataannya para anggota organisasi mungkin merupakan faktor penting atas efektivitas karena perilaku merekalah yang dalam

jangka panjang akan memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan organisasi. Kesadaran akan sifat perbedaan pribadi yang terdapat di antara pekerja sangat penting artinya karena pekerja yang berbeda memberikan tanggapan dengan cara yang berbeda pula atas usaha-usaha manajemen untuk mencapai usaha yang diarahkan ke tujuan.

Sarana pokok untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan ini dari pekerja adalah mengintegrasikan tujuan pribadi dengan sasaran organisasi. Kunci menuju keberhasilan organisasi adalah diakuinya oleh para manajer hubungan tukar menukar antara organisasi dengan para anggotanya, dimana kedua belah pihak saling membantu sebagai imbalan atas pertolongan yang diberikan oleh pihak lainnya dalam mengejar sasaran masing-masing. Sifat hubungan tukar menukar ini bergantung pada usaha memahami mengapa orang bersedia bekerja dan pada hubungan antara usaha kerja mereka dengan efektivitas organisasi.

d. Kebijakan dan Praktek Manajemen

Identifikasi beberapa mekanisme sebagai alat khusus bagi para manajer meningkatkan efektivitas organisasi melalui penetapan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi dan inovasi organisasi.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas dari suatu organisasi tercapai jika dapat dikenali penyebab ketidakberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Secara umum dapat diidentifikasi empat variabel yang berhubungan dengan efektivitas

suatu organisasi, yakni ciri organisasi, ciri lingkungan, ciri pekerjaan/pegawai, serta kebijakan dan praktek manajemen.

4. Konsep Pembangunan

Pembangunan tidak lain merupakan suatu proses penting yang dilaksanakan pemerintah saat ini. Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beberapa pakar telah mendefinisikan arti pembangunan secara berbeda-beda sebagaimana yang ditulis dalam laman (<http://pengertian.com/pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli/>), sebagai berikut :

1. Menurut Mohammad Ali, "Pembangunan merupakan setiap upaya yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang memiliki tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas manusia."
2. Menurut Seers, "Pembangunan dapat dipastikan sebagai sebuah istilah teknis, yaitu seni dalam membangkitkan masyarakat di berbagai negara berkembang dari kemiskinan, tingkat melek huruf yang rendah, tingginya angka pengangguran, dan ketidakadilan dalam bidang sosial."
3. Menurut Inayatullah, "Pembangunan merupakan kegiatan perubahan menuju ke pola-pola masyarakat yang lebih baik dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat membuat sekelompok masyarakat memiliki kendali yang lebih besar terhadap kondisi lingkungan dan juga tujuan politiknya, serta membuat warganya menjadi lebih memiliki kontrol terhadap kehidupan diri sendiri."
4. Menurut Rogers dan Shoemaker, "Pembangunan adalah suatu jenis perubahan sosial yang mana terdapat berbagai ide baru yang diperkenalkan di sebuah sistem sosial yang bertujuan agar bisa menghasilkan pendapatan per kapita dan level kehidupan yang lebih baik dengan menggunakan metode produksi yang lebih canggih dan organisasi sosial yang lebih terarah."
5. Menurut Joko Untoro, "Pembangunan merupakan pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan di dalam struktur ekonomi dan pola kegiatan ekonomi ataupun upaya menaikkan pendapatan per kapita."

6. Menurut Benny H. Hoed, “Pembangunan dapat diartikan setiap upaya sistematis yang dilaksanakan untuk melepaskan diri dari ketertinggalan, dan upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.”
7. Menurut Sissaynake, “Pembangunan sebagai sebuah proses menuju perubahan sosial yang mengarah ke kualitas hidup yang lebih baik dari seluruh ataupun mayoritas masyarakat tanpa merusak lingkungan ataupun budaya/kultur lingkungan mereka dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini, serta membuat mereka menjadi penentu untuk tujuan mereka sendiri.”

Berdasarkan pendapat beberapa ahli seperti yang telah dikemukakan di atas, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya perubahan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dimana perubahan tersebut bertujuan memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak merusak lingkungan ataupun kultur/budaya lingkungan mereka serta menjadikan masyarakat sebagai penentu dari perubahan itu sendiri.

Menurut Abdoellah (2016:3), yang menyatakan bahwa “pembangunan sebagai upaya yang dilakukan dalam memajukan kehidupan khususnya kehidupan negara dan warganya melalui penciptaan berbagai sarana dan prasarana baru serta pengembangan sarana yang telah ada dalam rangka mencapai tujuan baru”. Sementara Muljarjadi (2011:1), menyatakan bahwa “pembangunan dilakukan dalam rangka pencapaian yang lebih baik pada masa mendatang, dalam pengertian bahwa pembangunan adalah proses ke arah kondisi yang lebih baik”. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Fakhri (2010:86), yang mengemukakan bahwa :

“Pembangunan (*development*), dalam penafsirannya mencakup konsep-konsep seperti penentuan nasib sendiri, kebutuhan dasar manusia, keberlangsungan (*sustainability*) dan pembangunan berdasar pertimbangan kesukuan (*ethnodevelopment*), mewakili kecenderungan-kecenderungan ke dalam ranah normatif-substantif. Pembangunan tidak lain adalah proses endogen, dimana masyarakat

akan mengikuti jalan pembangunan mereka sendiri yang terdapat dalam sejarah, ekologi dan kebudayaan mereka; suatu pandangan dasar yang sedikit banyak menyimpang dari teorisasi formal pada tingkat abstraksi yang tinggi.”

Sementara Mappadjantji (2005:25), yang mengemukakan bahwa :
“Pembangunan seyogyanya dilihat sebagai proses untuk meningkatkan kapasitas suatu tatanan (wilayah dan atau kelompok masyarakat) agar senantiasa mampu beradaptasi secara kreatif terhadap dinamika lingkungannya. Proses adaptasi-kreatif itu akan menjaga atau bahkan meningkatkan kualitas interkoneksi tatanan dengan lingkungannya. Hal ini berarti tatanan akan mampu mempertahankan keberlangsungan keberadaannya serta sekaligus tetap mampu berpartisipasi dalam proses pembaharuan semesta. Pesan filosofis yang terkandung pada pendekatan pembangunan ini adalah pembangunan seyogyanya tidak hanya difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat internal, tetapi senantiasa perlu dikaitkan dengan partisipasi untuk pembaharuan lingkungan eksternal.”

Pendapat lainnya seperti yang dikemukakan oleh Starkey dan Walford (2001), dikutip oleh Elliott (2006) yang mengemukakan bahwa :

“Pembangunan yang adil dan sepadan terhadap lingkungan merupakan prinsip penting. Alasannya, bagaimanapun aktivitas perekonomian, tidak mungkin mewujudkan di ruang kosong, di negara antah berantah yang tidak berpijak pada kondisi materialnya. Perekonomian tidak berjalan hanya karena adanya pihak-pihak yang beraktivitas, tetapi juga bertumpu pada sumber daya dan ruang yang keberadaannya lepas dari ada atau tidaknya manusia.”

Pendapat di atas, menunjukkan bahwa proses pembangunan yang dilakukan merupakan proses penciptaan sesuatu yang baru dan berkembang berdasarkan dinamika pertumbuhan ekonomi dalam suatu tatanan wilayah atau kelompok masyarakat. Pembangunan menuntut peran dari pemerintah yang tidak pada kegiatan-kegiatan internal semata, namun lebih pada lingkungan eksternal sebagai penggerak pembangunan.

Secara sederhana pembangunan dapat ditinjau dari sisi fisik dan non fisik. Makna pembangunan dari sisi fisik dilaksanakan dengan tujuan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan jumlah dan komposisi barang/jasa yang dihasilkan serta pendapatan masyarakat juga meningkat. Pembangunan fisik ditandai dengan adanya peningkatan pada jumlah fasilitas yang dibangun sebagai akibat adanya pendapatan. Sementara pembangunan non fisik memiliki makna sebagai perubahan fundamental atau adanya pola pikir (*state of mind*), meliputi perubahan perilaku dan kelembagaan yang ada di tengah masyarakat (Muljarjadi, 2011).

Lebih lanjut Muljarjadi (2011:3), juga menyatakan bahwa pembangunan itu sendiri yang dijalankan oleh suatu pemerintahan dalam rangka menghasilkan tiga tujuan pokok yaitu :

1. Terjadinya peningkatan yang terus menerus dalam ketersediaan dan perbaikan dari distribusi kebutuhan pokok masyarakat, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, perlindungan, dan lain-lain.
2. Pembangunan yang dilakukan harus memberikan perbaikan dalam tingkat kehidupan seluruh lapisan masyarakat, dengan cara menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi bagi masyarakat, penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan sebagainya.
3. Meningkatkan pilihan ekonomi dan sosial baik bagi masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa pembangunan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan komposisi dan jumlah barang/jasa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembangunan itu sendiri merupakan upaya perubahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Konsep Ketahanan Pangan

Pengertian ketahanan pangan tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Ketahanan pangan didefinisikan sebagai suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang terjamin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Sementara sesuai dengan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan karena pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi manusia sehingga pangan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Ketahanan pangan dapat juga diartikan sebagai tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk menopang aktivitasnya sehari-hari sepanjang waktu. Ketahanan pangan mencakup tingkat rumah tangga dan tingkat nasional (Rachman dan Ariani, 2002:12). Sementara Sjamsir (2017:26), mendefinisikan ketahanan pangan sebagai usaha

manusia untuk mengelola lahan dan agro ekosistem dengan bantuan teknologi, modal tenaga kerja dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.

Konsep ketahanan pangan itu sendiri (Purwaningsih, 2008:2-3), mencakup :

1. Ketersediaan pangan : kecukupan jumlah pangan (*food sufficiency*).
2. Keamanan pangan (*food safety*) : pangan yang bebas dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lainnya yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan keadaan manusia, serta terjamin mutunya (*food quality*) yaitu memenuhi kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman.
3. Kemerataan pangan : sistem distribusi pangan yang mendukung tersedianya pangan setiap saat dan merata.
4. Keterjangkauan pangan : kemudahan rumah tangga untuk memperoleh pangan dengan harga yang terjangkau.

Membahas ketahanan pangan seperti pendapat Sumarwan dan Sukandar (1998) yang dikutip oleh Rachman dan Ariani (2002:14), pada dasarnya juga membahas hal-hal yang menyebabkan orang tidak tercukupi kebutuhan pangannya. Hal-hal tersebut meliputi tersedianya pangan, lapangan kerja dan pendapatan. Ketiga hal tersebut menentukan apakah suatu rumah tangga memiliki ketahanan pangan, artinya dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizi bagi setiap anggota keluarganya.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan adalah tercukupinya kebutuhan pangan baik jumlah maupun kualitasnya yang cukup, terdistribusi dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya kebutuhan pangan dan gizi bagi anggota keluarganya.

4. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Lalu Dirjaharta (2001), melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam metode analisis datanya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih rendah, dilihat dari tingkat kemampuannya menyesuaikan diri terhadap perubahan yang senantiasa mempengaruhi pendapatan daerah. Sementara produktivitas juga masih rendah yang ditunjukkan rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD dikarenakan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya berorientasi pada target dan tujuan jangka pendek semata. Efektivitas organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti : organisasi, pegawai, lingkungan kebijakan dan praktik manajemen, yang kesemuanya belum mendukung pencapaian tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah secara optimal.
2. Achmad Rofai (2006), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi Pada Badan Kesatuan

Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah". Penelitian ini menggunakan variabel kepemimpinan, motivasi pegawai dan kemampuan personal terhadap efektivitas organisasi. Hipotesis penelitian yang dibangun adalah ada tidaknya hubungan antara kepemimpinan, motivasi dan kemampuan personal terhadap efektivitas organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara kepemimpinan, motivasi dan kemampuan personal terhadap efektivitas organisasi tergolong lemah karena nilai Kendall's tau berada di bawah 0.5. Sementara untuk nilai determinasi model pada penelitian ini relatif rendah sebesar 47,5%. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa ada variabel lainnya yang memiliki hubungan lebih kuat dalam mempengaruhi efektivitas organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

3. Hendrik Kambu (2011), melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sorong". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana efektivitas organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sorong dan ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dan penunjang bagi efektivitas organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sorong. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif, dimana data primer diperoleh dari wawancara dan observasi sementara data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas dan fleksibilitas merupakan indikator yang menunjang efektivitas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sorong. Sedangkan

faktor sumber daya manusia merupakan kendala bagi tercapainya efektivitas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sorong.

4. Nazalyus (2012), melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas organisasi Bappeda dan Statistik Kepulauan Bangka Belitung dikaitkan dengan tujuan pembentukan organisasi dan tugas pokoknya serta dinamika lingkungan baik internal maupun eksternal yang mempengaruhinya. Teori yang digunakan untuk mengkaji efektivitas adalah model pendekatan tujuan, model pendekatan sistem, model pendekatan perilaku oleh Richard Steers. Sedangkan teori-teori terapannya adalah *Rational Goal Model*, Model Hubungan Manusia, Model Hubungan Eksternal, dan Model Hubungan Internal yang dikembangkan oleh Azhar Kasim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi Bappeda dan Statistik Kepulauan Bangka Belitung sudah efektif dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam menghasilkan produk-produk dokumen utama perencanaan, meskipun terdapat tumpang tindih penugasan dan beban pekerjaan di luar tugas utama. Reorganisasi dan evaluasi terhadap struktur organisasi dan pengkajian ulang terhadap tugas pokok dan fungsi Bappeda perlu dilakukan disertai dengan kebijakan tentang pemantapan strategi organisasi.
5. Lalu Toyib Busyairi (2014), melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Organisasi Inspektorat Dalam Melakukan Tugas Pengawasan di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat”. Tujuan dari penelitian ini adalah

mendeskripsikan efektivitas Inspektorat dalam melakukan pengawasan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Inspektorat dalam melakukan pengawasan di Kabupaten Sumbawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi, hasil observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Inspektorat dalam melakukan pengawasan di Kabupaten Sumbawa Barat masih rendah yang dipengaruhi oleh kepemimpinan, sumber daya manusia, dan lingkungan kerja organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dilihat dalam ringkasan perbandingan sebagaimana tabel berikut ini.



Tabel 2.1
Ringkasan Perbandingan Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Lalu Dirjaharta	Efektivitas Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Metode deskriptif kualitatif	Tingkat efektivitas organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih rendah, sedangkan produktivitas juga masih rendah yang ditunjukkan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya berorientasi pada target dan tujuan jangka pendek semata
2.	Achmad Rofai	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah	Metode Kuantitatif	Hubungan antara kepemimpinan, motivasi dan kemampuan personal terhadap efektifitas organisasi tergolong lemah. Adanya variabel lainnya yang memiliki hubungan lebih kuat yang mempengaruhi efektivitas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.
3.	Hendrik Kambu	Efektivitas Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sorong.	Metode deskriptif kualitatif	Produktivitas dan fleksibilitas menunjang efektivitas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sorong, sedangkan faktor sumber daya manusia merupakan kendala bagi tercapainya efektivitas.
4.	Nazalyus	Efektivitas Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Metode Kualitatif	Efektivitas Bappeda dan Statistik Kepulauan Bangka Belitung sudah efektif dalam melaksanakan tugasnya meskipun terdapat tumpang tindih penugasan dan beban pekerjaan di luar tugas utama.
5.	Lalu Toyib Busyairi	Efektivitas Organisasi Inspektorat Dalam Melakukan Tugas Pengawasan di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	Metode deskriptif kualitatif	Efektivitas masih rendah yang dipengaruhi oleh kepemimpinan, sumber daya manusia dan lingkungan kerja organisasi.

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, Tahun 2019.

Perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian ini terletak pada kajian efektifitas yang ingin diketahui. Pada penelitian yang telah dilakukan pengukuran efektifitas organisasi lebih mengarah pada model

hubungan manusia yang mengarah pada pengembangan sumber daya manusia, serta model sistem terbuka yang mengarah pada kecocokan struktur organisasi dengan tugas-tugasnya sesuai keadaan lingkungannya. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan pencapaian tujuan melalui model tujuan rasional dengan asumsi bahwa organisasi merupakan suatu alat dalam rangka mencapai tujuan secara rasional.

5. Kerangka Berpikir

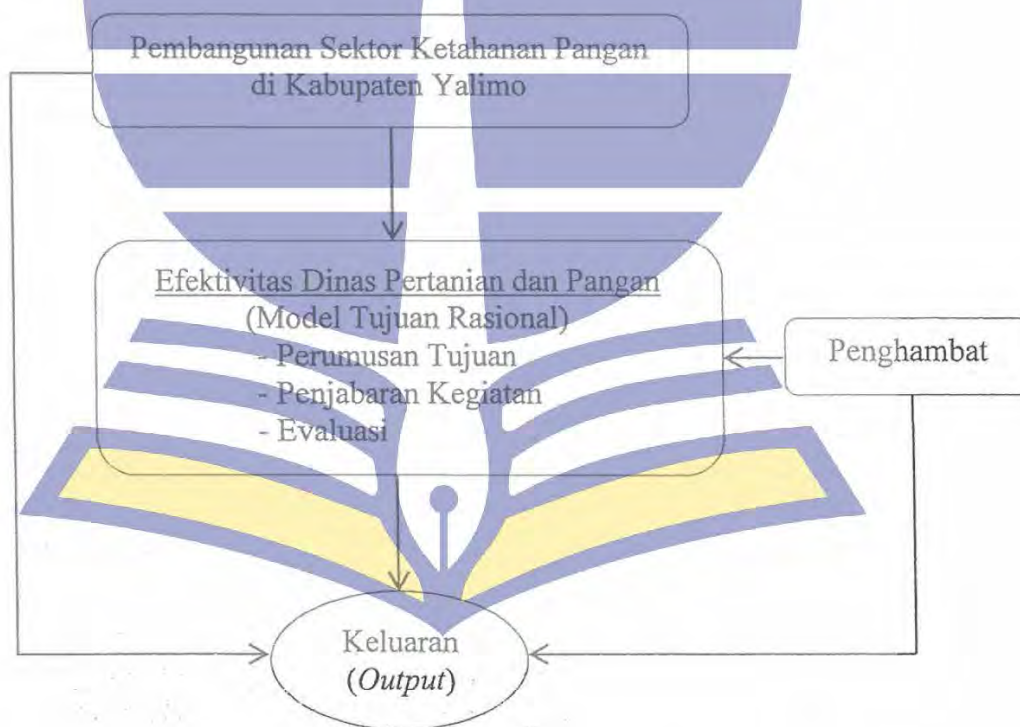
Pada dasarnya kerangka pikir adalah penjelasan yang bersifat sementara dari gejala yang menjadi obyek permasalahan penelitian (Pasolong, 2004). Sementara Uma Sukaran (1992) dalam Sugiyono (2006:65), mengemukakan bahwa “kerangka berpikir merupakan model konseptual yang menggambarkan tentang bagaimana teori saling berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai permasalahan yang penting”.

Pengukuran efektivitas dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pencapaian tujuan dengan model tujuan rasional, dimana model ini menganggap bahwa organisasi adalah suatu alat untuk mencapai tujuan secara rasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan aturan-aturan, prosedur dan birokrasi, serta memperhatikan keahlian setiap orang dalam menjalankan tugas masing-masing sesuai tata kerja, lingkup kewenangan dan tanggung jawabnya baik yang bersifat struktural maupun fungsional.

Keberhasilan pembangunan sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo tidak akan terlepas dari keberadaan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo yang merupakan organisasi yang menjalankan

tugas-tugasnya, kewenangannya dan tanggung jawabnya dalam pengembangan ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo. Efektivitas dari Dinas Pertanian dan Pangan dalam melaksanakan pembangunan sektor ketahanan pangan sangatlah tergantung pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dimana dimensi rasionalnya sangatlah ditentukan pada perumusan tujuan, penjabaran kegiatan dan evaluasi terhadap keluaran (*output*) yang telah dan akan dihasilkan.

Adapun skema kerangka berpikir dalam penelitian ini seperti gambar berikut ini.



Gambar 2.1
Skema Kerangka Berpikir

Sumber : Pengembangan model tujuan rasional oleh Azhar Kasim (Liestyodono, 2014). Teori pengukuran efektivitas organisasi.

6. Operasionalisasi Konsep

Menjelaskan konsep dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena-fenomena penelitian. Merancang konsep dalam penelitian kualitatif bukanlah mudah karena fenomena dalam penelitian kualitatif pada umumnya merupakan permasalahan-permasalahan tertentu yang tidak mudah untuk digeneralisasikan. Bungin (2007:75), mengemukakan bahwa merancang konsep dalam penelitian kualitatif adalah suatu makna kognitif, atau makna sosiologis yang hidup dalam alam pikiran informan dan subjek-objek penelitian, bukan suatu konsep yang justru ditawarkan oleh peneliti untuk dikembangkan saat pengumpulan data. Sementara Wahyuni (1994) dalam Pasolong (2002:4), adalah merupakan abstraksi atau generalisasi dari suatu realita atau fenomena, dan cara menjelaskannya digunakan satu kata atau lebih agar dapat dikomunikasikannya.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa konsep adalah suatu pengertian atau definisi yang diberikan terhadap fenomena atau gejala yang sama dan bisa saja dipergunakan untuk fenomena atau gejala yang lain. Konsep secara langsung dapat mengarahkan informan pada pikiran yang rasional terhadap fenomena realita yang sedang diteliti.

Operasionalisasi terhadap konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Perumusan tujuan adalah suatu pembuatan rencana yang jelas sarasannya dan merupakan hasil perpaduan kepentingan berbagai pihak serta digunakan sebagai landasan dalam menjamin berlangsungnya proses pembangunan sektor ketahanan pangan. Perumusan tujuan mencakup tujuan formal dan

tujuan operasional, dimana fokus pendekatannya adalah keluaran-keluaran yang dapat dihasilkan oleh organisasi dalam menjamin ketersediaan pangan bagi penduduk di Kabupaten Yalimo.

2. Penjabaran kegiatan adalah proses menguraikan berbagai bentuk kegiatan/pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya dan sumber dana yang tersedia pada suatu lokasi tertentu. Penjabaran kegiatan merupakan tindakan (*intervensi*) yang dilakukan yang secara tegas memuat jenis kegiatan yang akan dilakukan, tujuan yang ingin dicapai, dan kelayakan kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Evaluasi adalah penilaian atas pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan dengan cara mengukur keluaran (*output*) dari pelaksanaan berbagai kegiatan khususnya yang berkaitan dengan sektor ketahanan pangan. Evaluasi dilakukan terhadap sasaran dan target yang telah ditetapkan organisasi.
4. Keluaran (*Output*) adalah hasil yang dicapai dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan. Keluaran merupakan pernyataan tentang hasil yang langsung diperoleh oleh organisasi dari berbagai kegiatan pembangunan sektor ketahanan pangan yang telah dilakukan.
5. Penghambat adalah sesuatu yang menghalangi atau menjadi kendala dalam melaksanakan pembangunan sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo. Penghambat organisasi dalam mencapai efektivitasnya dapat berasal dari ciri organisasi itu sendiri, ciri pekerja, serta kebijakan dan praktek manajemen yang diterapkan.
6. Pembangunan sektor ketahanan pangan adalah suatu upaya yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam rangka memperbaiki dan

meningkatkan sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo. Pembangunan itu sendiri terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik yang merupakan proses penciptaan sesuatu yang baru dan berkembang dalam suatu tatanan wilayah atau kelompok masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode kualitatif pada dasarnya digunakan untuk menemukan gambaran, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas ini ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2007). Peneliti akan mengamati dan mencatat ucapan dan tulisan dari berbagai sumber informasi baik dari yang berasal dari internal yakni pegawai maupun eksternal yakni sumber informasi yang berasal dari luar Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo.

Penelitian ini akan dilakukan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo yang berlokasi di Kota Elelim. Pemilihan lokasi pada penelitian ini dengan pertimbangan bahwa penulis adalah pegawai pada dinas tersebut, sehingga lebih mudah bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan observasi. Selain itu peneliti juga faham dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo, dimana salah satunya adalah berkaitan dengan pembangunan sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Metode pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana dilakukan dengan mengambil hanya orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri khusus serta memiliki hubungan secara langsung dengan objek penelitian. Penetapan informan melalui *key person* dapat digunakan apabila peneliti sudah mengetahui informasi awal tentang objek penelitian dan informan penelitian. *Key person* dalam penelitian ini adalah tokoh formal dan informal. Tokoh formal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berada di dalam lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo, sedangkan tokoh informal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tokoh yang berada di luar objek penelitian namun dianggap memahami tentang permasalahan penelitian.

Adapun informan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Kepala Bidang Pertanian
4. Kepala Bidang Pangan
5. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Yalimo
6. Anggota DPRD Kabupaten Yalimo
7. Ketua Kelompok Tani
8. Tokoh adat

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif, dimana data kualitatif merupakan uraian objek yang bersifat deskriptif dan tidak berdimensi angka yang bersumber dari orang-orang yang mengalami dan mengetahui permasalahan yang ada pada lokasi penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data primer yang merupakan hasil wawancara yang diperoleh dari informan penelitian.
2. Data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung berupa Daftar Nominatif Pegawai, Daftar Urutan Kepangkatan, RPJMD Kabupaten Yalimo, Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo, Data Yalimo Dalam Angka, dan laporan/dokumen lainnya yang mendukung penelitian ini.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara. Peneliti secara langsung melakukan wawancara dengan informan dan melakukan pencatatan/perekaman serta pengumpulan data-data atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini. Menurut Bungin (2007), wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yakni pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewer*). Ia menambahkan bahwa wawancara adalah metode pengumpulan data yang amat populer, karena itu

banyak digunakan di berbagai penelitian. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan (Sugiyono 2006).

D. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono 2006). Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi (Partisipatif)

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan penelitian, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam digunakan untuk menemukan permasalahan yang terjadi secara terbuka, meminta pendapat dan ide-ide serta solusi dari informan. Wawancara secara mendalam dilakukan terhadap informan yang memiliki kompetensi dan dianggap mengetahui,

mengerti dan memahami permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. Peneliti akan melakukan wawancara secara tidak terstruktur, dimana pertanyaan akan bersifat luwes disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan saat melakukan wawancara. Menurut Moleong (2002), menjelaskan bahwa wawancara tidak terstruktur biasanya dilaksanakan tanpa adanya pertanyaan yang sudah tersusun, dimana dalam proses wawancara akan disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang dimiliki oleh responden. Responden biasanya terdiri atas mereka yang memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan.

3. Dokumentasi

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monument dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan dokumen ini bersifat sekunder dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam.

E. Metode Analisis Data

Analisis dan pengolahan data bersifat kuantitatif dilakukan sesuai dengan persepsi para informan/nara sumber yaitu menggambarkan atau menguraikan tentang objek penelitian serta membandingkan hasilnya dengan teori yang digunakan. Data hasil wawancara, kemudian diolah dan dipadukan dengan telaahan dokumentasi kemudian akan disajikan dalam bentuk *verbatim*

serta berbagai isu-isu yang terungkap. Adapun dokumen hasil wawancara secara lengkap akan dilampirkan sebagai bukti otentik penelitian ini.

Beberapa tahapan pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Sebelum dilakukan pengolahan data, data tersebut diperiksa terlebih dahulu. Jawaban informan yang dikumpulkan melalui hasil wawancara akan diterjemahkan di dalam tulisan dimana dilakukan proses editing dalam rangka meneliti kembali jawaban informan.

2. Klasifikasi data

Klasifikasi terhadap data yang sudah diedit dilakukan sebagai usaha untuk menyederhanakan data, yaitu dengan mengklasifikasikan data berdasarkan substansi dan struktur jawaban dari informan. Klasifikasi data di dalam penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk kata-kata (kalimat). Pada penelitian ini, klasifikasi data dilakukan berdasarkan daftar garis besar pertanyaan yang telah disusun. Data yang nantinya akan disajikan di dalam pembahasan hasil penelitian akan dikelompokkan menjadi sub-sub topik bahasan.

3. Analisis data

Menurut Patton (1980) dalam Moleong (2002:103), menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sementara Neuman (2000:426) dalam Hamdi dan Ismayarti (2016), analisis data adalah suatu pencarian pola dalam data dan pola itu berarti

suatu kecenderungan pengulangan kejadian dari perilaku, objek, atau kumpulan pengetahuan. Rangkaian pengulangan kejadian secara perlahan akan membentuk pola dan apabila pola tersebut sudah teridentifikasi, pola tersebut dapat ditafsirkan berdasarkan teori-teori yang sudah ada ataupun berdasarkan latar tempat pola tersebut terbentuk.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) dengan menggunakan teks dan bahasa. Menurut Bungin (2007:155), analisis isi merupakan teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan erat dengan komunikasi yang selalu berisi pesan dalam sinyal komunikasinya, baik berupa verbal maupun non verbal.

Terdapat 4 (empat) macam prinsip analisis isi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Prinsip sistemik, bahwa ada perlakuan prosedur yang sama pada semua isi yang dianalisis.
- b. Prinsip obyektif, hasilnya tergantung pada prosedur penelitian bukan pada orangnya.
- c. Prinsip kualitatif, menilai dan memaknai hasil wawancara untuk menggambarkan berbagai jenis isi yang diidentifikasi.
- d. Isi yang nyata, yang diteliti dan dianalisis hanyalah isi yang tersurat, yang tampak, bukan makna yang dirasakan oleh peneliti.

4. Uji Keabsahan

Dalam penelitian kualitatif, temuan dan data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Namun, perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal tetapi jamak dan tergantung ada konstruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Adapun uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2006), sebagai berikut :

- a. *Credibility* (validitas internal), dimana pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *membercheck*.
- b. *Transferability* (validitas eksternal), dimana menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian kepada populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan hingga mana penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai hingga hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Peneliti sendiri tidak menjamin validitas eksternal ini.

- c. *Dependability* (reliabilitas), dimana uji ini dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji reliabilitasnya.
- d. *Confirmability* (obyektivitas), dimana menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

Uji keabsahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas internal (*credibility*) dengan menggunakan teknik triangulasi, dimana dengan cara mencari pertemuan pada satu titik informasi dari data-data yang terkumpul guna pengecekan dan perbandingan terhadap data yang sudah ada.



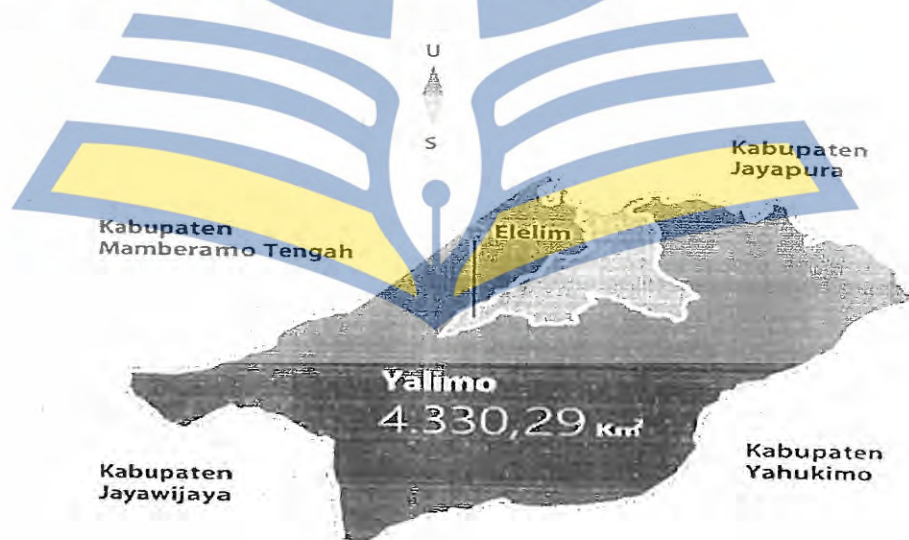
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

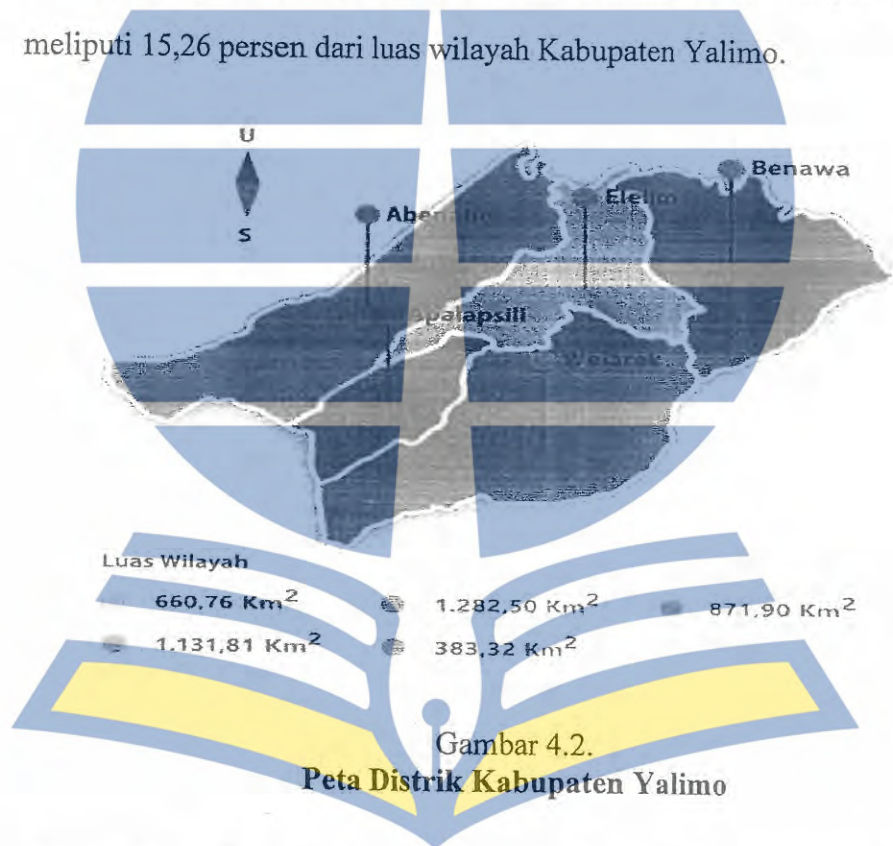
1. Gambaran Umum Kabupaten Yalimo

Kabupaten Yalimo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang terletak pada koordinat $138^{\circ}57'37,98''$ sampai $139^{\circ}55'03,99''$ Bujur Timur dan $3^{\circ}27'32,40''$ sampai $4^{\circ}05'15,20''$ Lintang Selatan. Ibukota Kabupaten Yalimo terletak di Distrik Elelim, dimana sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jayapura, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Yahukimo, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jayawijaya, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Tengah. Kabupaten Yalimo memiliki luas $4.330,29 \text{ Km}^2$ atau hanya 1,37 persen dari luas wilayah Provinsi Papua.



Gambar 4.1.
Peta Geografis Kabupaten Yalimo

Kabupaten Yalimo terbagi menjadi 5 (lima) distrik/kecamatan yaitu Elelim, Abenaho, Benawa, Apalapsili, dan Welarek. Distrik yang terluas adalah Distrik Welarek dengan luas wilayah 1.282,50 Km² atau 29,62 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Yalimo. Sementara distrik dengan wilayah terkecil adalah Distrik Apalapsili dengan luas wilayah 383,32 Km² atau 8,85 persen dari luas wilayah kabupaten. Sedangkan untuk ibukota kabupaten yakni Distrik Elelim memiliki luas 660,76 Km² dan meliputi 15,26 persen dari luas wilayah Kabupaten Yalimo.



2. Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas

pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo dalam melaksanakan tugasnya tersebut, menyelenggarakan beberapa fungsi yakni : (1) Perumusan Kebijakan teknis di bidang pertanian dan pangan; (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan pangan; dan (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian dan pangan.

b. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo terdiri dari : Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Pertanian, Bidang Pangan, Bidang Peternakan, Bidang Perkebunan, Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo sesuai Peraturan Bupati Yalimo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo dapat dilihat pada lampiran 4.

Untuk lebih jelasnya menyangkut tugas pokok dan fungsi jabatan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertanian dan Pangan.

2) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan program serta pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian. Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

a) Pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja, anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana;

b) Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, perjalanan dinas, rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;

c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan pemeliharaan;

d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris, membawahi :

a) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas mengelola surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan, dan administrasi kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

i. Pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;

ii. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan;

- iii. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - iv. Penyiapan rencana kebutuhan dan pengembangan kepegawaian serta mutasi pegawai;
 - v. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan dan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- i. Penyiapan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
 - ii. Pengelolaan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta pengurusan perbendaharaan keuangan;
 - iii. Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.
- c) Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana dinas. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
- i. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program;
 - ii. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
 - iii. Pembinaan organisasi dan tata laksana dinas;
 - iv. Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

3) Bidang Pertanian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program bidang pertanian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Pertanian mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;
- b) Pengelolaan urusan pelayanan umum di bidang pertanian;
- c) Pelaksanaan program pembinaan, peningkatan dan pengembangan produksi pertanian;
- d) Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan bidang pertanian;
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pertanian membawahi :

- a) Seksi Tanaman Pangan, mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan edoman dan bimbingan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi dan menetapkan sebagian tugas bidang pertanian yang berkenaan dengan tanaman pangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
 - i. Penyusunan rencana kegiatan/program seksi tanaman pangan;
 - ii. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan tanaman pangan;
 - iii. Perumusan pedoman dan bimbingan teknis pengembangan tanaman pangan;

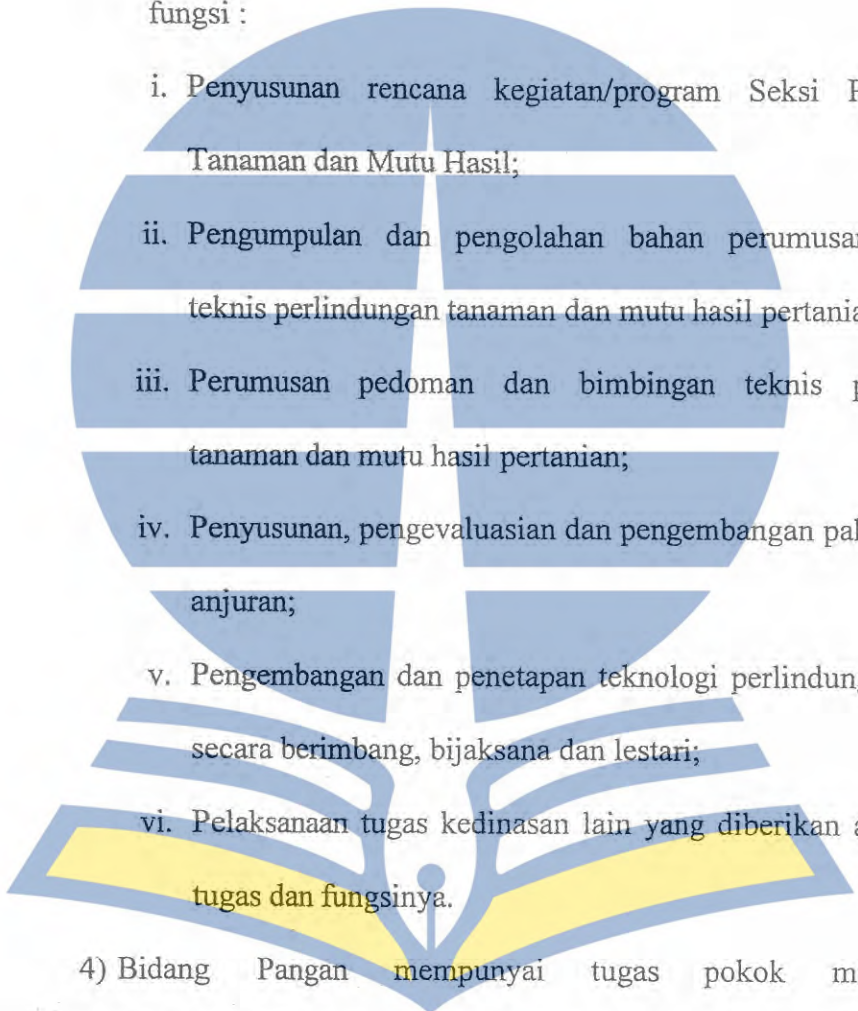
- iv. Penyusunan, pengevaluasian dan pengembangan paket teknologi anjuran;
- v. Pengembangan dan penetapan komoditas tanaman sereal, kacang-kacangan, dan umbi-umbian;
- vi. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Seksi Hortikultura, mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan pedoman dan bimbingan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi dan menetapkan sebagian tugas bidang pertanian yang berkenaan dengan hortikultura. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Hortikultura mempunyai fungsi :

- i. Penyusunan rencana kegiatan/program Seksi Hortikultura;
- ii. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan hortikultura;
- iii. Perumusan pedoman dan bimbingan teknis pengembangan hortikultura;
- iv. Penyusunan, pengevaluasian dan pengembangan paket teknologi anjuran;
- v. Pengembangan dan penetapan komoditas sayuran dan buah-buahan, aneka tanaman dan tanaman hias;
- vi. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Seksi Perlindungan Tanaman dan Mutu Hasil, mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan pedoman dan bimbingan,

menyusun, melaksanakan, mengevaluasi dan menetapkan sebagian tugas bidang pertanian yang berkenaan dengan perlindungan tanaman dan mutu hasil. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Perlindungan Tanaman dan Mutu Hasil mempunyai fungsi :

- 
- i. Penyusunan rencana kegiatan/program Seksi Perlindungan Tanaman dan Mutu Hasil;
 - ii. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan tanaman dan mutu hasil pertanian;
 - iii. Perumusan pedoman dan bimbingan teknis perlindungan tanaman dan mutu hasil pertanian;
 - iv. Penyusunan, pengevaluasian dan pengembangan paket teknologi anjuran;
 - v. Pengembangan dan penetapan teknologi perlindungan tanaman secara berimbang, bijaksana dan lestari;
 - vi. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4) Bidang Pangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program bidang pangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang pangan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- b) Pengelolaan urusan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan;

- c) Pelaksanaan program pembinaan, peningkatan dan pengembangan ketahanan pangan;
- d) Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan bidang pangan;
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pangan membawahi :

- a) Seksi Ketersediaan dan Kerawangan Pangan, mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan pedoman dan bimbingan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi dan menetapkan sebagian tugas bidang pangan yang berkenaan dengan ketersediaan dan kerawangan pangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Ketersediaan dan Kerawangan Pangan mempunyai fungsi :

- i. Penyusunan rencana kegiatan/program Seksi Ketersediaan dan Kerawangan Pangan;

- ii. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis ketersediaan dan kerawangan pangan;

- iii. Perumusan pedoman dan bimbingan teknis ketersediaan dan kerawangan pangan;

- iv. Pelaksanaan dan pembinaan ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi, akses pangan serta penanganan kerawangan pangan;

- v. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Seksi Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan pedoman dan bimbingan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi dan menetapkan sebagian tugas bidang pangan yang berkenaan dengan keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Untuk menelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

- i. Penyusunan rencana kegiatan/program Seksi Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- ii. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- iii. Perumusan pedoman dan bimbingan teknis keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- iv. Pelaksanaan dan pembinaan keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- v. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Seksi Penyuluhan, mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan pedoman dan bimbingan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi dan menetapkan sebagian tugas bidang pangan yang berkenaan dengan penyuluhan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- i. Penyusunan rencana kegiatan/program Seksi Penyuluhan;

- ii. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyuluhan;
- iii. Perumusan pedoman dan bimbingan teknis penyuluhan;
- iv. Pelaksanaan dan pembinaan tenaga fungsional penyuluh pertanian;
- v. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5) Bidang Peternakan, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program bidang peternakan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Peternakan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan;
- b) Pengelolaan urusan pelayanan umum di bidang peternakan;
- c) Pelaksanaan program pembinaan, peningkatan dan pengembangan produksi peternakan;
- d) Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan bidang peternakan
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Peternakan membawahi :

- a) Seksi Pengembangan Ternak mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan pedoman dan bimbingan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi dan menetapkan sebagian tugas bidang peternakan yang berkenaan dengan pengembangan ternak.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Pengembangan Ternak mempunyai fungsi :

- i. Penyusunan rencana kegiatan/program Seksi Pengembangan Ternak;
- ii. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ternak;
- iii. Perumusan pedoman dan bimbingan teknis pengembangan ternak;
- iv. Pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan produksi ternak ruminansia dan non ruminansia, unggas dan aneka ternak;
- v. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Seksi Kesehatan Hewan dan Veteriner mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan pedoman dan bimbingan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi dan menetapkan sebagian tugas bidang peternakan yang berkenaan dengan kesehatan hewan dan veteriner. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Kesehatan Hewan dan Veteriner mempunyai fungsi :

- i. Penyusunan rencana kegiatan/program Seksi Kesehatan Hewan dan Veteriner;
- ii. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis kesehatan hewan dan veteriner;
- iii. Perumusan pedoman dan bimbingan teknis kesehatan hewan dan veteriner;

- iv. Pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan obat hewan;
 - v. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- c) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan pedoman dan bimbingan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi dan menetapkan sebagian tugas bidang peternakan yang berkenaan pencegahan dan pemberantasan penyakit. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :
- i. Penyusunan rencana kegiatan/program Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - ii. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - iii. Perumusan pedoman dan bimbingan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - iv. Pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian penyakit hewan;
 - v. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 6) Bidang Perkebunan, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program bidang perkebunan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan;
- b) Pengelolaan urusan pelayanan umum di bidang perkebunan;
- c) Pelaksanaan program pembinaan, peningkatan dan pengembangan produksi perkebunan;
- d) Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Bidang Perkebunan;
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perkebunan membawahi :

- a) Seksi Bina Potensi dan Usaha Perkebunan mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan pedoman dan bimbingan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi dan menetapkan sebagian tugas bidang perkebunan yang berkenaan dengan potensi dan usaha perkebunan. Seksi Bina Potensi dan Usaha Perkebunan mempunyai fungsi :

- i. Penyusunan rencana kegiatan/program Seksi Bina Potensi dan Usaha Perkebunan;
- ii. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan potensi dan usaha perkebunan;
- iii. Perumusan pedoman dan bimbingan teknis pengembangan potensi dan usaha perkebunan;
- iv. Pengembangan dan penetapan jenis komoditi perkebunan;
- v. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Seksi Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan pedoman dan bimbingan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi dan menetapkan sebagian tugas bidang perkebunan yang berkenaan dengan perlindungan perkebunan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Perlindungan Perkebunan mempunyai fungsi :

- i. Penyusunan rencana kegiatan/program Seksi Perlindungan Perkebunan;
- ii. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan perkebunan;
- iii. Perumusan pedoman dan bimbingan teknis perlindungan perkebunan;
- iv. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Seksi Bina Usaha Perkebunan mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan pedoman dan bimbingan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi dan menetapkan sebagian tugas bidang perkebunan yang berkenaan dengan pembinaan usaha perkebunan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Bina Usaha Perkebunan mempunyai fungsi :

- i. Penyusunan rencana kegiatan/program Seksi Bina Usaha Perkebunan;
- ii. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha perkebunan;

- iii. Perumusan pedoman dan bimbingan teknis pengembangan usaha perkebunan;
- iv. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

- a) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- b) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- c) Kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala dinas;
- e) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- f) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8) UPTD

- a) UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;
- b) Kegiatan teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;

- c) Kegiatan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas;

9) Tata Kerja

Adapun tata kerja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo sesuai Peraturan Bupati Yalimo nomor Nomor 19 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo, sebagai berikut :

- a) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerja di lingkungan dinas wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal.
- b) Setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerja di lingkungan dinas wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan, pengendalian dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- c) Masing-masing pejabat di lingkungan dinas melakukan hubungan kerja sama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal dan horizontal.
- d) Setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerja di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- e) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi/unit kerja dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut.

- f) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusannya disampaikan satuan organisasi/unit kerja lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- g) Peraturan mengenai teknis laporan dan cara penyampaian berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- h) Dalam hal kepala dinas berhalangan menjalankan tugasnya, kepala dinas dapat menunjuk seorang sekretaris dan dalam hal sekretaris berhalangan pula, kepala dinas dapat menunjuk salah seorang kepala bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya dan atau sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Kepegawaian

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo beserta pegawai yang bekerja di dalamnya bertanggung jawab kepada Bupati, dimana proses pengangkatan maupun pemberhentian pegawai merupakan kewenangan Bupati Yalimo.

Adapun gambaran tentang keadaan kepegawaian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo berpedoman pada daftar urutan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil per 30 April 2019 dilihat dari tingkat pendidikan seperti tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Tingkat Pendidikan Pegawai
Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	S-2	-	0,00
2.	S-1	27	52,94
3.	D3	6	11,76
4.	SMA/SMK	18	35,29
5.	SMP	-	0,00
Jumlah		51	100,00

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo, Tahun 2019.

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, menunjukkan bahwa jumlah Pegawai yang bertugas di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo sebanyak 51 orang, dimana sebagian besar memiliki tingkat pendidikan S-1 sebanyak 27 orang atau 52,94%. Sementara untuk pegawai dengan tingkat pendidikan D-3 sebanyak 6 orang atau 11,76%, dan tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 18 orang atau 35,29%.

Sementara keadaan kepegawaian berdasarkan jenjang kepangkatan/golongan pegawai dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Jenjang Pangkat/Golongan Pegawai
Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	I	-	0,00
2.	II	22	43,14
3.	III	28	54,90
4.	IV	1	1,96
Jumlah		51	100,00

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo, Tahun 2019.

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, menunjukkan bahwa pegawai pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo sebagian besar memiliki

jenjang kepangkatan/golongan III sebanyak 28 orang atau 54,90%, jenjang kepangkatan/golongan II sebanyak 22 orang atau 43,14%, dan jenjang kepangkatan/golongan IV sebanyak 1 orang atau 1,96%.

Sementara untuk menunjang tugas-tugas lainnya, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo juga mengangkat pegawai tidak tetap yang terdiri dari : 12 orang pegawai honorer UPTD, 25 orang tenaga penyuluh pertanian kontrak, dan 30 orang tenaga kader kesehatan hewan yang ditempatkan di 5 (lima) distrik yang ada di Kabupaten Yalimo.

B. Hasil

1. Efektivitas Dinas Pertanian Dan Pangan Dalam Pembangunan Sektor Ketahanan Pangan di Kabupaten Yalimo

a. Perumusan Tujuan

Salah satu faktor yang penting artinya dalam mengukur efektivitas organisasi adalah tujuan dari organisasi itu sendiri sebagai landasan pembentukannya. Tujuan tidak lain merupakan deskripsi tentang sasaran akhir yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi, dimana sasaran-sasaran tersebut merupakan penjabaran yang lebih konkrit tentang tujuan-tujuan yang hendak dicapai.

Berkaitan dengan arah pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo, Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian dan Pangan mengemukakan :

“Arah pembangunan khususnya sektor ketahanan pangan yang saat ini dilaksanakan lebih diarahkan pada bagaimana

menyediakan pangan yang cukup dan bergizi bagi seluruh penduduk Kabupaten Yalimo. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) periode 2016-2021 telah memuat secara jelas pemanfaatan lahan untuk pengembangan tanaman pangan unggulan yakni seluas 44.750 Ha yang diperuntukkan bagi pengembangan padi sawah, padi ladang, sagu, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Selain itu pengembangan komoditi unggulan untuk sektor peternakan seluas \pm 5.501 Ha dan perikanan seluas \pm 8,342 Ha untuk pengembangan perikanan budidaya akan secara langsung memenuhi kebutuhan akan kecukupan pangan yang seimbang dan bergizi untuk seluruh penduduk.” (Wawancara, 12-03-2019).

Lebih lanjut, Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian dan Pangan juga mengungkapkan bahwa :

“Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo tahun 2017-2021, pada kenyataannya lebih diarahkan pada peningkatan produktivitas dari sektor-sektor yang dapat mendorong pengembangan usaha tani masyarakat. Hal ini tentunya dapat dimengerti bahwa pembentukan Bidang Pangan yang menangani khusus ketahanan pangan baru terbentuk dengan adanya perubahan nomenklatur dinas menjadi Dinas Pertanian dan Pangan yang efektif mulai tahun 2017.” (Wawancara, 12-03-2019).

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan, yang mengatakan bahwa :

“Pengembangan khususnya untuk pangan di Kabupaten Yalimo haruslah diawali dengan pengembangan komoditi tanaman pangan. Produksi dan produktivitas dari beberapa komoditi khususnya tanaman pangan perlu untuk ditingkatkan sehingga akhirnya akan menunjang ketahanan pangan. Rencana Strategis yang disusun hingga tahun 2021, sudah tepat dalam mempersiapkan sarana dan prasarana pengembangan produksi dan produktivitas beberapa komoditi pertanian agar nantinya ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo akan secara langsung terbentuk dengan sendirinya.” (Wawancara, 15-03-2019).

Hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa pengembangan pangan di Kabupaten Yalimo diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas dari beberapa komoditi khususnya tanaman pangan sebagai

upaya menunjang ketahanan pangan. Pemerintah Kabupaten Yalimo telah merubah nomenklatur dinas menjadi Dinas Pertanian dan Pangan dengan membentuk Bidang Pangan yang menangani secara langsung permasalahan ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo.

Sementara Ketua Kelompok Tani Nongkorok yang berlokasi di Distrik Benawa, mengatakan bahwa :

“Dinas Pertanian dan Pangan telah memberikan bantuan khususnya untuk kembangkan tanaman pangan, namun masyarakat lebih suka tanam ubi jalar dan sayur-sayuran karena merupakan budaya yang sudah dilakukan sejak dulu. Kami orang “Yali” lebih suka tanam petatas (ubi jalar) dan peliharaan (ternak babi) daripada tanam padi. Padi susah ditanam karena cara tanam masyarakat yang saat ini dilakukan hanya tebang pohon, bersihkan lahan dan tanam”. (Wawancara, 26-03-2019).

Sedangkan Ketua Kelompok Tani Sohima yang berlokasi di Distrik Abenaho, mengatakan bahwa :

“Kami telah mengembangkan beberapa tanaman seperti ubi jalar, keladi (talas) dan juga padi. Dinas Pertanian telah mendampingi kami dalam budidaya dan bantuan peralatan”. (Wawancara, 27-03-2019).

Ketua Kelompok Tani Sabilironggo dan juga selaku Tokoh Adat Suku Yali, mengatakan bahwa :

“Usaha masyarakat dalam bertani telah didukung oleh Dinas Pertanian dan Pangan, dimana ditandai dengan adanya bantuan-bantuan kegiatan maupun peralatan untuk berusahatani. Hanya saja dalam berusaha tani belum fokus pada lokasi-lokasi tertentu sebagai pusat produksi. Banyaknya usulan-usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musrembang di tingkat distrik membuat kegiatan-kegiatan usaha pertanian menjadi terbagi-bagi dan tidak terpusat. Untuk makanan pokok masyarakat khususnya beras masih didatangkan dari luar Yalimo karena kelompok-kelompok tani masih mengusahakannya dalam lahan-lahan kecil dan bukan lahan yang luas”. (Wawancara, 03-04-2019).

Hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa kelompok-kelompok petani yang merupakan binaan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo lebih banyak mengembangkan tanaman pangan lokal jenis ubi-ubian yang merupakan makanan pokok masyarakat. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang menangani secara langsung pembangunan sektor ketahanan pangan belum maksimal dalam mengembangkan tanaman pangan, hal ini ditunjukkan dengan kelompok-kelompok petani masih mengembangkan tanaman pangan dalam skala kecil dan bukan pada lahan-lahan yang luas.

Hal ini dibenarkan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Yalimo, yang mengatakan bahwa :

“Untuk sektor ketahanan pangan khususnya ketersediaan pangan bagi penduduk di Kabupaten Yalimo masih kurang yang ditunjukkan dengan pasokan khususnya beras dan bahan makanan lainnya masih didatangkan dari luar kabupaten. Dinas Pertanian dan Pangan harus bekerja keras untuk membuat formulasi kebijakan-kebijakan yang tepat dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Pengembangan produksi beberapa komoditi seperti tanaman pangan khususnya ubi jalar dan peternakan dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat yang dilakukan saat ini belum memberikan hasil dikarenakan skala usaha petani masyarakat masih kecil dan terbagi-bagi (tidak terpusat). Tujuan yang diharapkan dalam pemenuhan kebutuhan pangan belum dapat dicapai karena dinas belum mampu memunculkan komoditi-komoditi unggulan untuk setiap distriknya”. (Wawancara, 06-04-2019).

Sementara Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo, mengatakan bahwa :

“Keberhasilan pembangunan ketahanan pangan dicapai jika pasokan pangan untuk kebutuhan penduduk Kabupaten Yalimo terpenuhi baik kualitas maupun kuantitasnya, dimana sasaran utamanya adalah terpenuhinya kebutuhan gizi bagi petani dan

keluarganya. Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa tujuan dari pemenuhan kebutuhan pangan itu sendiri belum tercapai karena pembangunan sektor ketahanan pangan masih menjadi prioritas kedua dan prioritas pertama adalah mengembangkan dulu beberapa komoditi pendukung ketahanan pangan yakni komoditi-komoditi tanaman pangan, peternakan, dan perikanan darat (tupoksi Dinas Perikanan). Adapun tujuan dari pengembangan komoditi-komoditi ini yang dilakukan merata pada 5 (lima) distrik adalah untuk menjamin terpenuhinya bahan makanan bagi masyarakat yang ada di kampung-kampung". (Wawancara, 16-04-2019).

Hasil wawancara di atas, memperlihatkan bahwa pembangunan sektor ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo belum memberikan hasil. Tujuan dari pemenuhan kebutuhan pangan itu sendiri masih menjadi prioritas kedua dan belum adanya formulasi kebijakan yang tepat dalam pengembangan pangan di Kabupaten Yalimo.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan yang dikonfirmasi berkaitan dengan pendapat-pendapat di atas, mengatakan bahwa :

"Pengembangan beberapa komoditi baik tanaman pangan dan peternakan yang saat ini sedang dilaksanakan bertujuan agar terpenuhinya kebutuhan pangan dan kecukupan gizi bagi penduduk di Kabupaten Yalimo. Secara bertahap akan mengarah pada terciptanya ketahanan pangan bagi seluruh penduduk yang ada di Kabupaten Yalimo. Kenyataannya tak dapat dipungkiri bahwa sektor ketahanan pangan saat ini belum memberikan hasil yang menggembirakan dikarenakan Bidang Pangan yang menangani secara langsung ketahanan pangan baru dibentuk tahun 2017 melalui restrukturisasi yang telah dilaksanakan. Komoditi unggulan tanaman pangan khususnya ubi jalar, ubi kayu dan tanaman palawija serta komoditi peternakan khususnya ternak babi telah memberikan produktivitas yang meningkat setiap tahunnya. Sedangkan khusus untuk pengembangan komoditi padi baik padi sawah dan padi ladang belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas tanaman pangan secara keseluruhan. Hal ini lebih disebabkan karena budidaya khususnya untuk padi merupakan hal baru bagi masyarakat Yalimo sehingga masih diperlukan

waktu untuk pengembangan maupun introduksi teknologinya”. (Wawancara, 22-04-2019).

Pendapat di atas, mengindikasikan bahwa pengembangan beberapa komoditi baik tanaman pangan dan peternakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan pangan dan kecukupan gizi bagi penduduk di Kabupaten Yalimo. Pengembangan komoditi padi baik padi sawah dan padi ladang belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas tanaman pangan secara keseluruhan. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo belum merumuskan tujuan dan menformulasi berbagai kebijakan yang lebih khusus dan terarah dalam mengembangkan ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo.

b. Penjabaran kegiatan

Penjabaran kegiatan merupakan aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) dari pelaksanaan suatu program pembangunan daerah. Penjabaran kegiatan diperlukan dalam pelaksanaan sebuah program agar kegiatan-kegiatan tersebut menjadi teratur dan terarah.

Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian dan Pangan, mengatakan bahwa :

“Untuk pengembangan ketahanan pangan, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sejak terbentuknya bidang pangan yakni pelatihan-pelatihan berkaitan dengan pengolahan pangan, pengembangan pangan lokal, pengembangan diversifikasi tanaman pangan, pembangunan lumbung pangan, penanganan

daerah-daerah yang teridentifikasi rawan pangan, dan pengangkatan tenaga kontrak untuk melakukan penyuluhan pertanian dalam rangka menjaga produksi komoditi tanaman pangan. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan lebih banyak untuk menjaga ketersediaan pangan bagi penduduk di Kabupaten Yalimo yang tinggal di kampung-kampung. Tuntutan masyarakat baik melalui Musrenbang di tingkat distrik dan tingkat kabupaten mengharapkan kami untuk lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang membantu masyarakat dalam mengolah pangan lokal. Kami pun telah melakukannya namun karena terbatasnya dana sehingga belum dapat dilakukan pada semua distrik yang ada di Kabupaten Yalimo". (Wawancara, 12-03-2019).

Sementara Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Yalimo dalam kesempatan diskusi berkaitan dengan program-program pengembangan ketahanan pangan, mengatakan bahwa :

"Program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan yang telah terealisasi hingga akhir tahun 2018 dan akan dilaksanakan tahun 2019, serta yang termuat dalam RKPD Kabupaten Yalimo tahun 2020 lebih banyak berkaitan dengan pengembangan dan optimasi lahan tanaman pangan lokal dan pelatihan-pelatihan pengolahan pangan. Dinas Pertanian dan Pangan khususnya bidang pangan hingga penyusunan RKPD untuk perencanaan tahun 2020 belum menyusun program dan kegiatan secara cermat dan tepat sasaran dalam rangka menyediakan pangan yang bergizi bagi masyarakat Yalimo. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terkesan merupakan kegiatan rutin dan dilakukan berulang-ulang setiap tahunnya. Kegiatan-kegiatan pengembangan pangan masyarakat seharusnya berupa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana bahan pangan khususnya pangan lokal dapat memenuhi kebutuhan petani dan keluarganya dan juga dapat meningkatkan ekonomi keluarganya melalui bahan pangan yang diolah menjadi bentuk olahan (seperti : kripik, selai, cake ubi jalar, dll.) yang dapat dipasarkan". (Wawancara, 25-03-2019).

Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Yalimo, yang mengatakan bahwa :

"Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dinas untuk ketahanan pangan belum nyata terlihat hingga saat ini. Masyarakat di Kabupaten Yalimo masih rentan dengan masalah ketahanan pangan karena kegiatan-kegiatan yang selama ini dilaksanakan hanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dan

belum ada bukti nyata di lapangan. Dinas hanya merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mengejar produksi semata-mata dan berbanding terbalik dengan kondisi ril yang ada". (Wawancara, 06-04-2019).

Hasil wawancara di atas, memperlihatkan bahwa penjabaran berbagai kegiatan ketahanan pangan yang telah dilakukan dan akan dilakukan seperti yang termuat dalam dokumen perencanaan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo lebih banyak diarahkan pada kegiatan-kegiatan optimasi lahan tanaman pangan lokal dan pelatihan pengolahan pangan. Selain itu, berbagai kegiatan yang dilakukan hanya bertujuan mengejar produksi khususnya tanaman pangan dalam upaya menjaga kebutuhan pangan masyarakat dan berbanding terbalik dengan hasil yang diperoleh di lapangan.

Ketua Kelompok Tani Pangkikalo Distrik Elelim, juga mengatakan bahwa :

"Kelompok-kelompok tani setiap tahunnya menerima kegiatan-kegiatan dari Dinas Pertanian dan Pangan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan biasanya sama setiap tahunnya dan bergulir dari kelompok tani yang satu kepada kelompok tani lainnya. Kelompok tani kami jika tidak dapat kegiatan tahun ini (sebagai penerima manfaat kegiatan/CPCL), kami menunggu dan akan mendapatkan kegiatan yang sama pada tahun-tahun berikutnya". (Wawancara, 30-03-2019).

Salah satu Tokoh Adat Kabupaten Yalimo pada kesempatan lainnya juga mengatakan bahwa :

"Dinas Pertanian dan Pangan sudah banyak membantu masyarakat melalui kegiatan-kegiatan khususnya menyediakan pangan lokal untuk masyarakat, tetapi sebagian masyarakat juga kecewa kepada dinas karena banyak proposal-proposal masyarakat yang tidak dijawab oleh dinas. Kelompok-kelompok tani bisa kerja kalau ada kegiatan yang dinas laksanakan, kalau tidak ada kegiatan biasanya petani malas untuk berkebun". (Wawancara, 05-04-2019).

Hasil wawancara di atas, menggambarkan bahwa penjabaran berbagai kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya hampir sama dan dilaksanakan secara bergilir diantara kelompok tani sebagai penerima manfaat kegiatan. Penjabaran berbagai kegiatan didasarkan atas usulan-usulan dalam bentuk proposal yang disampaikan kepada dinas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kelompok tani dalam berusaha tani masih mengharapkan bantuan-bantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Pertanian, yang mengatakan bahwa :

“Kegiatan-kegiatan yang selama ini dilaksanakan khususnya untuk pengembangan tanaman pangan lebih banyak berupa kegiatan optimasi lahan khususnya untuk beberapa komoditi tanaman pangan lokal. Kegiatan optimasi lahan ini bertujuan agar produksi tanaman pangan lokal tetap terjaga. Kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berulang-ulang setiap tahunnya berguna agar ketersediaannya dapat terjaga. Sebenarnya, jangan melihat dari program dan kegiatan dinas hanya dari satu sisi saja, namun harus dilihat secara komprehensif selama periode 5 (lima) tahun sesuai Rencana Strategis yang telah disusun, karena tahapan-tahapannya jelas mulai dari produksi, distribusi dan pemasaran. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan jelas untuk hal tersebut, dimana untuk kegiatan-kegiatan pembangunan ketahanan pangan akan secara langsung terbentuk dalam alur tersebut”. (Wawancara, 15-03-2019).

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan saat dikonfirmasi berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, mengatakan bahwa :

“Kami selaku OPD yang melaksanakan kewenangan tersebut tidak memungkiri hal tersebut. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara berulang-ulang setiap tahunnya merupakan kegiatan prioritas dalam menjaga tetap terjaganya kecukupan pangan bagi masyarakat hingga di pelosok-pelosok kampung. Makanan pokok masyarakat adalah ubi-ubian sehingga kegiatan-kegiatan usahatani lebih banyak

mengarah pada hal tersebut. Selain itu ada kegiatan-kegiatan penunjang dalam upaya memperbaiki aspek budidaya dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan melalui usaha pertanian”. (Wawancara, 22-04-2019).

Pendapat informan di atas, memperjelas bahwa penjabaran kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan beberapa komoditi penunjang ketahanan pangan yang dilaksanakan di Kabupaten Yalimo sebagai upaya menjaga ketersediaan pangan khususnya pangan lokal. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo masih harus menjabarkan berbagai kegiatan-kegiatan penunjang dalam upaya menjaga kualitas produk pangan yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok tani.

c. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan dalam upaya memberikan penilaian terhadap hasil yang telah dilaksanakan atau prestasi yang diperoleh oleh suatu organisasi, dimana evaluasi itu sendiri akan memberikan umpan balik terhadap tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian dan Pangan,
mengemukakan bahwa :

“Evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan ketahanan pangan dilakukan setiap triwulan dengan melihat kemajuan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik dari segi fisik maupun keuangannya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran dilakukan hanya melihat prestasi dari pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok tani penerima manfaat maupun pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan fisik berupa bangunan. Untuk kelompok-kelompok tani yang melaksanakan kegiatan dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan dalam rangka pencairan dana kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok tani. Sementara untuk evaluasi terhadap manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan, dilakukan oleh Bappeda Kabupaten

Yalimo yang selalu melakukan monitoring yang diawali dengan monitoring meja dengan melihat kemajuan fisik dan keuangan dan selanjutnya dengan melihat bukti fisik dilapangan". (Wawancara, 12-03-2019).

Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan, juga mengemukakan bahwa :

"Evaluasi terhadap berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap tahun anggaran dilakukan dengan melihat realisasi baik fisik dan keuangan dan untuk fisik pekerjaan yang dilakukan baik dalam bentuk swakelola maupun pekerjaan konstruksi dilaksanakan setiap triwulan karena Bappeda Kabupaten Yalimo setiap triwulan melakukan monitoring meja untuk melihat kemajuan dari pelaksanaan program dan kegiatan. Setiap triwulan kita mengirim pegawai untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka melihat kemajuan pekerjaan di lapangan. Biasanya banyak masukan-masukan berdasarkan hasil di lapangan yang merupakan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan akan diperbaiki kembali di tahun anggaran berikutnya". (Wawancara, 16-04-2019).

Hasil wawancara di atas, menggambarkan bahwa kegiatan evaluasi telah dilaksanakan secara rutin baik oleh Dinas Pertanian dan Pangan itu sendiri maupun Bappeda Kabupaten Yalimo. Dinas Pertanian dan Pangan secara rutin melakukan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya, dimana jika ditemui kendala dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan akan ditinjau dan diperbaiki kembali di tahun berikutnya.

Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Yalimo, mengemukakan bahwa :

"Evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan khususnya untuk pembangunan sektor ketahanan pangan hanya sebatas melihat target output dari jenis pekerjaan yang dilaksanakan dan belum melihat outcome dari kegiatan tersebut. Kenyataannya, Dinas Pertanian dan Pangan belum menyusun Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) sehingga sangatlah sulit untuk mengukur pola konsumsi

pangan masyarakat. Data NBM dan PPH sangatlah diperlukan dalam memformulasikan berbagai program dan kegiatan khususnya pembangunan sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo". (Wawancara, 25-03-2019).

Sementara itu salah satu Tokoh Adat Kabupaten Yalimo, mengungkapkan bahwa :

"Berbagai bentuk bantuan untuk kebutuhan gizi masyarakat di Kabupaten Yalimo juga berasal dari berbagai dinas yang ada. Dinas Sosial selalu memberikan bantuan sembilan bahan pokok (sembako) untuk masyarakat hingga ke kampung-kampung, Dinas Kesehatan selalu melaksanakan pemberian makanan untuk balita dan ibu hamil. Kegiatan-kegiatan seperti ini dibiayai dari dana Otonomi Khusus dan memang manfaatnya bagi masyarakat Yalimo". (Wawancara, 03-04-2019).

Salah satu anggota DPRD Kabupaten Yalimo, juga mengungkapkan bahwa :

"Kegiatan hearing yang kami lakukan selama ini dengan Dinas Pertanian dan Pangan belum mengevaluasi secara detail pembangunan sektor ketahanan pangan. Evaluasi dengan Dinas Pertanian dan Pangan lebih banyak berbicara produksi dari sektor-sektor lainnya seperti tanaman pangan, peternakan dan perkebunan. Untuk kecukupan pangan masyarakat, jika kita amati masih dalam taraf mencukupi karena banyaknya bantuan-bantuan yang diterima oleh masyarakat melalui dana-dana pemberdayaan masyarakat sampai pada tingkat kampung". (Wawancara, 06-04-2019).

Hasil wawancara terhadap ketiga informan di atas, menunjukkan bahwa evaluasi terhadap berbagai kegiatan hanya terbatas pada keluaran (*output*) dari berbagai program pembangunan ketahanan pangan yang telah dilaksanakan. Data-data dasar dalam mengukur kondisi ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Yalimo belum tersedia. Berbagai jenis bantuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pangan dan gizi masyarakat juga berasal dari Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) lainnya selain Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo yang dibiayai dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Kepala Bidang Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan, dalam kesempatan lain mengungkapkan bahwa :

“Untuk sarana dan prasarana penunjang ketahanan pangan sudah tersedia dan telah terbangun seperti : bangunan lumbung pangan dan lantai jemur, gudang penampungan hasil pertanian, balai-balai penyuluhan pertanian tingkat distrik dan gudang cadangan pangan daerah yang dibangun di Elelim. Bangunan-bangunan ini sudah dibangun sejak bidang pangan yang khusus menangani ketahanan pangan belum dibentuk dan dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian. Jika dilihat pemanfaatannya oleh masyarakat, menunjukkan bahwa belum semuanya dimanfaatkan secara baik oleh kelompok-kelompok tani”. (Wawancara, 15-03-2019).

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo saat dikonfirmasi berkaitan dengan tanggapan beberapa informan di atas, mengungkapkan bahwa :

“Kenyataannya hingga saat ini, evaluasi khusus untuk pembangunan sektor ketahanan pangan belum secara menyeluruh dilakukan dan hanya fokus pada produktivitas dari komoditi yang menunjang ketahanan pangan masyarakat. Untuk data Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH), kami masih melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayawijaya dan saat ini masih dalam proses penyamaan data produksi dan produktivitas khususnya beberapa komoditi seperti : tanaman pangan, peternakan dan perikanan budidaya. Nanti setelah data kami sudah sama dengan data BPS, baru kami lanjutkan dengan penyusunan data NBM dan PPH untuk Kabupaten Yalimo. Untuk lumbung pangan dan lantai jemur, serta sarana penyuluhan yang sudah tersedia, itu merupakan tuntutan pemanfaatan Dana DAK Bidang Pertanian dimana petunjuk pelaksanaannya hanya memungkinkan untuk membangun fasilitas penunjang ketahanan pangan seperti itu. Hal ini yang menyebabkan bahwa sarana penunjang ketahanan pangan sudah terbangun sebelum pembentukan bidang pangan dan dilaksanakan oleh bidang pertanian dengan memaksimalkan penggunaan dana DAK Reguler Bidang Pertanian tersebut”. (Wawancara, 22-04-2019).

Hasil wawancara terhadap kedua informan di atas, secara jelas memberikan gambaran bahwa kegiatan evaluasi yang dilakukan kaitannya dengan pembangunan sektor ketahanan pangan belum efektif. Penyusunan berbagai program dan kegiatan dalam rangka menunjang pembangunan sektor ketahanan pangan tidak berdasarkan kebutuhan riil yang didasarkan pada data-data aktual. Berbagai sarana penunjang ketahanan pangan yang telah terbangun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

2. Penghambat Efektivitas Dinas Pertanian Dan Pangan Dalam Pembangunan Sektor Ketahanan Pangan di Kabupaten Yalimo

Fungsi setiap organisasi berbeda-beda tergantung dari tujuan dan lingkungan dimana organisasi tersebut berada. Setiap organisasi tentunya menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan yang dikehendakinya. Tanggapan informan berkaitan dengan penghambat Dinas Pertanian dan Pangan dalam pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo diuraikan sebagai berikut :

Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian dan Pangan, mengemukakan bahwa :

“Perubahan struktur organisasi menjadi Dinas Pertanian dan Pangan dengan 4 (empat) bidang yang ditangani membawa konsekuensi dibagi-baginya anggaran untuk kegiatan-kegiatan. Kondisi ini mengakibatkan bidang pangan hanya mendapat alokasi anggaran yang sangat kecil. Selain itu, kemampuan kerja khususnya pejabat Eselon 4 yang ditempatkan pada bidang pangan belum mampu memahami tupoksi dengan jelas sehingga masih diperlukan waktu bagi pejabat-pejabat yang ditempatkan tersebut untuk belajar memahami tupoksinya. Disamping itu, para pegawai yang ditempatkan di bidang pangan belum semuanya mampu menggunakan

komputer sehingga sering dibantu dari Sekretariat. Pegawai belum mampu menterjemahkan berbagai program dan kegiatan dan berinovasi dalam mengembangkan ketahanan pangan yang hanya dilaksanakan berdasarkan petunjuk atasan saja". (Wawancara, 12-03-2019).

Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan pada kesempatan lainnya, juga mengemukakan bahwa :

"Untuk penganggaran berbagai kegiatan dinas yang mengacu pada RKPD Kabupaten Yalimo setiap tahunnya, anggaran terbagi-bagi untuk membiayai beberapa bidang yakni : pertanian, peternakan, perkebunan, dan pangan. Sangatlah susah untuk fokus pada kegiatan-kegiatan tertentu karena semua bidang harus jalan dan ada kegiatannya. Selain itu, koordinasi khususnya untuk sektor ketahanan pangan belum terjalin dengan baik antara semua stakeholders. Idealnya bukan dinas saja yang memikirkan permasalahan ini, namun unsur-unsur lain juga harus terlibat dalam memikirkannya antara lain : Tim anggaran, Bappeda selaku badan perencanaan, DPRD khususnya komisi yang membidangi masalah ekonomi, dan Dewan Ketahanan Pangan yang sampai saat ini belum terbentuk di Kabupaten Yalimo". (Wawancara, 16-04-2019).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan di atas, menunjukkan bahwa perubahan nomenklatur dinas memberikan konsekuensi secara langsung terhadap penganggaran kegiatan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo. Hal ini disebabkan karena semua bidang selain Bidang Pangan yang menangani langsung pembangunan sektor ketahanan pangan harus berjalan. Aparatur yang menangani bidang pangan belum memiliki kemampuan dalam berinovasi dan mengembangkan berbagai program dan kegiatan yang berhubungan dengan ketahanan pangan. Selain itu, unsur-unsur lainnya di luar Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo belum sepenuhnya terlibat dalam memajukan sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo.

Sementara salah satu anggota DPRD Kabupaten Yalimo, juga mengungkapkan bahwa :

“Pembahasan anggaran yang kami lakukan baik untuk anggaran induk maupun perubahan, selalu berdasarkan usulan program dan kegiatan yang diajukan oleh TAPD Kabupaten Yalimo. Dalam pembahasan anggaran tersebut, kami tidak pernah melihat kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas dinas, karena kami hanya melihat uraian kegiatan, anggarannya, serta lokasi pelaksanaan kegiatannya”. (Wawancara, 06-04-2019).

Hasil wawancara terhadap informan di atas, memberikan gambaran bahwa penetapan anggaran untuk menunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tidak didasarkan pada skala prioritas dari dinas namun hanya melihat uraian kegiatannya, besarnya anggaran yang dibutuhkan serta lokasi dimana kegiatan itu akan dilaksanakan.

Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Pangan saat dikonfirmasi berkaitan dengan hal di atas, mengemukakan bahwa :

“Luasnya bidang tugas dan kewenangan sesuai struktur organisasi yang mengacu pada Perda Nomor 16 Tahun 2016, mengakibatkan sektor ketahanan pangan belum mendapat perhatian khusus. Selain itu, terkadang tugas-tugas bidang pertanian khususnya tanaman pangan hampir sama dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh bidang pangan, membuat alokasi kegiatan lebih banyak untuk bidang pertanian khususnya tanaman pangan. Sesuai aturan, seharusnya untuk ketahanan pangan yang merupakan urusan wajib terpisah secara organisasi dengan urusan pilihan sehingga dinas yang menangani urusan pilihan khususnya pertanian hanya mengurus bagaimana produksinya sementara dinas yang menangani urusan pangan lebih fokus dalam menjaga ketersediaan pangan. Sedangkan untuk manajemen ketahanan pangan saat ini belum optimal karena belum terbentuknya Dewan Ketahanan Pangan, sehingga belum ada organisasi di luar dinas yang dapat mengontrol maupun mengakomodir kegiatan-kegiatan ketahanan pangan. Inti sebenarnya agar pembangunan ketahanan pangan dapat optimal adalah pembentukan Dinas Ketahanan Pangan agar dinas tersebut lebih fokus dalam menangani permasalahan pangan di Kabupaten Yalimo. Jika masih dalam bentuk satu bidang yang melekat pada Dinas Pertanian dan Pangan, maka pembangunan ketahanan pangan akan sangat lambat dan akan jalan ditempat karena alokasi anggaran

yang terbatas dan dibagi rata kesemua bidang-bidang yang ada".
(Wawancara, 22-04-2019).

Hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa luasnya bidang tugas yang ditangani oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo mengakibatkan sektor ketahanan pangan belum mendapat prioritas khusus. Selain itu, ada kemiripan antara tugas-tugas yang dilaksanakan oleh bidang pertanian dan bidang pangan menyebabkan alokasi kegiatan lebih banyak diperuntukkan untuk pengembangan tanaman pangan yang ditangani langsung oleh bidang pertanian. Manajemen ketahanan pangan belum dilaksanakan secara optimal karena Dewan Ketahanan Pangan belum terbentuk di Kabupaten Yalimo. Penanganan 2 (dua) urusan baik urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo mengakibatkan alokasi anggaran terbagi secara merata kesemua bidang yang ada.

C. Pembahasan

1. Efektivitas Dinas Pertanian Dan Pangan Dalam Pembangunan Sektor Ketahanan Pangan di Kabupaten Yalimo

Pembahasan mengenai organisasi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan modern, dengan asumsi bahwa Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo merupakan organisasi publik yang menganut sistem terbuka dimana unsur-unsurnya yang memiliki saling ketergantungan, memungkinkan terjadinya dinamika, adaptasi, adanya perubahan dan perkembangan dalam organisasi itu sendiri dalam mencapai tujuan bersama. Dalam pendekatan modern, salah satu konsep inti untuk menjelaskan tujuan

organisasi adalah efektivitas. Azhar Kasim (1989) dalam Liestiodono (2004), berpendapat bahwa konstruk efektivitas merupakan unit analisis yang sebagian besar digunakan oleh para peneliti untuk menelaah mengenai seluk beluk organisasi. Beberapa model teori organisasi yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur efektivitas organisasi diantaranya adalah model tujuan rasional. Model tujuan rasional menganggap bahwa organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan secara rasional, dimana diperlukan aturan-aturan, prosedur, birokrasi yang menjalankan tugasnya masing-masing sesuai tata kerja, lingkup wewenang dan tanggung jawab baik fungsional maupun struktural. Model ini menekankan pada dimensi rasionalitas dalam pencapaian tujuan, dengan penekanan pada perumusan tujuan, penjabaran kegiatan, dan evaluasi sebagai komponen organisasi yang strategis.

a. Perumusan Tujuan

Faktor penting dalam mengukur efektivitas suatu organisasi adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai yang menjadi landasan pembentukannya. Merujuk pada nomenklatur sesuai pembentukannya, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo tentunya memiliki tujuan yakni mengembangkan sektor pertanian dalam upaya menunjang pembangunan sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo sebagai organisasi publik dituntut untuk merumuskan tujuan secara jelas sehingga dapat menghasilkan keluaran-keluaran organisasi yang bermanfaat bagi seluruh penduduk yang ada di Kabupaten Yalimo.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo periode tahun 2017-2021, lebih diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas dari sektor-sektor yang dapat mendorong pengembangan usaha tani. Pengembangan produksi dan produktivitas beberapa komoditi khususnya tanaman pangan, tentunya dalam upaya menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat di Kabupaten Yalimo. Proses perumusan tujuan telah melalui serangkaian proses dan dilakukan secara berjenjang melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat kampung, distrik, hingga tingkat kabupaten.

Temuan penelitian ini sesuai pendapat yang dikemukakan oleh Sjafrizal (2014), formulasi tujuan yang ingin dicapai pada dasarnya merupakan gambaran tentang sasaran akhir yang ingin diwujudkan, dimana sasaran tersebut haruslah dijabarkan secara konkrit tentang tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Sementara Azhar Kasim (1989) dalam Liestiodono (2004), mengemukakan bahwa model tujuan rasional senantiasa didasarkan pada anggapan bahwa tujuan organisasi ditentukan oleh pemilik organisasi yang bersangkutan, yaitu orang-orang yang mempunyai hak atau legitimasi terhadap organisasi tersebut. Dalam sektor publik misalnya organisasi pemerintahan yang menjadi pemiliknya adalah publik (masyarakat) terutama warga negara yang mempunyai hak pilih dan hak dipilih.

Temuan penelitian lainnya menunjukkan bahwa formulasi kebijakan dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas

beberapa komoditi khususnya tanaman pangan belum optimal. Hal ini ditandai dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo belum mampu memunculkan komoditi-komoditi unggulan tanaman pangan dalam mendukung pembangunan sektor ketahanan pangan. Peningkatan produksi dan produktivitas beberapa komoditi pertanian dilakukan secara merata dan belum fokus pada pengembangan produk berdasarkan distrik (*one product one village*). Selain itu, temuan penelitian ini, juga mengungkapkan bahwa tujuan dari pemenuhan kebutuhan pangan yang bergizi masih menjadi prioritas kedua dimana prioritas pertama yakni pengembangan beberapa komoditas pendukung ketahanan pangan baik untuk komoditi khususnya tanaman pangan dan dan sektor lainnya yakni peternakan. Tujuan pengembangan komoditi-komoditi yang dilakukan secara merata pada 5 (distrik) yang ada di Kabupaten Yalimo belum mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang sebagian besar masih didatangkan dari luar Kabupaten Yalimo. Sementara untuk komoditi tanaman pangan khususnya padi, tujuan pengembangannya belum dilakukan secara luas dan masih memerlukan waktu dalam pengenalan teknik budidaya serta introduksi teknologinya.

Temuan lainnya juga menunjukkan bahwa Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo dalam perumusan tujuan lebih fokus dalam mengejar target produksi dan produktivitas khususnya sub sektor tanaman pangan yang berbasis kearifan lokal. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Steers dalam Indrawijaya (2002), optimasi terhadap tujuan yang akan dicapai dilakukan bila beberapa tujuan

mendapat alokasi sumber daya dan dana yang lebih besar. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa data produktivitas khususnya beberapa komoditi yang menunjang ketahanan pangan belum memperlihatkan angka produktivitas yang belum optimal. Adapun data peningkatan produktivitas beberapa komoditi penunjang ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo seperti tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Peningkatan Produktivitas
Beberapa Komodi Tanaman Pangan
Di Kabupaten Yalimo

No.	Jenis Komoditi	Tahun 2016 (Ton/Ha)	Tahun 2017 (Ton/Ha)	Peningkatan (Ton/Ha)
1.	Padi	0,98	1,05	0,07
2.	Ubi Jalar	2,13	2,17	0,04
3.	Keladi	2,00	2,06	0,06
4.	Ubi Kayu	3,48	3,75	0,27
5.	Jagung	2,36	2,49	0,13
6.	Kacang Tanah	1,95	2,05	0,10

Sumber : Bappeda Kabupaten Yalimo, Tahun 2019.

Tabel di atas, menunjukkan bahwa perumusan tujuan peningkatan produktivitas khususnya untuk beberapa komoditi tanaman pangan dalam upaya meningkatkan sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo tidak mengalami peningkatan secara signifikan pada tahun 2016 dan 2017. Komoditi ubi jalar yang merupakan sumber pangan utama masyarakat di Kabupaten Yalimo hanya mengalami peningkatan produktivitas sebesar 0,04 ton/ha, sementara komoditi keladi (talas) dan ubi kayu masing-masing mengalami peningkatan produktivitas sebesar 0,06 ton/ha dan 0,27 ton/ha. Sementara untuk komoditi padi hanya mengalami peningkatan produktivitas sebesar 0,07 ton/ha. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo

dalam perumusan tujuan pembangunan sektor ketahanan pangan belum efektif, karena sasaran dan target yang ingin dicapai dari pengembangan beberapa komoditi tanaman pangan belum memberikan menunjukkan produktivitas yang optimal.

Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Syamsi (2000), bahwa tujuan-tujuan haruslah dirumuskan secara rinci yang kemudian dijabarkan dalam bentuk tugas pokok yang dijadikan sebagai pedoman bagi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan nantinya. Selain itu, perumusan tujuan akan memberikan legitimasi dalam membenarkan segala kegiatan yang akan dilaksanakan. Perumusan tujuan juga sebagai standar pelaksanaan yang mengikat segala kegiatan harus berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sementara itu, temuan dalam penelitian ini relevan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putradyanto, dkk. (2015), yang menyimpulkan bahwa peningkatan produktivitas yang dilakukan oleh dinas pertanian dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional terhambat dikarenakan faktor-faktor yaitu : tingkat kehilangan hasil yang masih cukup tinggi, masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian dalam negeri, lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi dan pasar, permodalan serta perlindungan usaha tani. Selain itu, belum optimalnya pelayanan pada sektor perbenihan dan pengawasan tanaman, terbatasnya penerapan alsintan, belum optimalnya kelembagaan petani, dan tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian menjadi penghambat dinas pertanian dalam peningkatan

produktivitas hasil-hasil pertanian. Sementara penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Nazalyus (2012), menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara mekanisme perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan, dan aplikasi perencanaan sebagai tolak ukur yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Wibowo (2016), yang mengemukakan bahwa tujuan tidak lain merupakan apa yang diharapkan untuk dicapai oleh suatu organisasi. Perumusan tujuan haruslah didasarkan pada target atas hasil yang dapat dicapai secara kuantitatif dan dapat diukur. Perumusan tujuan adalah rangkaian proses yang dilakukan dari atas ke bawah yang dimulai dari strategi organisasi untuk mencapainya. Kekuatan nyata dalam perumusan tujuan organisasi adalah pada keselarasan antar bagian dengan maksud tertinggi dari organisasi. Setiap pekerja harus memahami tujuannya dan melakukan aktivitas membantu tujuan unit kerja, serta aktivitas dari unit-unit kerja ini memberikan kontribusi secara langsung pada sasaran strategi organisasi. Sedangkan pendapat lainnya seperti yang dikemukakan oleh Steers (2005), bahwa setiap organisasi berhadapan dengan berbagai keterbatasan sehingga tidak semua organisasi dapat memaksimalkan tujuannya. Optimalisasi terhadap perumusan tujuan organisasi haruslah disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia, sehingga optimalisasi merupakan sarana penyeimbang berbagai tujuan yang bertentangan,

sehingga setiap tujuan menerima cukup perhatian dan sumber daya yang selaras dengan tingkat kepentingan bagi organisasi.

b. Penjabaran Kegiatan

Pelaksanaan dari berbagai program pembangunan sektor ketahanan pangan merupakan penjabaran dari berbagai kegiatan. Penjabaran berbagai kegiatan tersebut sebagai instrumen dari kebijakan-kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan. Berkaitan dengan temuan dalam penelitian ini, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo telah menjabarkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sektor ketahanan pangan. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan lebih diarahkan untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat khususnya pangan lokal.

Penjabaran berbagai kegiatan pembangunan sektor ketahanan pangan yang dilaksanakan setiap tahunnya lebih banyak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengembangan dan optimasi lahan tanaman pangan lokal dan pelatihan-pelatihan pengolahan pangan, dimana terkesan merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahunnya. Temuan lainnya menunjukkan bahwa penjabaran kegiatan pembangunan sektor ketahanan pangan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo belum memberikan hasil nyata. Hal ini ditunjukkan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan hanya untuk mengejar produksi semata-mata dan berbanding terbalik dengan kondisi ril yang terjadi. Kegiatan-kegiatan berupa optimasi lahan tanaman pangan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk

pengembangan pangan hanya sebagai cara untuk mempertahankan ketersediaan pangan khususnya pangan lokal.

Temuan penelitian ini tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Subejo, dkk. (2014), bahwa efisiensi dan produktivitas pertanian berkaitan erat dengan bagaimana akses petani terhadap sumber daya produksi yang terdiri dari lahan, benih, pupuk dan air. Kegiatan-kegiatan peningkatan akses petani dalam mendukung ketahanan pangan perlu diperkuat dengan sistem pendanaan yang cukup dan birokrasi yang sederhana. Selain itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah akses informasi dan teknologi baru pertanian. Berbagai program harus diarahkan pada pengaktifan kelompok dan asosiasi petani serta kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian. Keterpaduan penelitian, pengembangan dan penyuluhan pertanian menjadi sangat penting artinya dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian sebagai upaya mendukung kedaulatan pangan.

Spesialisasi terhadap suatu produk pertanian pada dasarnya memegang peranan penting karena semakin mampu dalam memproduksi komoditi spesial, maka spesialisasi itu sendiri dapat terbentuk karena keunikan produk dan kualitasnya. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo dalam menunjang ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo haruslah secara serius mendukung penuh petani sebagai penghasil dengan berbagai program dan kegiatan yang mengarah pada terciptanya efisiensi dan produktivitas hasil pertanian yang tinggi.

Dokumen RPJMD Kabupaten Yalimo tahun 2016-2021, telah memuat secara tegas isu-isu strategis yang berkaitan dengan bidang pangan. Isu-isu strategis yang termuat dalam dokumen tersebut menyebutkan bahwa : (1) Rendahnya tingkat ketahanan pangan yang teridentifikasi dengan masih adanya kerentangan dan kerawangan pangan di daerah-daerah distrik/kampung pelosok; (2) Belum terciptanya swasembada pangan; (3) Belum berkembangnya upaya keanekaragaman atau diversifikasi pangan lokal; dan (4) Penggunaan teknologi pangan yang belum memadai. Isu-isu strategis tersebut tentunya dirumuskan melalui proses identifikasi dari berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan mempengaruhi agenda pembangunan lima tahunan di Kabupaten Yalimo. Namun kenyataannya, temuan penelitian ini membuktikan bahwa Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo belum mampu menjabarkan kegiatan dalam menunjang pembangunan sektor ketahanan pangan. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai yang termuat dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo tahun 2017-2021 lebih diarahkan pada terciptanya pengelolaan dan pemanfaatan SDA pertanian secara merata berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian rakyat.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo kenyataannya, lebih banyak menjabarkan kegiatan-kegiatan berupa intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai upaya mengatasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan

ketahanan pangan. Adapun strategi, arah kebijakan dan program yang dilaksanakan dalam upaya mendukung pembangunan sektor ketahanan pangan sesuai yang termuat dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo tahun 2017-2021 seperti tabel berikut ini.

Tabel 5.2
Strategi, Arah Kebijakan dan Program Yang Dilaksanakan
Dalam Mendukung Pembangunan Sektor Ketahanan Pangan
di Kabupaten Yalimo

Strategi	Arah Kebijakan	Program Yang Dilaksanakan
Pengembangan potensi dan pengelolaan produk pertanian tanaman pangan yang bermutu	Intensifikasi dan ekstensifikasi produk pertanian unggulan	<ul style="list-style-type: none"> - Program peningkatan ketahanan pangan - Program peningkatan kesejahteraan petani - Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan - Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan - Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
Pengembangan potensi dan pengelolaan produk peternakan	Intensifikasi dan ekstensifikasi produk peternakan unggulan	<ul style="list-style-type: none"> - Program peningkatan produksi hasil peternakan - Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo, Tahun 2019.

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo hingga akhir tahun 2021 adalah pengembangan potensi dan pengelolaan produk baik pada sub sektor tanaman pangan maupun sektor peternakan. Arah kebijakan ini tentunya untuk mengatasi berbagai permasalahan ketahanan pangan yang terjadi di Kabupaten Yalimo. Pejabaran berbagai

kegiatan yang telah dilaksanakan lebih diarahkan untuk kegiatan-kegiatan pengembangan potensi khususnya untuk sub sektor tanaman pangan. Melalui pengembangan potensi dan pengolahan produk khususnya sub sektor tanaman pangan, tentunya akan memberikan kontribusi secara langsung terhadap terbentuknya ketersediaan pangan bagi masyarakat di Kabupaten Yalimo.

Temuan dalam penelitian ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sjafrizal (2014), bahwa program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah pada dasarnya merupakan tindakan untuk dapat melaksanakan kebijakan yang telah diambil sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Penetapan berbagai kegiatan haruslah secara baik dan tepat guna sehingga dapat mendorong proses pembangunan daerah. Pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan tentunya memerlukan biaya yang cukup besar, sementara kemampuan dan kapasitas dana pemerintah daerah sangat terbatas sehingga diperlukan penetapan prioritas pembangunan yang sangat tajam terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Penentuan prioritas menjadi sangat penting dalam rangka menjamin besarnya manfaat yang diperoleh dari suatu proses pembangunan. Sementara Rachman dan Ariani (2002), mengemukakan bahwa manfaat dari pembangunan itu sendiri ditandai dengan adanya peningkatan pada fasilitas yang dapat dinikmati oleh masyarakat dan adanya perubahan perilaku dan kelembagaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sektor ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan karena pangan itu sendiri

merupakan kebutuhan dasar bagi manusia dan sekaligus dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ketahanan pangan dapat dimaknai sebagai tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga yang terjangkau, serta aman dikonsumsi bagi setiap warga dalam menopang aktivitasnya sehari-hari.

Salah satu kerangka regulasi yang terkait dengan pembangunan ketahanan pangan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana implementasi ketahanan pangan itu sendiri diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang merupakan penjabaran lebih merinci pengaturan baik aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan sesuai amanat undang-undang tersebut. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo berdasarkan data yang termuat dalam dokumen Rencana Strategisnya, belum berupaya memantapkan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan pangan. Adapun 3 (tiga) aspek pokok yang perlu diperhatikan sebagai bentuk perwujudan ketahanan pangan, yaitu : ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo sesuai kerangka regulasi ketahanan pangan haruslah berperan dalam meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan,

distribusi dan akses pangan, keragaman konsumsi dan keamanan pangan terhadap pangan lokal, dan penanganan rawan pangan pada masyarakat miskin.

c. Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap suatu hasil kerja atau prestasi yang dapat dicapai. Evaluasi merupakan proses identifikasi dalam mengukur atau menilai apakah penjabaran berbagai kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi itu sendiri akan memberikan umpan balik terhadap pencapaian baik tujuan maupun sasaran. Evaluasi sangat dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas organisasi dimana akan secara jelas diketahui tingkat kemajuan suatu kegiatan, tingkat pencapaian suatu kegiatan sesuai tujuannya, serta hal-hal yang harus dilakukan di masa yang akan datang.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan sektor ketahanan pangan dilakukan secara triwulan baik dari segi realisasi fisik maupun keuangannya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok tani maupun oleh pihak ketiga sebagai penyedia jasa konstruksi dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan dalam rangka pencairan dana kegiatan. Bappeda Kabupaten Yalimo juga secara kontinu melakukan monitoring yang diawali dengan monitoring meja dan selanjutnya monitoring lapangan. Selain itu, Dinas Pertanian dan Pangan

Kabupaten Yalimo juga melakukan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan akan menjadi masukan guna perbaikan ditahun berikutnya.

Temuan lainnya berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pembangunan sektor ketahanan pangan yang dilaksanakan di Kabupaten Yalimo hanya melihat target *output* dari pekerjaan yang dilaksanakan dan belum melihat *outcome* dari kegiatan tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa lemahnya perencanaan yang dilakukan karena perencanaan itu sendiri tidak didasarkan pada data-data dasar berdasarkan kondisi ril yang terjadi dilapangan. Hingga saat ini Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo belum memiliki data Neraca Bahan Makanan (NBM), dan data Pola Pangan Harapan (PPH) sehingga sangat sulit untuk mengukur pola konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Yalimo. Selain itu, belum tersedianya peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan (*food security and vulnerability atlas*) mengakibatkan tidak terarahnya berbagai program dan kegiatan pengembangan tanaman pangan di Kabupaten Yalimo.

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo hanya mengejar target produksi dari berbagai sektor, sehingga hanya fokus pada produktivitas dari beberapa komoditi yang menunjang ketahanan pangan yang dilakukan merata pada semua distrik. Sedangkan sarana dan prasarana penunjang ketahanan pangan seperti : lumbung pangan dan lantai jemur, gudang penampungan hasil pertanian, dan gudang cadangan

pangan daerah yang telah dibangun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal oleh kelompok-kelompok tani.

Temuan dalam penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ariani (2007), yang menyimpulkan bahwa penguatan ketahanan pangan daerah dilakukan melalui advokasi kembali yang lebih intensif kepada pemerintah daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, dimana pemerintah daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan di daerah dengan terus berupaya untuk mensosialisasikan kelembagaan ketahanan pangan yang telah terbentuk dan mendorong keikutsertaan swasta dan masyarakat yang turut berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan di daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sunarminto (2015), bahwa ketahanan pangan merupakan strategi bagi stabilitasi pangan yang secara lebih substantif dapat dipahami sebagai regulasi untuk memelihara dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dikarenakan pentingnya pangan bagi kehidupan manusia. Memperhatikan dan melibatkan dimensi mental petani sudah selayaknya dilakukan demi pencapaian ketahanan pangan yang lestari. Mendorong dan memupuk semangat mental petani untuk menjalankan profesi pertanian secara sadar dan bertanggung jawab akan berimplikasi pada peningkatan produktivitas pertanian. Melalui penguatan efikasi kolektif petani, keyakinan akan suksesnya pertanian di kalangan para petani dapat dibangkitkan hingga mereka mampu untuk berkontribusi secara optimal bagi penegakan ketahanan pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan dalam Bab VI Pasal 13 ayat 1 telah tertulis secara jelas bahwa Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan di Kabupaten Yalimo akan memberikan peran strategis dalam mengembangkan berbagai program dan kegiatan ketahanan pangan yang komprehensif serta berkesinambungan dalam rangka memantapkan ketahanan pangan sesuai amanat Peraturan Pemerintah tersebut.

2. Penghambat Efektivitas Dinas Pertanian Dan Pangan Dalam Pembangunan Sektor Ketahanan Pangan di Kabupaten Yalimo

a. Ciri Organisasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perubahan nomenklatur Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo dengan lingkup kewenangan yakni urusan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan ketahanan pangan memberikan dampak secara langsung terhadap luasnya bidang tugas yang harus ditangani. Kondisi ini mengakibatkan urusan sektor ketahanan pangan tidak mendapat prioritas utama karena Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo sesuai tujuan dan sasarannya yang mengacu pada Rencana Strategis periode tahun 2017-2021 hanya mengejar target produksi dan produktivitas sektor-

sektor lainnya yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo, sehingga alokasi kegiatan dan anggaran lebih sedikit untuk bidang pangan dibandingkan bidang lainnya.

Temuan penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hanafi (2015), bahwa perubahan struktur organisasi dimana terjadi pembengkakan dari struktur sebelumnya yang tidak mencerminkan struktur organisasi yang miskin struktur namun kaya fungsi, mengakibatkan fungsi-fungsi pada suatu organisasi yang belum berjalan dengan baik akan sulit dalam menetapkan target berdasarkan data potensi yang senyatanya.

Struktur organisasi yang efektif akan membentuk tingkat koordinasi dan motivasi yang efisien sehingga mekanisme kerja dapat mencapai hasil kerja yang lebih optimal. Struktur organisasi merupakan suatu cara yang selaras dalam menempatkan manusia sebagai bagian dari organisasi pada suatu pola hubungan yang relatif tetap. Hal ini akan sangat menentukan terjadinya pola-pola koordinasi dan tingkah laku yang hanya berorientasi pada tugas. Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Yalimo, menyebabkan luasnya lingkup tugas yang harus dilaksanakan dan tidak diimbangi dengan kesiapan dari sumber daya manusia (aparatur) yang dimilikinya. Pegawai yang ditempatkan dalam menangani langsung pembangunan sektor ketahanan pangan belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsinya

sehingga memerlukan waktu dalam menterjemahkan berbagai program dan kegiatan serta berinovasi dalam mengembangkan ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Steers (2005), bahwa mengenai struktur, ditemukan bahwa meningkatnya produktivitas dan efisiensi sering merupakan hasil dari meningkatnya spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan, dan formalisasi.

Berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa struktur organisasi yang ada saat ini kurang efektif dalam menunjang pembangunan sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo. Efektivitas dari bidang pangan yang menangani permasalahan pangan yang masih rendah akan secara langsung mempengaruhi efektifitas organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo secara keseluruhan. Selain itu, faktor kemampuan sumber daya manusia dalam penanganan ketahanan pangan yang masih rendah juga secara langsung menghambat pelaksanaan tugas dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

b. Ciri Pekerja

Aspek sumber daya manusia merupakan komponen yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas organisasi. Organisasi haruslah tanggap dalam mengantisipasinya, sebab kalau tidak maka akan berakibat fatal bagi organisasi. Pencapaian tujuan suatu organisasi juga sangatlah dipengaruhi oleh kemampuan pekerjanya, sebab sasaran atau hasil akhir yang ingin dicapai tergantung dari kekuatan sumber daya manusianya.

Aspek ini menentukan efektivitas organisasi karena pada dasarnya organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia yang menyusun tujuan-tujuan, melakukan berbagai inovasi dan berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pegawai yang ditempatkan pada bidang yang menangani sektor ketahanan pangan belum sepenuhnya mampu menjabarkan kegiatan-kegiatan ketahanan pangan dan berinovasi dalam mengembangkan sektor pangan di Kabupaten Yalimo. Bidang pangan lebih banyak menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengembangan sub sektor tanaman pangan, sehingga alokasi kegiatan dan anggaran lebih banyak untuk pengembangan sub sektor ini. Motivasi pegawai yang masih rendah dalam mengembangkan sektor ketahanan pangan sangat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Para pegawai yang ditempatkan pada bidang pangan bukannya berusaha mencari terobosan-terobosan baru dalam pengembangan pangan tetapi hanya berusaha mengejar target produksi saja. Temuan lainnya menunjukkan bahwa pejabat eselon 4 (empat) sebagai pejabat pelaksana yang dilantik menempati jabatan struktural setelah terbentuknya bidang pangan memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyesuaikan diri dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini yang menyebabkan semakin tidak efektifnya pembangunan sektor

ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo dikarenakan kemampuan aparaturnya sebagai pelaksana yang masih sangat terbatas.

Hasil pengamatan juga memperlihatkan bahwa para pegawai pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo tidak termotivasi untuk meningkatkan prestasinya. Komitmen para pegawai untuk lebih mengoptimalkan tujuan organisasi secara keseluruhan masih kurang. Hal ini terlihat dari motivasi para pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo hanya berorientasi pada pencapaian target yang telah ditetapkan dan insentif yang diberikan setiap triwulannya. Sementara tujuan organisasi secara keseluruhan seperti mengoptimalkan peran dinas dalam penyediaan pangan masyarakat, melakukan terobosan-terobosan dalam pemenuhan kebutuhan pangan, serta langkah-langkah antisipatif jika terjadi kerawangan pangan di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Yalimo. Lemahnya komitmen pegawai pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo terhadap tujuan organisasi yang ditandai dengan disiplin pegawai yang masih sangat rendah. Kurangnya komitmen pegawai ini mengakibatkan tujuan organisasi secara keseluruhan tidak akan tercapai sehingga secara langsung akan menghambat efektivitas organisasi.

Temuan penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanafi (2015), bahwa motivasi para pegawai dalam meningkatkan kinerjanya yang masih rendah sangatlah dipengaruhi antara lain oleh adanya pendapatan lain berupa insentif yang diterima setiap bulannya dengan besaran yang sama diantara para pegawai.

Keadaan ini tidak mencerminkan tuntutan suatu organisasi yang efektif. Selain itu, temuan penelitian ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Steers (2005), bahwa sarana pokok untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan ini dari pekerja adalah mengintegrasikan tujuan pribadi dengan sasaran organisasi. Kunci keberhasilan organisasi adalah diakuinya oleh para manajer hubungan tukar menukar antara organisasi dengan para anggotanya, dimana kedua belah pihak saling membantu sebagai imbalan atas pertolongan yang diberikan oleh pihak lainnya dalam mengejar sasaran masing-masing.

Pada kenyataannya para anggota organisasi mungkin merupakan faktor penting atas efektivitas karena perilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintangai tercapainya tujuan organisasi. Kesadaran akan sifat perbedaan pribadi yang terdapat di antara pekerja sangat penting artinya karena pekerja yang berbeda memberikan tanggapan dengan cara yang berbeda pula atas usaha-usaha manajemen untuk mencapai usaha yang diarahkan ke tujuan.

c. Kebijakan dan Praktik Manajemen

Kebijakan dan praktik manajemen merupakan pengarahan kegiatan-kegiatan secara proporsional untuk mencapai tujuan. Tujuan organisasi harus tercapai atas pengarahan kegiatan-kegiatan secara teratur, dimana langkah-langkah strategis harus dirumuskan melalui suatu proses perencanaan yang strategis. Pengarahan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan agar tercapai tingkat koordinasi yang teratur dalam menjamin mekanisme kerja.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kebijakan-kebijakan khususnya untuk pembangunan sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo belum efektif. Koordinasi untuk pembangunan sektor ketahanan pangan belum terjalin dengan baik yang ditunjukkan dengan unsur-unsur lainnya di luar Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo belum fokus memikirkan permasalahan ketahanan pangan. Belum terbentuknya Dewan Ketahanan Pangan hingga saat ini, menyebabkan tidak optimalnya kebijakan-kebijakan dan manajemen ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo. Dewan ketahanan pangan sebagai badan yang memutuskan sesuatu bahan kebijakan ketahanan pangan di daerah dengan cara berkomunikasi dan bermusyawarah untuk mencapai mufakat memiliki peran strategis dalam pembangunan sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo. Dewan ketahanan pangan sebagai lembaga non struktural yang ada di tingkat kabupaten bertugas membantu Bupati dalam perumusan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah dan merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan di daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian dan Pangan belum efektif dalam pelaksanaan pembangunan sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo. Tujuan dari pembangunan sektor ketahanan pangan secara rasional belum tercapai, yang ditandai oleh :
 - a. Perumusan tujuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo dalam pembangunan sektor ketahanan pangan belum efektif, dimana tujuan yang telah dirumuskan lebih difokuskan dalam mengejar target produksi dan produktivitas khususnya sub sektor tanaman pangan yang berbasis kearifan lokal. Kenyataan menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum memberikan dampak secara langsung dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat di Kabupaten Yalimo.
 - b. Penjabaran berbagai kegiatan khususnya dalam menunjang pembangunan sektor ketahanan pangan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo lebih banyak diarahkan untuk kegiatan-kegiatan pengembangan dan optimalisasi lahan tanaman pangan yang terkesan dilakukan berulang-ulang setiap tahunnya, namun angka produksi dan produktivitasnya belum mampu menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat di Kabupaten Yalimo. Hal ini mengindikasikan

bahwa kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan belum efektif dalam mencapai sasaran yang diinginkan yakni terpenuhinya kebutuhan pangan khususnya pangan lokal bagi masyarakat di Kabupaten Yalimo.

- c. Evaluasi yang dilakukan hanya melihat target *output* dari kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Data-data dasar seperti : data Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) yang digunakan sebagai dasar dalam mengukur pola konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Yalimo belum tersedia. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo hanya mengejar target produksi, sehingga hanya fokus pada produktivitas dari beberapa komoditi yang menunjang ketahanan pangan. Perencanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan sektor ketahanan pangan tidak efektif karena tidak didasarkan pada data-data riil sesuai dengan kebutuhan khususnya komoditi tanaman pangan yang dikembangkan.

2. Beberapa hal yang menjadi penghambat efektivitas Dinas Pertanian dan Pangan dalam pembangunan sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo sebagai berikut :

- a. Ciri organisasi, dimana luasnya bidang tugas dan kewenangan sesuai struktur organisasi mengakibatkan pembangunan sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo tidak menjadi prioritas utama, sehingga alokasi kegiatan dan anggaran lebih sedikit untuk bidang pangan dibandingkan bidang-bidang lainnya.
- b. Ciri pekerja, menunjukkan bahwa kemampuan dan motivasi pegawai yang menangani sektor ketahanan pangan yang masih rendah. Pegawai

yang ditempatkan pada bidang pangan belum sepenuhnya mampu menjabarkan kegiatan-kegiatan ketahanan pangan dan berinovasi dalam mengembangkan sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo.

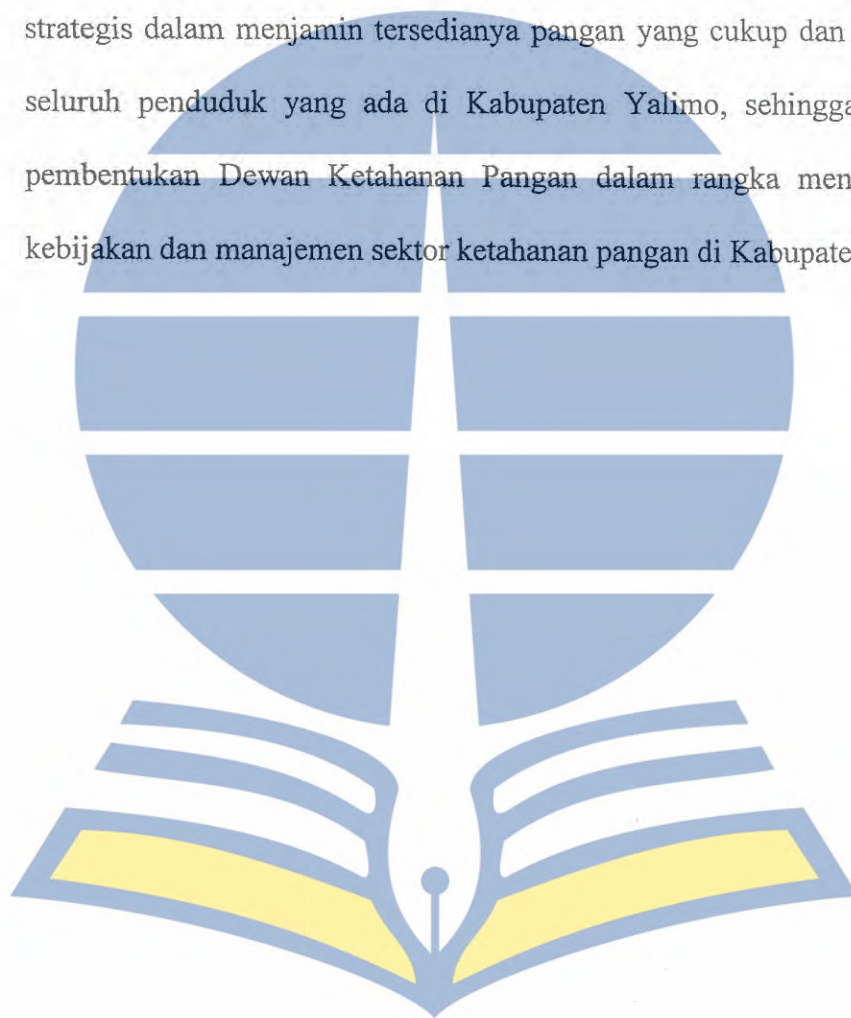
- c. Kebijakan dan praktik manajemen, yang ditandai dengan belum terjalinnnya koordinasi antar berbagai unsur yang berasal dari luar Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo. Kondisi ini disebabkan oleh belum terbentuknya Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah untuk mengoptimalkan kebijakan dan manajemen ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo. Dewan Ketahanan Pangan sebagai lembaga non struktural memiliki peran strategis dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah dan merumuskan berbagai kebijakan dalam mendorong keikutsertaan berbagai pihak dalam penyelenggaraan ketahanan pangan di daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo dalam pelaksanaan pembangunan sektor ketahanan pangan perlu mengidentifikasi tujuan pembangunan sesuai data-data dasar yang ada. Penyusunan NBM, PPH dan peta ketahanan dan kerentanan pangan merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam rangka menjamin terlaksananya pembangunan sektor ketahanan pangan yang tepat sasaran.

2. Diperlukan pemisahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan bidang urusan yang ditangani dan penempatan pegawai yang memiliki kompetensi dalam menangani secara langsung sektor ketahanan pangan.
3. Sektor ketahanan pangan yang merupakan urusan wajib memiliki peran strategis dalam menjamin tersedianya pangan yang cukup dan bergizi bagi seluruh penduduk yang ada di Kabupaten Yalimo, sehingga diperlukan pembentukan Dewan Ketahanan Pangan dalam rangka mengoptimalkan kebijakan dan manajemen sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abdoellah, S., Oekan. (2016). *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia (Di Persimpangan Jalan)*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Anoraga, Panji dan Widiyanti, Ninik. (2000). *Psikologi Dalam Efektifitas Organisasi, Seri Manajemen No. 47*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Budihardjo, Andreas. (2011). *Organisasi Menuju Pencapaian Kinerja Optimum (Sintesis Teori Untuk Menungkap Kotak Hitam Organisasi)*. Jakarta: Penerbit Prasetiya Mulya Publishing.
- Bungin, Burhan, M., H. (2009). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Elliott, J. A. (2006). *An Introduction to Sustainable Development*. Thi-rd Edition. London-New York : Routledge.
- Hamdi, Muchlis. dan Ismaryati, Siti. (2016). *Buku Materi Pokok Metodologi Penelitian Administrasi Edisi 2*. Jakarta : Penerbit Universitas Terbuka. h. 7.17-8.37.
- Hardjito, Dydiet. (2010). *Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, P. S., Malayu. (2016). *Organisasi dan Motivasi (Dasar Peningkatan Produktivitas)*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Indrawijaya, I. Adam. (2002). *Perilaku Organisasi (Cekatan Ketujuh)*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo.
- Kusdi. (2017). *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Lubis, Hari, S., B. dan Huseini, Martani. (2009). *Teori Organisasi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Manullang, M. (2008). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Mappadjantji, Amien. (2005). *Kemandirian Lokal : Konsepsi Pembangunan, Organisasi dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Moleong, L. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
- Muljarijadi, Bagdja. (2011). *Pembangunan Ekonomi Wilayah : Pendekatan Analisis Tabel Input-Output*. Bandung: Penerbit Unpad Press.
- Ngusmanto, H. (2017). *Teori Perilaku Organisasi Publik*. Pontianak: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Nugroho, Riant, Dr. dan Wrihatnolo R. Randy. (2011). *Manajemen Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit PT. Alex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. (2002). *Metode Penelitian Administrasi (Untuk Organisasi Profit dan Non Profit)*. Makassar: Penerbit Lembaga Penerbitan Unhas.
- Prasojo, Eko.; Ridwan, Irfan.; Kurniawan, Teguh.; dan Karyana, Ayi. (2016). *Buku Materi Pokok Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Purwanto, Joko, Agus. dan Elu, B. Wilfridus. (2017). *Inovasi dan Perubahan Organisasi. Buku Materi Pukok MAPU5104*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka. h. 7.3-7.16.
- Robbins, P., Stephen. (2015). *Teori Organisasi : Struktur, Desain dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Arcan.
- Siagian, P., Sondang. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.
- Sjamsir, Zulkifli. (2017). *Pembangunan Pertanian Dalam Pusaran Kearifan Lokal*. Makassar: Penerbit CV. Sah Media.
- Steers, M., Richard. (2005). *Efektivitas Organisasi (Terjemahan)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Subejo.; Arifa, Sauda, Nur; Mustafa. H., M. (2014). *Lima Pilar Kedaulatan Pangan Nasional*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sunarminto, Hendro, Bambang. (2015). *Pertanian Terpadu Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.

Syamsi, Ibnu, S., U. (2000). Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen. Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta.

Toha, Miftah. (2012). Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.

Wibowo. (2016). Manajemen Kinerja (Edisi Kelima). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Widodo, Joko. (2009). Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik). Malang: Penerbit Bayumedia Publishing.

Jurnal, Hasil Penelitian dan Seminar Akademik :

Achmad Rofai. 2006. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Semarang: Tesis Universitas Diponegoro.

Ariani, Mewa. 2007. Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Fakih, Mansour. 2010. Krisis dan Bencana Pembangunan. Jurnal Ilmu Sosial Transformatif. Edisi 7 Tahun II 2010. Penerbit Insist Press.

Hendrik Kambu. 2011. Efektivitas Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sorong. Yogyakarta: Tesis Universitas Gadjah Mada.

Lalu Dirjaharta. 2001. Efektivitas Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yogyakarta: Tesis Universitas Gadjah Mada.

Lalu Toyib Busyairi. 2014. Efektivitas Organisasi Inspektorat Dalam Melakukan Tugas Pengawasan di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Jakarta: Tesis Universitas Terbuka.

Liestiodono, B. Irianto. 2004. Efektivitas Organisasi (Tinjauan Pustaka). Seminar Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Terbuka Jakarta.

Nazalyus. 2012. Efektivitas Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jakarta: Tesis Universitas Terbuka.

Purwaningsih, Yunastiti. 2008. Ketahanan Pangan : Situasi dan Permasalahan. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Volume 9 No, 1 (hal. 1-26).

Putradyanto, Eric, dkk., 2015. Efektivitas Peran Dinas Pertanian Provinsi Dalam Menentukan Kebijakan Mengenai Produktivitas Pertanian Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Rachman, P., S., Handewi dan Arini, Mewa. 2002. Ketahanan Pangan : Konsep, Pengukuran dan Strategi. Jurnal FAE. Volume 20 No. 1 (hal. 12-24).

Undang-Undang dan Peraturan :

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 2012).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014).

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2002).

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015).

Peraturan Daerah Kabupaten Yalimo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Yalimo Tahun 2016-2021.

Peraturan Bupati Kabupaten Yalimo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo Tahun 2017-2021.

Sumber Lainnya :

Enam penyakit birokrasi di Indonesia. Diambil 11 Oktober 2018, dari situs World Wide Web:

<http://www.beritasatu.com/nasional/485766-ini-enam-penyakit-birokrasi-di-indonesia.html>

Pengertian pembangunan menurut para ahli. Diambil 20 Oktober 2018, dari situs World Wide Web:

<http://pengertiandefinisi.com/pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli/>

Lampiran 1. Transkrip Hasil Wawancara

Informan : Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian dan Pangan

Tanggal Wawancara : Selasa, 12 Maret 2019

Tempat Wawancara : Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo

1. Menurut pendapat Bapak, bagaimanakah arah pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo ?

Tanggapan Informan :

Arah pembangunan khususnya sektor ketahanan pangan yang saat ini dilaksanakan lebih diarahkan pada bagaimana menyediakan pangan yang cukup dan bergizi bagi seluruh penduduk Kabupaten Yalimo. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) periode 2016-2021 telah memuat secara jelas pemanfaatan lahan untuk pengembangan tanaman pangan unggulan yakni seluas ± 44.750 Ha yang diperuntukkan bagi pengembangan padi sawah, padi ladang, sagu, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Selain itu pengembangan komoditi unggulan untuk sektor peternakan seluas ± 5.501 Ha dan perikanan seluas $\pm 8,342$ Ha untuk pengembangan perikanan budidaya akan secara langsung memenuhi kebutuhan akan kecukupan pangan yang seimbang dan bergizi untuk seluruh penduduk.

2. Menurut pendapat Bapak, Rencana Strategis Dinas Pertanian telah memuat secara jelas arah dan tujuan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo ?

Tanggapan Informan :

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo tahun 2017-2021, pada kenyataannya lebih diarahkan pada peningkatan produktivitas dari sektor-sektor yang dapat mendorong pengembangan usaha tani masyarakat. Hal ini tentunya dapat dimengerti bahwa pembentukan Bidang Pangan yang menangani khusus ketahanan pangan baru terbentuk dengan adanya perubahan

nomenklatur dinas menjadi Dinas Pertanian dan Pangan yang efektif mulai tahun 2017.

3. Apa saja kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan khususnya dalam pengembangan ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo ?

Tanggapan Informan :

Untuk pengembangan ketahanan pangan, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sejak terbentuknya bidang pangan yakni pelatihan-pelatihan berkaitan dengan pengolahan pangan, pengembangan pangan lokal, pengembangan diversifikasi tanaman pangan, pembangunan lumbung pangan, penanganan daerah-daerah yang teridentifikasi rawan pangan, dan pengangkatan tenaga kontrak untuk melakukan penyuluhan pertanian dalam rangka menjaga produksi komoditi tanaman pangan.

4. Apakah kegiatan-kegiatan pembangunan ketahanan pangan merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Yalimo ?

Tanggapan Informan :

Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan lebih banyak untuk menjaga ketersediaan pangan bagi penduduk di Kabupaten Yalimo yang tinggal di kampung-kampung. Tuntutan masyarakat baik melalui Musrenbang di tingkat distrik dan tingkat kabupaten mengharapkan kami untuk lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang membantu masyarakat dalam mengolah pangan lokal. Kamipun telah melakukannya namun karena terbatasnya dana sehingga belum dapat dilakukan pada semua distrik yang ada di Kabupaten Yalimo.

5. Apakah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo selalu melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan ketahanan pangan dan bentuk evaluasinya seperti apa ?

Tanggapan Informan :

Evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan ketahanan pangan dilakukan setiap triwulan dengan melihat kemajuan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik dari segi fisik maupun keuangannya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran dilakukan hanya melihat prestasi dari

pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok tani penerima manfaat maupun pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan fisik berupa bangunan. Untuk kelompok-kelompok tani yang melaksanakan kegiatan dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan dalam rangka pencairan dana kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok tani.

6. Apakah evaluasi yang dilakukan sudah sampai melihat manfaat dari kegiatan ketahanan pangan yang dilaksanakan ?

Tanggapan Informan :

Evaluasi terhadap manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan, dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Yalimo yang selalu melakukan monitoring yang diawali dengan monitoring meja dengan melihat kemajuan fisik dan keuangan dan selanjutnya dengan melihat bukti fisik dilapangan.

7. Menurut Bapak, apa yang menjadi penghambat bidang pangan dalam melaksanakan pembangunan sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo ?

Tanggapan Informan :

Perubahan struktur organisasi menjadi Dinas Pertanian dan Pangan dengan 4 (empat) bidang yang ditangani membawa konsekuensi dibagi-baginya anggaran untuk kegiatan-kegiatan. Kondisi ini mengakibatkan bidang pangan hanya mendapat alokasi anggaran yang sangat kecil. Selain itu, kemampuan kerja khususnya pejabat Eselon 4 yang ditempatkan pada bidang pangan belum mampu memahami tupoksi dengan jelas sehingga masih diperlukan waktu bagi pejabat-pejabat yang ditempatkan tersebut untuk belajar memahami tupoksinya. Disamping itu, para pegawai yang ditempatkan di bidang pangan belum semuanya mampu menggunakan komputer sehingga sering dibantu dari Sekretariat. Pegawai belum mampu menterjemahkan berbagai program dan kegiatan dan berinovasi dalam mengembangkan ketahanan pangan yang hanya dilaksanakan berdasarkan petunjuk atasan saja.

Informan : **Kepala Bidang Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan**
Tanggal Wawancara : **Jumat, 15 Maret 2019**
Tempat Wawancara : **Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo**

1. Menurut pendapat Bapak, bagaimanakah arah pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo ?

Tanggapan Informan :

Pengembangan khususnya untuk pangan di Kabupaten Yalimo haruslah diawali dengan pengembangan komoditi tanaman pangan. Produksi dan produktivitas dari beberapa komoditi khususnya tanaman pangan perlu untuk ditingkatkan sehingga akhirnya akan menunjang ketahanan pangan. Rencana Strategis yang disusun hingga tahun 2021, sudah tepat dalam mempersiapkan sarana dan prasarana pengembangan produksi dan produktivitas beberapa komoditi pertanian agar nantinya ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo akan secara langsung terbentuk dengan sendirinya.

2. Apa saja kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan khususnya dalam upaya mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo ?

Tanggapan Informan :

Kegiatan-kegiatan yang selama ini dilaksanakan khususnya untuk mendukung ketahanan pangan lebih banyak berupa kegiatan optimasi lahan khususnya untuk beberapa komoditi tanaman pangan lokal. Kegiatan optimasi lahan ini bertujuan agar produksi tanaman pangan lokal tetap terjaga. Kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berulang-ulang setiap tahunnya berguna agar ketersediaannya dapat terjaga. Sebenarnya, jangan melihat dari program dan kegiatan dinas hanya dari satu sisi saja, namun harus dilihat secara komprehensif selama periode 5 (lima) tahun sesuai Rencana Strategis yang telah disusun, karena tahapan-tahapannya jelas mulai dari produksi, distribusi dan pemasaran. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan jelas untuk hal tersebut, dimana untuk kegiatan-kegiatan pembangunan ketahanan pangan akan secara langsung terbentuk dalam alur tersebut. Untuk sarana dan

prasarana penunjang ketahanan pangan sudah tersedia dan telah terbangun seperti : bangunan lumbung pangan dan lantai jemur, gudang penampungan hasil pertanian, balai-balai penyuluhan pertanian tingkat distrik dan gudang cadangan pangan daerah yang dibangun di Elelim. Bangunan-bangunan ini sudah dibangun sejak bidang pangan yang khusus menangani ketahanan pangan belum dibentuk dan dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian. Jika dilihat pemanfaatannya oleh masyarakat, menunjukkan bahwa belum semuanya dimanfaatkan secara baik oleh kelompok-kelompok tani.



Informan : Sekretaris Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan
Tanggal Wawancara : Selasa, 16 April 2019
Tempat Wawancara : Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
Yalimo

1. Menurut pendapat Bapak, bagaimanakah arah pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo ?

Tanggapan Informan :

Keberhasilan pembangunan ketahanan pangan dicapai jika pasokan pangan untuk kebutuhan penduduk Kabupaten Yalimo terpenuhi baik kualitas maupun kuantitasnya, dimana sasaran utamanya adalah terpenuhinya kebutuhan gizi bagi petani dan keluarganya. Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa tujuan dari pemenuhan kebutuhan pangan itu sendiri belum tercapai karena pembangunan sektor ketahanan pangan masih menjadi prioritas kedua dan prioritas pertama adalah mengembangkan dulu beberapa komoditi pendukung ketahanan pangan yakni komoditi-komoditi tanaman pangan, peternakan, dan perikanan darat (tupoksi Dinas Perikanan). Adapun tujuan dari pengembangan komoditi-komoditi ini yang dilakukan merata pada 5 (lima) distrik adalah untuk menjamin terpenuhinya bahan makanan bagi masyarakat yang ada di kampung-kampung.

2. Apakah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo selalu melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan ketahanan pangan dan bentuk evaluasinya seperti apa ?

Tanggapan Informan :

Evaluasi terhadap berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap tahun anggaran dilakukan dengan melihat realisasi baik fisik dan keuangan dan untuk fisik pekerjaan yang dilakukan baik dalam bentuk swakelola maupun pekerjaan konstruksi dilaksanakan setiap triwulan karena Bappeda Kabupaten Yalimo setiap triwulan melakukan monitoring meja untuk melihat kemajuan dari pelaksanaan program dan kegiatan. Setiap triwulan kita mengirim pegawai untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka melihat kemajuan pekerjaan di lapangan. Biasanya banyak masukan-masukan

berdasarkan hasil di lapangan yang merupakan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan akan diperbaiki kembali di tahun anggaran berikutnya.

3. Bagaimanakah skema penganggaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan setiap tahunnya dan bagaimana dengan alokasi untuk kegiatan-kegiatan pembangunan sektor ketahanan pangan ?

Tanggapan Informan :

Untuk penganggaran berbagai kegiatan dinas yang mengacu pada RKPD Kabupaten Yalimo setiap tahunnya, anggaran terbagi-bagi untuk membiayai beberapa bidang yakni : pertanian, peternakan, perkebunan, dan pangan. Sangatlah susah untuk fokus pada kegiatan-kegiatan tertentu karena semua bidang harus jalan dan ada kegiatannya. Selain itu, koordinasi khususnya untuk sektor ketahanan pangan belum terjalin dengan baik antara semua *stakeholders*. Idealnya bukan dinas saja yang memikirkan permasalahan ini, namun unsur-unsur lain juga harus terlibat dalam memikirkannya antara lain : Tim anggaran, Bappeda selaku badan perencanaan, DPRD khususnya komisi yang membidangi masalah ekonomi, dan Dewan Ketahanan Pangan yang sampai saat ini belum terbentuk di Kabupaten Yalimo.



Informan : **Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Yalimo**

Tanggal Wawancara : **Senin, 25 Maret 2019**

Tempat Wawancara : **Kantor Bappeda Kabupaten Yalimo**

1. Menurut pendapat Bapak, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo telah melaksanakan berbagai program yang mendukung pembangunan sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo ?

Tanggapan Informan :

Program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan yang telah terealisasi hingga akhir tahun 2018 dan akan dilaksanakan tahun 2019, serta yang termuat dalam RKPD Kabupaten Yalimo tahun 2020 lebih banyak berkaitan dengan pengembangan dan optimasi lahan tanaman pangan lokal dan pelatihan-pelatihan pengolahan pangan. Dinas Pertanian dan Pangan khususnya bidang pangan hingga penyusunan RKPD untuk perencanaan tahun 2020 belum menyusun program dan kegiatan secara cermat dan tepat sasaran dalam rangka menyediakan pangan yang bergizi bagi masyarakat Yalimo. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terkesan merupakan kegiatan rutin dan dilakukan berulang-ulang setiap tahunnya.

2. Menurut Bapak, bentuk kegiatan apa yang seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo ?

Tanggapan Informan :

Kegiatan-kegiatan pengembangan pangan masyarakat seharusnya berupa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana bahan pangan khususnya pangan lokal dapat memenuhi kebutuhan petani dan keluarganya dan juga dapat meningkatkan ekonomi keluarganya melalui bahan pangan yang diolah menjadi bentuk olahan (seperti : kripik, selai, cake ubi jalar, dll.) yang dapat dipasarkan.

3. Menurut Bapak, kegiatan-kegiatan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo telah memberikan manfaat bagi masyarakat ?

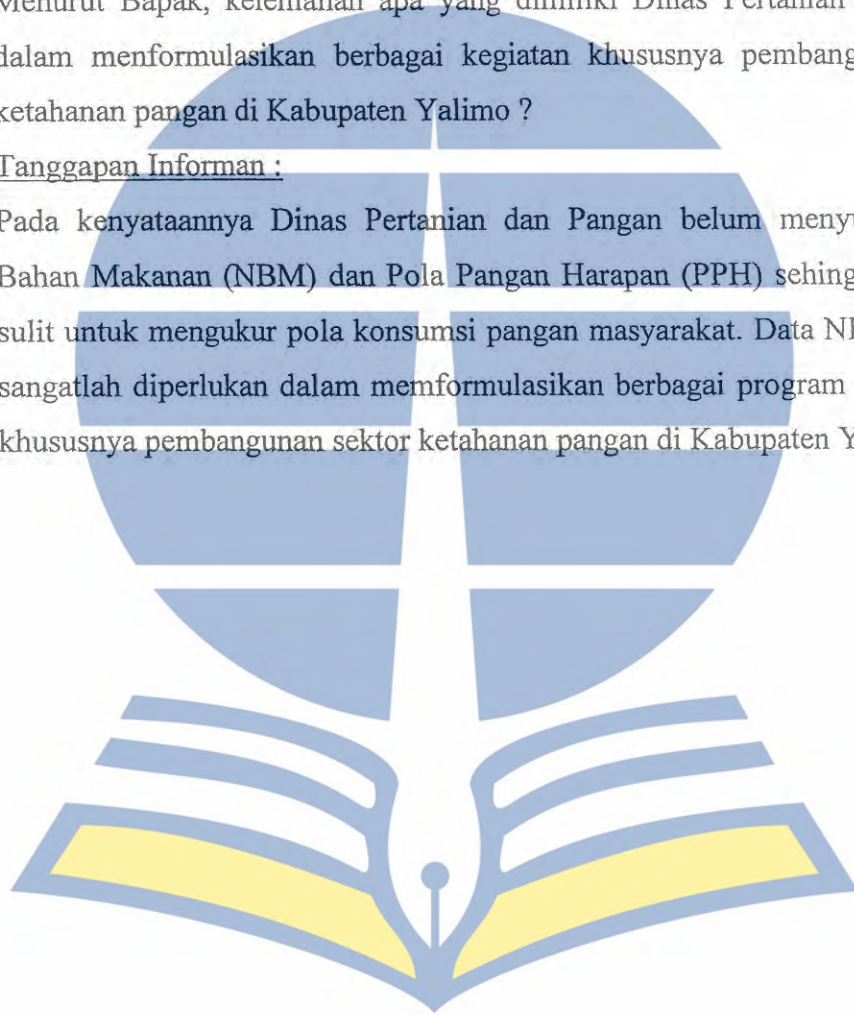
Tanggapan Informan :

Evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan khususnya untuk pembangunan sektor ketahanan pangan hanya sebatas melihat target *output* dari jenis pekerjaan yang dilaksanakan dan belum melihat *outcome* dari kegiatan tersebut.

4. Menurut Bapak, kelemahan apa yang dimiliki Dinas Pertanian dan Pangan dalam menformulasikan berbagai kegiatan khususnya pembangunan sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo ?

Tanggapan Informan :

Pada kenyataannya Dinas Pertanian dan Pangan belum menyusun Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) sehingga sangatlah sulit untuk mengukur pola konsumsi pangan masyarakat. Data NBM dan PPH sangatlah diperlukan dalam memformulasikan berbagai program dan kegiatan khususnya pembangunan sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo.



Informan : **Elias Sepleng (Ketua Kelompok Tani Nongkorok)**
 Tanggal Wawancara : **Selasa, 26 Maret 2019**
 Tempat Wawancara : **Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo**

1. Menurut Bapak, apakah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo telah memberikan bantuan dalam pengembangan tanaman pangan ?

Tanggapan Informan :

Dinas Pertanian dan Pangan telah memberikan bantuan khususnya untuk kembangkan tanaman pangan, namun masyarakat lebih suka tanam ubi jalar dan sayur-sayuran karena merupakan budaya yang sudah dilakukan sejak dulu.

2. Menurut Bapak, apakah tanaman padi sudah dikembangkan oleh kelompok tani di Kabupaten Yalimo ?

Tanggapan Informan :

Kami orang "Yali" lebih suka tanam *petatas* (ubi jalar) dan peliharaan *wam* (ternak babi) daripada tanam padi. Padi susah ditanam karena cara tanam masyarakat yang saat ini dilakukan hanya tebang pohon, bersihkan lahan dan tanam.

Informan : **Sakara Yare (Ketua Kelompok Tani Sohima)**
 Tanggal Wawancara : **Rabu, 27 Maret 2019**
 Tempat Wawancara : **Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo**

1. Menurut Bapak, apakah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo telah memberikan bantuan dalam pengembangan tanaman pangan ?

Tanggapan Informan :

Kami telah mengembangkan beberapa tanaman seperti ubi jalar, keladi (talas) dan juga padi. Dinas Pertanian telah mendampingi kami dalam budidaya dan bantuan peralatan.

Informan : **Yones Sama (Ketua Kelompok Tani Pangkikalo)**
Tanggal Wawancara : **Sabtu, 30 Maret 2019**
Tempat Wawancara : **Kampung Pangkik Distrik Elelim**

1. Menurut Bapak, kelompok-kelompok tani setiap tahunnya menerima kegiatan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo ?

Tanggapan Informan :

Kelompok-kelompok tani setiap tahunnya menerima kegiatan-kegiatan dari Dinas Pertanian dan Pangan.

2. Bagaimana bentuk kegiatan yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo ?

Tanggapan Informan :

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan biasanya sama setiap tahunnya dan bergulir dari kelompok tani yang satu kepada kelompok tani lainnya. Kelompok tani kami jika tidak dapat kegiatan tahun ini, kami menunggu dan akan mendapatkan kegiatan yang sama pada tahun-tahun berikutnya.



Informan : **Kornelis Kombo (Tokoh Adat Kabupaten Yalimo)**
Tanggal Wawancara : **Rabu, 3 April 2019**
Tempat Wawancara : **Kampung Sabilironggo – Distrik Abenaho**

1. Menurut Bapak, kelompok-kelompok tani telah mendapat bantuan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo dan bantuan-bantuan tersebut berkaitan dengan pengembangan pangan masyarakat ?

Tanggapan Informan :

Usaha masyarakat dalam bertani telah didukung oleh Dinas Pertanian dan Pangan, dimana ditandai dengan adanya bantuan-bantuan kegiatan maupun peralatan untuk berusahatani. Hanya saja dalam berusaha tani belum fokus pada lokasi-lokasi tertentu sebagai pusat produksi. Banyaknya usulan-usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musrembang di tingkat distrik membuat kegiatan-kegiatan usaha pertanian menjadi terbagi-bagi dan tidak terpusat. Untuk makanan pokok masyarakat khususnya beras masih didatangkan dari luar Yalimo karena kelompok-kelompok tani masih mengusahakannya dalam lahan-lahan kecil dan bukan lahan yang luas.

2. Apakah ada bantuan lainnya yang diberikan selain dari Dinas Pertanian dan Pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat ?

Tanggapan Informan :

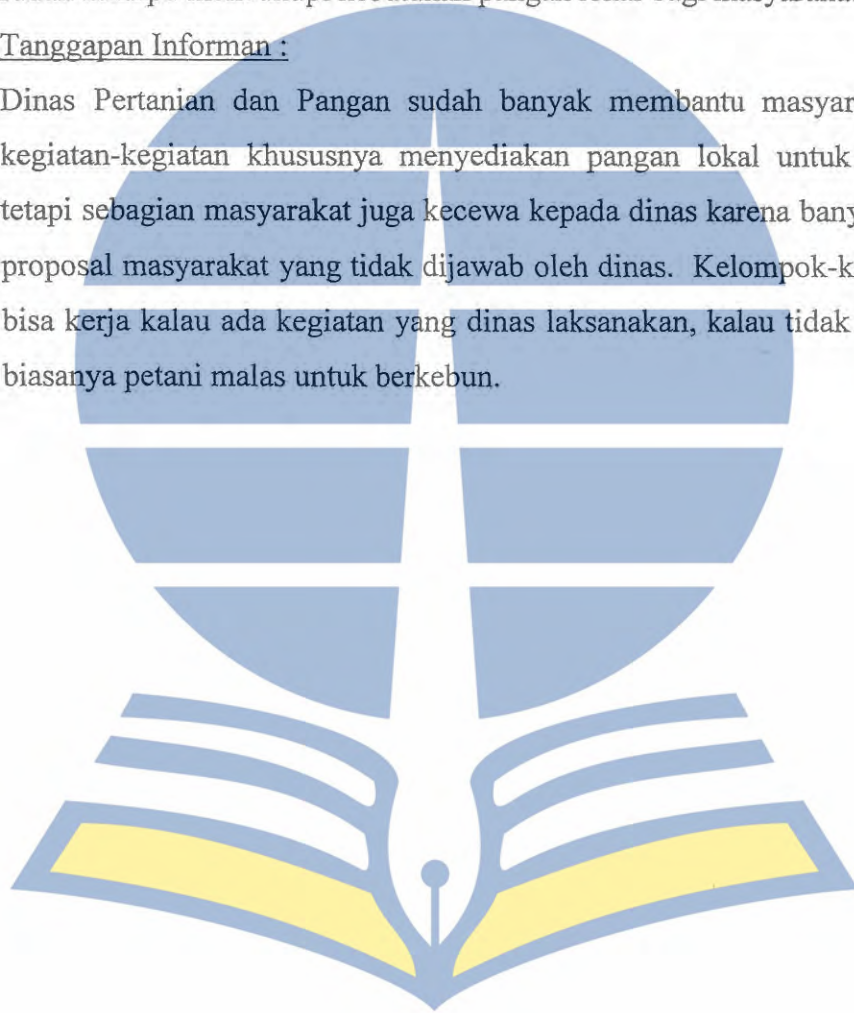
Berbagai bentuk bantuan untuk kebutuhan gizi masyarakat di Kabupaten Yalimo juga berasal dari berbagai dinas yang ada. Dinas Sosial selalu memberikan bantuan sembilan bahan pokok (sembako) untuk masyarakat hingga ke kampung-kampung, Dinas Kesehatan selalu melaksanakan pemberian makanan untuk balita dan ibu hamil. Kegiatan-kegiatan seperti ini dibiayai dari dana Otonomi Khusus dan memang manfaatnya bagi masyarakat Yalimo.

Informan : **Alpius Yare (Tokoh Adat Kabupaten Yalimo)**
Tanggal Wawancara : **Jumat, 5 April 2019**
Tempat Wawancara : **Kampung Bulmu – Distrik Elelim**

1. Menurut Bapak, berbagai bentuk kegiatan pengembangan tanaman pangan sudah mampu mencukupi kebutuhan pangan lokal bagi masyarakat ?

Tanggapan Informan :

Dinas Pertanian dan Pangan sudah banyak membantu masyarakat melalui kegiatan-kegiatan khususnya menyediakan pangan lokal untuk masyarakat, tetapi sebagian masyarakat juga kecewa kepada dinas karena banyak proposal-proposal masyarakat yang tidak dijawab oleh dinas. Kelompok-kelompok tani bisa kerja kalau ada kegiatan yang dinas laksanakan, kalau tidak ada kegiatan biasanya petani malas untuk berkebun.



Informan : Niko Mabel (Anggota DPRD Kabupaten Yalimo)
Tanggal Wawancara : Sabtu, 6 April 2019
Tempat Wawancara : Elelim – Distrik Elelim

1. Menurut pendapat Bapak, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo telah mampu melaksanakan pembangunan khususnya sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo ?

Tanggapan Informan :

Untuk sektor ketahanan pangan khususnya ketersediaan pangan bagi penduduk di Kabupaten Yalimo masih kurang yang ditunjukkan dengan pasokan khususnya beras dan bahan makanan lainnya masih didatangkan dari luar kabupaten. Dinas Pertanian dan Pangan harus bekerja keras untuk membuat formulasi kebijakan-kebijakan yang tepat dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Pengembangan produksi beberapa komoditi seperti tanaman pangan khususnya ubi jalar dan peternakan dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat yang dilakukan saat ini belum memberikan hasil dikarenakan skala usaha tani masyarakat masih kecil dan terbagi-bagi. Tujuan yang diharapkan dalam pemenuhan kebutuhan pangan belum dapat dicapai karena dinas belum mampu memunculkan komoditi-komoditi unggulan untuk setiap distriknya.

2. Menurut pendapat Bapak, kegiatan-kegiatan pengembangan pangan khususnya pangan lokal yang selama ini dilaksanakan Dinas Pertanian dan Pangan sudah memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat di Kabupaten Yalimo ?

Tanggapan Informan :

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dinas untuk ketahanan pangan belum nyata terlihat hingga saat ini. Masyarakat di Kabupaten Yalimo masih rentan dengan masalah ketahanan pangan karena kegiatan-kegiatan yang selama ini dilaksanakan hanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dan belum ada bukti nyata di lapangan. Dinas hanya merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mengejar produksi semata-mata dan berbanding terbalik dengan kondisi ril yang ada.

3. Apakah kegiatan evaluasi sering dilaksanakan khususnya untuk menjaga kondisi pangan masyarakat di Kabupaten Yalimo ?

Tanggapan Informan :

Kegiatan hearing yang kami lakukan selama ini dengan Dinas Pertanian dan Pangan belum mengevaluasi secara detail pembangunan sektor ketahanan pangan. Evaluasi dengan Dinas Pertanian dan Pangan lebih banyak berbicara produksi dari sektor-sektor lainnya seperti tanaman pangan, peternakan dan perkebunan. Untuk kecukupan pangan masyarakat, jika kita amati masih dalam taraf mencukupi karena banyaknya bantuan-bantuan yang diterima oleh masyarakat melalui dana-dana pemberdayaan masyarakat sampai pada tingkat kampung.

4. Apakah proses pembahasan anggaran yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Yalimo selalu melihat kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas dinas dalam pelaksanaan pembangunan daerah ?

Tanggapan Informan :

Pembahasan anggaran yang kami lakukan baik untuk anggaran induk maupun perubahan, selalu berdasarkan usulan program dan kegiatan yang diajukan oleh TAPD Kabupaten Yalimo. Dalam pembahasan anggaran tersebut, kami tidak pernah melihat kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas dinas, karena kami hanya melihat uraian kegiatan, anggarannya, serta lokasi pelaksanaan kegiatannya.

Informan : **Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo**
Tanggal Wawancara : **Senin, 22 April 2019**
Tempat Wawancara : **Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo**

1. Menurut pendapat Bapak, bagaimanakah arah pembangunan sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo ?

Tanggapan Informan :

Pengembangan beberapa komoditi baik tanaman pangan dan peternakan yang saat ini sedang dilaksanakan bertujuan agar terpenuhinya kebutuhan pangan dan kecukupan gizi bagi penduduk di Kabupaten Yalimo. Secara bertahap akan mengarah pada terciptanya ketahanan pangan bagi seluruh penduduk yang ada di Kabupaten Yalimo.

2. Menurut pendapat Bapak, mengapa pembangunan sektor ketahanan pangan yang saat ini dilaksanakan belum memberikan hasil yang memuaskan khususnya untuk pengembangan komoditi tanaman pangan khususnya padi ?

Tanggapan Informan :

Kenyataannya tak dapat dipungkiri bahwa sektor ketahanan pangan saat ini belum memberikan hasil yang menggembirakan dikarenakan Bidang Pangan yang menangani secara langsung ketahanan pangan baru dibentuk tahun 2017 melalui restrukturisasi yang telah dilaksanakan. Komoditi unggulan tanaman pangan khususnya ubi jalar, ubi kayu dan tanaman palawija serta komoditi peternakan khususnya ternak babi telah memberikan produktivitas yang meningkat setiap tahunnya. Sedangkan khusus untuk pengembangan komoditi padi baik padi sawah dan padi ladang belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas tanaman pangan secara keseluruhan. Hal ini lebih disebabkan karena budidaya khususnya untuk padi merupakan hal baru bagi masyarakat Yalimo sehingga masih diperlukan waktu untuk pengembangan maupun introduksi teknologinya.

3. Menurut pendapat Bapak, mengapa Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo setiap tahunnya melaksanakan kegiatan yang sama khususnya untuk kegiatan-kegiatan pengembangan tanaman pangan ?

Tanggapan Informan :

Kami selaku OPD yang melaksanakan kewenangan tersebut tidak memungkiri hal tersebut. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara berulang-ulang setiap tahunnya merupakan kegiatan prioritas dalam menjaga tetap terjaganya kecukupan pangan bagi masyarakat hingga di pelosok-pelosok kampung. Makanan pokok masyarakat adalah ubi-ubian sehingga kegiatan-kegiatan usahatani lebih banyak mengarah pada hal tersebut. Selain itu ada kegiatan-kegiatan penunjang dalam upaya memperbaiki aspek budidaya dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan melalui usaha pertanian.

4. Menurut pendapat Bapak, mengapa evaluasi terhadap pembangunan khususnya sektor ketahanan pangan belum dilakukan secara menyeluruh berdasarkan data-data dasar seperti data NBM dan PPH serta sarana dan prasarana ketahanan pangan yang sudah ada di Kabupaten Yalimo ?

Tanggapan Informan :

Kenyataannya hingga saat ini, evaluasi khusus untuk pembangunan sektor ketahanan pangan belum secara menyeluruh dilakukan dan hanya fokus pada produktivitas dari komoditi yang menunjang ketahanan pangan masyarakat. Untuk data Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH), kami masih melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayawijaya dan saat ini masih dalam proses penyamaan data produksi dan produktivitas khususnya beberapa komoditi seperti : tanaman pangan, peternakan dan perikanan budidaya. Nanti setelah data kami sudah sama dengan data BPS, baru kami lanjutkan dengan penyusunan data NBM dan PPH untuk Kabupaten Yalimo. Untuk lumbung pangan dan rantai jamur, serta sarana penyuluhan yang sudah tersedia, itu merupakan tuntutan pemanfaatan Dana DAK Bidang Pertanian dimana petunjuk pelaksanaannya hanya memungkinkan untuk membangun fasilitas penunjang ketahanan pangan seperti itu. Hal ini yang menyebabkan bahwa sarana penunjang ketahanan

pangan sudah terbangun sebelum pembentukan bidang pangan dan dilaksanakan oleh bidang pertanian dengan memaksimalkan penggunaan dana DAK Reguler Bidang Pertanian tersebut.

5. Menurut Bapak, apa saja penghambat yang sangat dirasakan dalam pembangunan sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yalimo ?

Tanggapan Informan :

Luasnya bidang tugas dan kewenangan sesuai struktur organisasi yang mengacu pada Perda Nomor 16 Tahun 2016, mengakibatkan sektor ketahanan pangan belum mendapat perhatian khusus. Selain itu, terkadang tugas-tugas bidang pertanian khususnya tanaman pangan hampir sama dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh bidang pangan, membuat alokasi kegiatan lebih banyak untuk bidang pertanian khususnya tanaman pangan. Sesuai aturan, seharusnya untuk ketahanan pangan yang merupakan urusan wajib terpisah secara organisasi dengan urusan pilihan sehingga dinas yang menangani urusan pilihan khususnya pertanian hanya mengurus bagaimana produksinya sementara dinas yang menangani urusan pangan lebih fokus dalam menjaga ketersediaan pangan. Sedangkan untuk manajemen ketahanan pangan saat ini belum optimal karena belum terbentuknya Dewan Ketahanan Pangan, sehingga belum ada organisasi di luar dinas yang dapat mengontrol maupun mengakomodir kegiatan-kegiatan ketahanan pangan. Inti sebenarnya agar pembangunan ketahanan pangan dapat optimal adalah pembentukan Dinas Ketahanan Pangan agar dinas tersebut lebih fokus dalam menangani permasalahan pangan di Kabupaten Yalimo. Jika masih dalam bentuk satu bidang yang melekat pada Dinas Pertanian dan Pangan, maka pembangunan ketahanan pangan akan sangat lambat dan akan jalan ditempat karena alokasi anggaran yang terbatas dan dibagi rata kesemua bidang-bidang yang ada.

Lampiran 2. Surat Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS TERBUKA

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) JAYAPURA

Jl. Sibero Temora Bakti, Wajem, Kotak Pos 204, Abepura Jayapura (99353) | Telepon : 0967 571090, 571447
Fax : 0967 571090, 571334 | Email : ut-jayapura@ut.ac.id

Nomor 0116/UNSI/UPBJJ.38/LL/2019

11 Februari 2019

Lampiran -

Hal 1

Permohonan ijin penelitian mahasiswa
Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka

Kepada:

Yth. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo

Di

Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu kelengkapan persyaratan kelulusan mahasiswa pada Universitas Terbuka Program Studi Pascasarjana adalah kegiatan penelitian melalui pengumpulan data baik secara primer maupun secara sekunder yang bermanfaat untuk penyempurnaan Tesis.

Maka sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuannya untuk dapat memberikan ijin kepada mahasiswa Universitas Terbuka yang dimaksud untuk dapat melakukan pengambilan data pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin, dalam jangka waktu tertentu.

Mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian, yaitu

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	Judul Tesis
1	SYARIFUDDIN HAFID	530003625	Efektivitas Dinas Pertanian dan Pangan Dalam Pembangunan Sektor Ketahanan Pangan di Kabupaten Yalimo

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya yang baik, diucapkan terima kasih.

Kepala UPBJJ Jayapura

Dr. Mura K. M. D.
NIP. 19590217 1990131 001

Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jalan Baru - Bulma Distrik Elelim

Email : dp3.kabupatenyalimo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 520.1/041/KET/DP2-YLM/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo, menerangkan bahwa :

Nama	: SYARIFUDDIN HAFID
Nim	: 530003625
Perguruan Tinggi	: UNIVERSITAS TERBUKA
Program Studi	: ADMINISTRASI PUBLIK
Jenjang Studi	: MAGISTER
Status	: IJIN BELAJAR

Adalah benar-benar telah melakukan penelitian mulai tanggal 25 Februari s.d. 03 Mei 2019, sesuai Surat Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Magister Administrasi Publik Nomor : 0116/UN31.UPBJJ.38/LL/2019 tanggal 11 Februari 2019, dengan judul penelitian : Efektivitas Dinas Pertanian dan Pangan Dalam Pembangunan Sektor Ketahanan Pangan di Kabupaten Yalimo.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sesuai keperluannya.

Elelim, 3 Mei 2019.

Kepala Dinas,

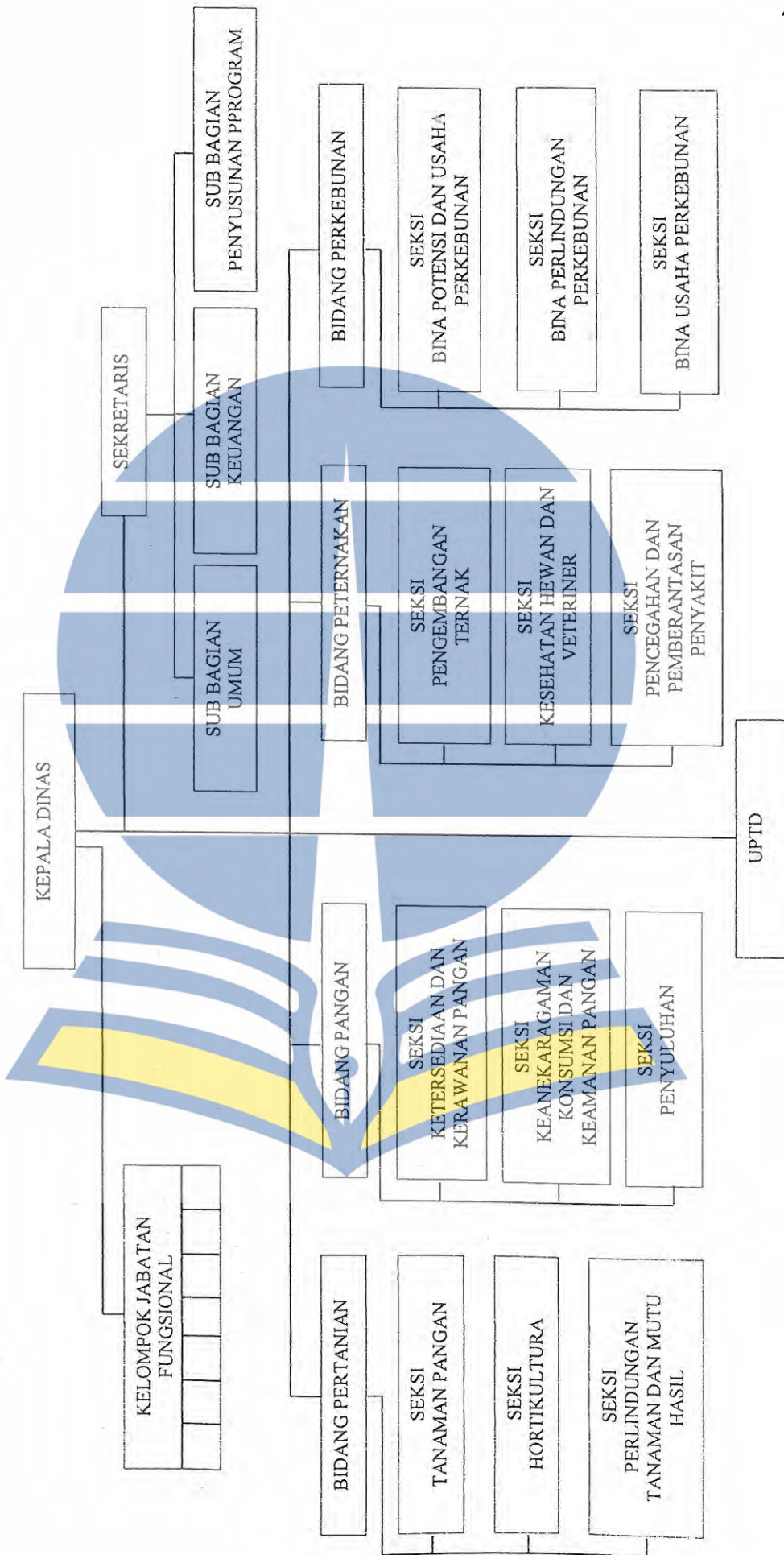


JONATHAN A. MANGALIK, S.Pt
PEMBINA TK. I
NIP. 19800610 200312 1 006

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Yalimo di Elelim.

Lampiran 4. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Yalimo.



Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara



Informan : Kepala Bidang Pangan
Wawancara : Selasa, 12 Maret 2019

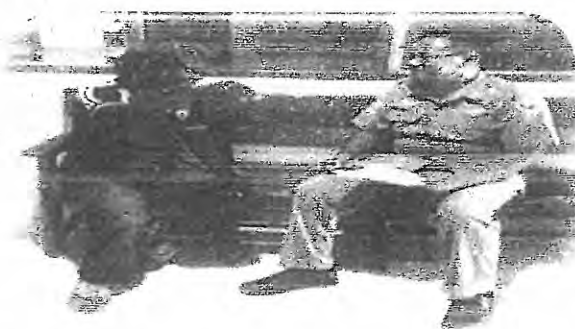


Informan : Kepala Bidang Pertanian
Wawancara : Jumat, 15 Maret 2019

Informan : Sekretaris Dinas
Wawancara : Selasa, 16 April 2019



Informan : Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Yalimo
Wawancara : Senin, 25 Maret 2019



Informan : Kelompok Tani Nongkorok
Wawancara : Selasa, 26 Maret 2019



Informan : Ketua Kelompok Tani Sohima
Wawancara : Rabu, 27 Maret 2019



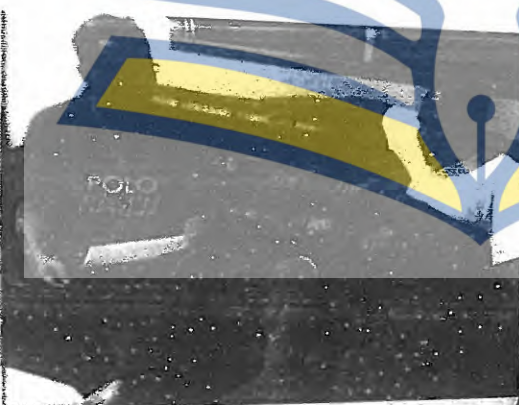
Informan : Kelompok Tani Pangkikalo
Wawancara : Sabtu, 30 Maret 2019



Informan : Tokoh Adat
Wawancara : Jumat, 5 April 2019



Informan : Tokoh Adat dan Kelompok Tani
Sabilironggo
Wawancara : Rabu, 3 April 2019



Informan : Anggota DPRD
Wawancara : Sabtu, 6 April 2019



Informan : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Wawancara : Senin, 22 April 2019

